

IMPLEMENTASI SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) DI MADRASAH ALIYAH MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

by Buku Ahmad Zainuri

Submission date: 26-Jul-2022 02:49PM (UTC+0700)

Submission ID: 1875370275

File name: pak_zainuri_1.pdf (4.76M)

Word count: 33287

Character count: 214438

IMPLEMENTASI SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) DI MADRASAH ALIYAH MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

(Studi Kasus Penerapan SKS di MAN 3 Palembang)



Dr. Ahmad Zainuri, M.Pd.I

IMPLEMENTASI SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) DI MADRASAH ALIYAH MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
(Studi Kasus Penerapan SKS di MAN 3 Palembang)

RAFAH press
Jl. Raya Palembang - Muarajaya No. 101
Kec. Palembang Utara, Kota Palembang
Sumsel 30132

**IMPLEMENTASI SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)
DI MADRASAH ALIYAH MENGHADAPI
ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
(Studi Kasus Penerapan SKS di MAN 3 Palembang)**

Dr. Ahmad Zainuri, M.Pd.I

**Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan
Sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

Ketentuan Pidana

Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**IMPLEMENTASI SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) DI MADRASAH
ALIAH MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
(Studi Kasus Penerapan SKS di MAN 3 Palembang)**

Penulis : Dr. Ahmad Zainuri, M.Pd.I
Layout : Nyimas Amrina Rosyada
Desain Cover : Haryono

Diterbitkan Oleh:

Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat UIN RF Palembang
Anggota IKAPI

Dicetak oleh:

CV. Amanah

Jl. Mayor Mahidin No. 142

Telp/Fax : 366 625

Palembang – Indonesia 30126

E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I: September 2020

18 x 25 cm

xiv, 145 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

All right reserved

ISBN :

KATA PENGANTAR PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah Swt, karena berkat limpahan rahmat dan inayah-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan, sehingga mampu melaksanakan semua aktivitas keseharian kita. Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah menghantarkan kita pada pencerahan spiritual dan intelektual, sehingga menemukan hakikat makna kesejatian nilai-nilai kemanusiaan universal.

Alhamdulillah, penelitian berjudul “**Implementasi Sistem Kredit Semestre (SKS) di Madrasah Aliyah Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus Penerapan SKS di MAN 3 Palembang)**” telah selesai ditulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan implementasi dan sekaligus faktor kendala dalam proses implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) di MAN 3 Palembang dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 serta faktor kendala dan evaluasi pelaksanaannya.

Dengan demikian penelitian secara teoritis diharapkan akan bermanfaat dalam menambah khazanah intelektual, khususnya studi kurikulum pendidikan Islam di Madrasah Aliyah. Sedangkan secara praksis, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan/atau bahan masukan bagi penyusunan rencana strategis (renstra) pengembangan kurikulum, terutama desain kurikulum yang berorientasi SKS di MAN 3 Palembang agar nantinya pelaksanaan SKS di lembaga pendidikan Islam ini dikelola secara profesional, *credible*, dan *accountable* serta *capable* untuk meningkatkan kapasitas, mutu, dan reputasi sivitas akademika MAN 3 Palembang dalam bidang akademik dan non akademik.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih pada segenap jajaran Rektorat dan rekan-rekan dosen di Pascasarjana UIN Raden Fatah yang selama ini telah bekerjasama dengan baik, sehingga terlaksananya penelitian ini. Selanjutnya, juga saya ucapkan terima kasih pada Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang atas kesempatan yang diberikan pada peneliti, sehingga penelitian ini berjalan dengan baik dan selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala MAN 3 Palembang Hj. Komariah Hawa, M.Pd beserta para guru dan siswa sebab tanpa bantuan mereka penelitian ini tidak pernah terwujud. Semua informasi yang diberikan sangat berguna dalam penyusunan laporan penelitian ini.

Akhirnya, semua yang terlibat dalam saya mengucapkan terima kasih serta semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan Allah Swt selalu memberi petunjuk dan hidayah-Nya pada kita semua. Amin. Selamat Membaca!.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, September 2020

Dr. H. Ahmad Zainuri, M.Pd.I

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar Penulis	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar	viii
Abstrak.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Mafaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	19
A. Pengertian dan Variabel Implementasi Kebijakan.....	19
B. Implementasi Sistem SKS.....	29
C. Madrasah Aliyah di Era Revolusi Industri 4.0.....	40
BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	49
A. Sejarah Singkat MAN 3 Palembang	49
B. Visi, Misi, dan Tujuan MAN 3 Palembang	51
C. Program Pendidikan MAN 3 Palembang	54

D. Sarana dan Prasarana MAN 3 Palembang	56
E. Prestasi MAN 3 Palembang	63
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	65
A. Temuan Penelitian	65
1. Implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) di MAN 3 Palembang dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0	65
2. Faktor Kendala Implementasi Sistem Kredit Semester (SKs) di MAN 3 Palembang dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0	108
B. Analisis Temuan Penelitian	121
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran-Saran	131
Daftar Pustaka	132
Indeks	141
Glosarium.....	144

DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1 : Struktur Kurikulum Program SKS dan/atau Reguler 6 Semester MAN 3 Palembang Tahun Ajaran 2019/2020 75
- Tabel 4.2 : Struktur Kurikulum Program SKS 4 Semester Pola Kontinyu MAN 3 Palembang Tahun Ajaran 2019/2020..... 77
- Tabel 4.3 : Struktur Kurikulum Program SKS 4 Semester Pola Diskontinyu MAN 3 Palembang Tahun Ajaran 2019/2020. 78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Implementasi kebijakan Edwards III	20
Gambar 2.2. Level industri 4.0	41
Gambar 2.3. <i>Core Subject 21st Century Skills</i>	44
Gambar 2.4. <i>Chronosystem</i> Pendidikan Kejuruan Era Industri 4.0	45

ABSTRAK

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar mampu menghadapi tantangan di era Revolusi Industri 4.0 tidak terlepas dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk di dalamnya MAN 3 Palembang dengan menerapkan model pembelajaran SKS. Penerapan model pembelajaran SKS sudah diterapkan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Palembang sejak tahun ajaran 2015/2016 lalu. Model pembelajaran ini diyakini sebagai upaya inovatif meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, penerapan SKS di MAN 3 Palembang dapat menjadi alternatif bagi siswa MAN 3 Palembang yang berminat masuk kelas akselerasi dan sekaligus bentuk pelayanan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki keragaman bakat, minat dan kecerdasan. Karena itu, rumusan masalah dapat dirinci; 1). Bagaimana implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) di MAN 3 Palembang dalam menghadapi era revolusi industri 4.0? dan 2). Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) di MAN 3 Palembang dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 tersebut?. Secara teoritis diharapkan akan bermanfaat dalam menambah khazanah intelektual, khususnya studi kurikulum pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Secara praksis, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan/atau bahan masukan bagi penyusunan rencana strategis (renstra) pengembangan kurikulum, terutama desain kurikulum yang berorientasi SKS di MAN 3 Palembang.

Penelitian ini adalah *field research* dengan pendekatan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini, berupa sumber data primer diperoleh dari informan atau *stakeholder* yang terlibat langsung dalam implementasi SKS di MAN 3 Palembang dan sumber data sekunder sebagai data penunjang. Instrumen pengumpul data dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dengan teknik triangulasi.

Temuan penelitian bahwa implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) di MAN 3 Palembang dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 telah berjalan dengan baik. MAN 3 Palembang telah memfasilitasi keragaman peserta didik dalam hal kecepatan belajar, sehingga memungkinkan mereka menyelesaikan studi dalam waktu yang beragam. Secara umum desain struktur kurikulum dan beban belajar SKS mengacu pada Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 dan mampu menghadapi RI4.0, di mana fasilitas belajar yang berbasis digital dan website serta telah didukung oleh komunikasi yang efektif antara kepala madrasah, guru, dan siswa. Selain itu, terdapat juga sumber daya manusia, baik kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikannya yang telah memenuhi syarat dalam

penerapan SKS. Faktor kendala dalam implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) di MAN 3 Palembang dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini adalah *overstress* maupun *understress* terakumulasi pada diri peserta didik MAN 3 Palembang, sehingga berdampak buruk bagi prestasi belajarnya. Bila ini dibiarkan berlarut-larut, maka prestasi belajar yang tidak maksimal menyebabkan daya saing mereka dalam era RI4.0 akan lemah dan kalah bersaing dengan lembaga pendidikan sederajat lainnya. Karena kejenuhan belajar adalah suatu kondisi mental di mana seorang siswa mengalami kebosanan yang amat sangat untuk melakukan aktifitas belajar, dan kebosanan tersebut membuat motivasi belajar mereka menurun.

Kata Kunci : *Sistem Kredit Semester (SKS), MAN 3 Palembang, dan Revolusi Industri 4.0*

Abstract

To improve the quality of human resources in order to be able to face challenges in the era of Industrial Revolution 4.0 not separated from efforts to improve the quality of education, including man 3 Palembang by applying sks learning model. The application of sks learning model has been implemented Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Palembang since the 2015/2016 school year. This learning model is believed to be an innovative effort to improve the quality of education. In addition, the application of SKS in MAN 3 Palembang can be an alternative for MAN 3 Palembang students who are interested in entering acceleration classes and at the same time a form of service provided to students who have a diversity of talents, interests and intelligence. Therefore, the formulation of the problem can be detailed; 1). How is the implementation of Semester Credit System (SKS) in MAN 3 Palembang in the face of the era of industrial revolution 4.0? and 2). What factors are the obstacles in the implementation of Semester Credit System (SKS) in MAN 3 Palembang in the face of the industrial revolution era 4.0?. Theoretically it is expected to be useful in adding intellectual treasures, especially the study of Islamic education curriculum in Madrasah Aliyah Praksis, this research is expected to be useful and/or input material for the preparation of strategic plan (plan) of curriculum development, especially sks oriented curriculum design in MAN 3 Palembang.

This research is field research with a case study approach approach. The data sources in this study, in the form of primary data sources are obtained from informants or stakeholders directly involved in the implementation of SKS in MAN 3 Palembang and secondary data sources as supporting data. The data collection instruments in this study are non-participant observations, in-depth interviews and documentation. Analyze data with triangulation techniques.

Research findings that the implementation of Semester Credit System (SKS) in MAN 3 Palembang in the face of the era of industrial revolution 4.0 has gone well. MAN 3 Palembang has facilitated the diversity of students in terms of learning speed, allowing them to complete studies in a variety of times. In general, the design of the curriculum structure and learning burden sks refers to Permendikbud No. 59 of 2014 and is able to face RI4.0, where learning facilities based on digital and website and have been supported by effective communication between madrasah heads, teachers, and students. In addition, there are also human resources, both madrasah heads, teachers, and educational personnel who have qualified in the application of sks. The problem factor in the implementation of Semester Credit System (SKS) in MAN 3 Palembang in the face of the industrial

revolution era 4.0 is the overstress and understress accumulated in the students of MAN 3 Palembang, thus adversely affecting their learning achievements. If this is allowed protracted, then the learning achievement that is not maximal causes their competitiveness in the era of RI4.0 will be weak and lose competing with other equivalent educational institutions. Because the saturation of learning is a mental condition in which a student experiences very boredom to do learning activities, and that boredom makes their learning motivation decrease.

Keywords : *Semester Credit System (SKS), MAN 3 Palembang, and Industrial Revolution 4.0*

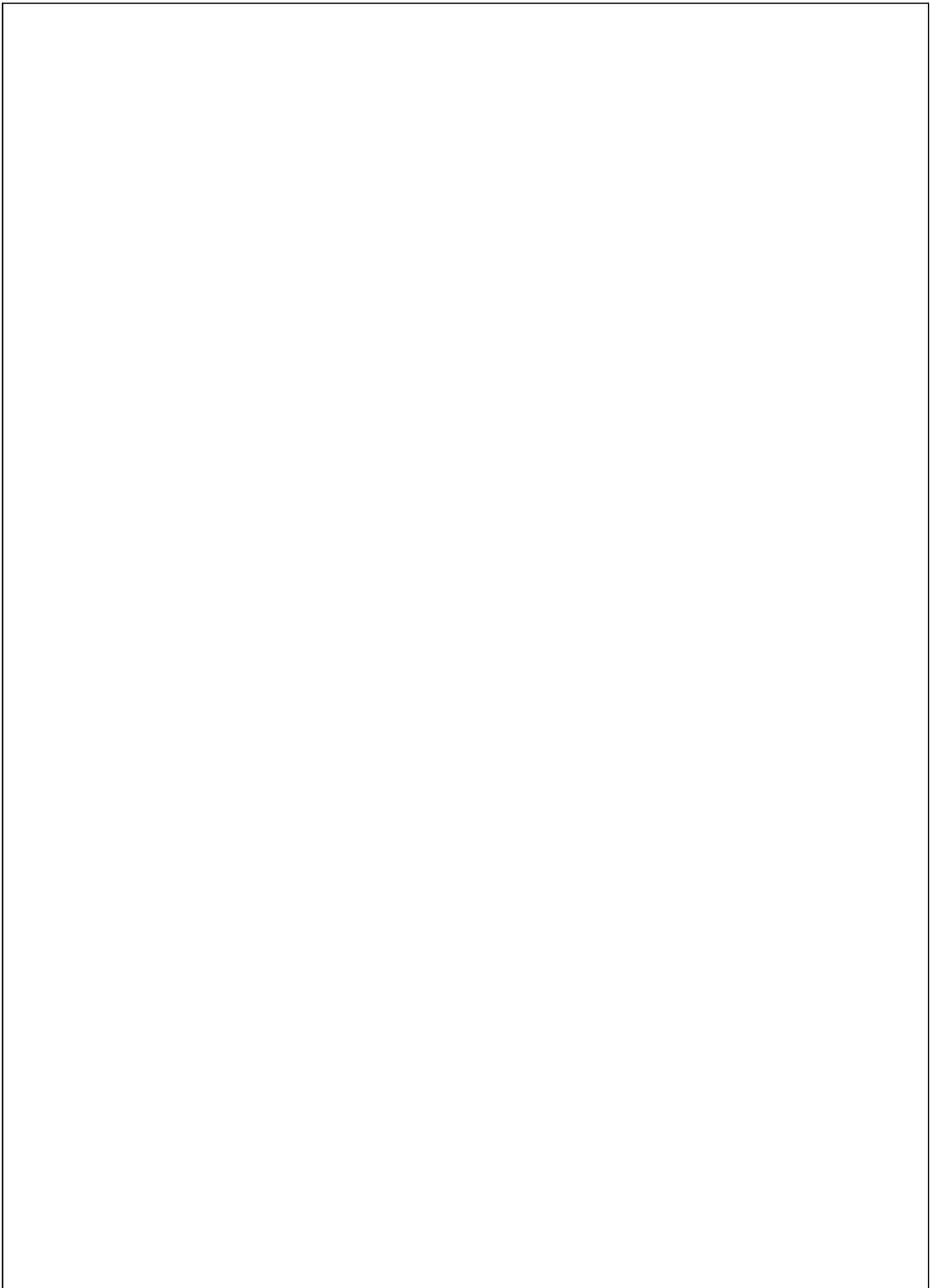
مجرده

لتحسين نوعية الموارد البشرية من أجل أن تكون قادرة على مواجهة التحديات في عصر الثورة الصناعية ٤.٠ لا فصل عن الجهود المبذولة لتحسين نوعية التعليم، بما في ذلك رجل ٣ باليماجانج من خلال تطبيق نموذج التعلم SKS. تطبيق نموذج التعلم SKS تم تنفيذ المدرسة عليا نيجيري 3 (MAN) باليماجانج منذ العام الدراسي ٢٠١٥/٢٠١٦. ويعتقد أن هذا النموذج التعليمي هو جهد مبتكر لتحسين جودة التعليم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطبيق SKS في MAN 3 باليماجانج يكون بديلاً عن طلاب MAN 3 باليماجانج المهتمين بدخول فصول التسريع وفي الوقت نفسه شكل من أشكال الخدمة المقدمة للطلاب الذين لديهم تنوع في المواهب والاهتمامات والذكاء. ولذلك، يمكن تفصيل صياغة المشكلة؛ ١. (كيف يتم تنفيذ نظام الانتماء الفصل الدراسي (SKS) في MAN 3 باليماجانج في مواجهة عصر الثورة الصناعية ٤.٠؟ و ٢). ما هي العوامل التي تعترض تنفيذ نظام الانتماء الفصل الدراسي (SKS) في MAN 3 باليماجانج في مواجهة عصر الثورة الصناعية ٤.٠؟ نظرياً من المتوقع أن يكون مفيداً في إضافة كنوز فكرية، وخاصة دراسة مناهج التعليم الإسلامي في مدرسة العليا براكسيس، ومن المتوقع أن يكون هذا البحث مفيداً وأو مادة لإدخال لإعداد الخطة الاستراتيجية (خطة) لتطوير المناهج الدراسية، وخاصة تصميم المناهج الدراسية الموجهة إلى SKS في MAN 3 Palembang.

هذا البحث هو بحث ميداني مع نهج دراسة الحالة. مصادر البيانات في هذه الدراسة، في شكل مصادر البيانات الأولية يتم الحصول عليها من المخبرين أو أصحاب المصلحة المشاركين مباشرة في تنفيذ SKS في MAN 3 باليماجانج ومصادر البيانات الثانوية كبيانات داعمة. ٢- أدوات جمع البيانات في هذه الدراسة هي ملاحظات غير المشاركين، ومقابلات متعمقة، ووثائق. تحليل البيانات باستخدام تقنيات التثليث.

نتائج البحوث التي تم تنفيذها من نظام الانتماء الفصل الدراسي (SKS) في MAN 3 باليماجانج في مواجهة عصر الثورة الصناعية 4.0 قد سارت على ما يرام. وقد سهلت MAN 3 باليماجانج تنوع الطلاب من حيث سرعة التعلم، مما سمح لهم بإكمال الدراسة في عدة مرات. بشكل عام، فإن تصميم بنية المناهج الدراسية وعبء التعلم يشير إلى Permendikbud رقم ٥٩ لعام ٢٠١٤، وهو قادر على مواجهة RI4.0، حيث تقوم مرافق التعلم على الموقع الرقمي والموقع الإلكتروني، وقد تم دعمها من خلال التواصل الفعال بين رؤساء المدارس والمعلمين والطلاب. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضاً الموارد البشرية، سواء رؤساء المدارس والمعلمين، والعاملين في مجال التعليم الذين لديهم مؤهلات في تطبيق SKS العامل المشكلة في تنفيذ نظام الانتماء الفصل الدراسي (SKS) في MAN 3 باليماجانج في مواجهة عصر الثورة الصناعية ٤.٠ هو الإفراط في الإجهاد والتخفيض المتراكمة في طلاب MAN 3 باليماجانج، وبالتالي تؤثر سلباً على إنجازاتهم التعلم. إذا سمح بذلك لفترة طويلة، فإن التحصيل التعليمي الذي لا يؤدي إلى أقصى حد من قدرتها التنافسية في عصر RI4.0 سيكون ضعيفاً وسيفقد المنافسة مع المؤسسات التعليمية الأخرى المعادلة. لأن تشعب التعلم هو حالة عقلية يعاني فيها الطالب من الملل الشديد للقيام بأنشطة التعلم، وهذا الملل يجعل حافظه التعليمي يقلل.

الكلمات الرئيسية: نظام الانتماء الفصل الدراسي (SKS)، مان ٣ باليماجانج، والثورة الصناعية ٤.٠



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) Indonesia, sehingga mampu menghadapi tantangan di era Revolusi Industri 4.0 adalah meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk kualitas pendidikan di Madrasah Aliyah. Dalam Permen Agama RI No 90/2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 point 6 disebutkan bahwa “Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs”.¹

Sebagai satuan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Umum yang berciri khas agama Islam. maka penyelenggaraan pendidikan MA bertujuan menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt, berakhlak baik, bertanggung jawab, menguasai kemampuan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi dan dapat memasuki dunia kerja dan/atau dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut. Atau dengan kalimat lain pendidikan MA menghasilkan *out put* yang mampu bekerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan bisa masuk ke perguruan tinggi umum dan agama.

Karakteristik MA tentu sedikit berbeda dengan jenjang pendidikan yang setingkat. Karena itu, penerapan kurikulumnya juga berbeda. Di satu pihak, kurikulum MA harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan

¹Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2013)

dinamika masyarakat agar lembaga pendidikan Islam tidak tertinggal dengan lembaga pendidikan lainnya. Namun di sisi lain, MA harus menunjukkan jati dirinya sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki ciri khas keislaman.²

Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, dalam muatan kurikulum MA harus tercermin aspek keagamaan (spiritualitas), sosial budaya, seni dan teknologi. Selain itu, kurikulum MA juga wajib memuat mata pelajaran ilmu-ilmu agama, termasuk di dalamnya bahasa Arab, al-Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih dan Sejarah Islam. Dalam muatan kurikulum MA juga diberikan program studi bahasa maupun program keahlian kejuruan mata pelajaran. Dengan demikian jumlah jam pelajaran pun di MA ada perbedaan dengan tingkat sekolah menengah umum lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa muatan kurikulum di MA sangat *integrated* yang menitikberatkan pada pencapaian ilmu-ilmu keislaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai oleh semangat keimanan dan ketakwaan. Hal ini tidak terlepas dari tuntutan dinamika masyarakat dan kebutuhan pasar kerja, sehingga peserta didik diajarkan tidak hanya berorientasi fiqih (*fiqh-oriented*). Lebih dari itu, diajarkan pula wawasan Islam mengenai kebangsaan, ilmu pengetahuan-teknologi dan kemoderenan, sehingga akan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, MA niscaya dihadapkan pada tantangan era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 mulai muncul sekitar pada tahun 2010-an yang ditandai dengan rekayasa

16

²Trisna DwiAnjarsa, "Sistem SKS Untuk Meningkatkan Prestasi Peserta Didik pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas XI MIA 1 di MAN 1 Tulungagung". *Skripsi*. (Tulungagung: Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, IAIN Tulungagung, 2017), hlm. 26.

intelegensia dan *internet of thing* sebagai tulang punggung konektivitas manusia dan mesin.³ Menghadapi tantangan ini sesuai dengan salah satu visi penyusunan *Making Indonesia 4.0* adalah menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.⁴

Di sinilah tampaknya upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu dari 10 prioritas dalam program *Making Indonesia 4.0*. Peningkatan kualitas SDM akan selalu terkait dengan lembaga pendidikan Islam, khususnya MA, yang tidak hanya penyusunan kurikulum berorientasi ilmu=ilmu keislaman, tetapi juga lebih menekankan pada STEAM (*Science, Technology, Engineering, the Arts, dan Mathematics*). Artinya, perlu menyelaraskan kurikulum MA yang berorientasi pada kurikulum pendidikan nasional (Kementerian Agama) dengan kebutuhan industri di masa mendatang.⁵

Dalam penyusunan desain kurikulum MA hendaknya membekali anak didik dengan berbagai keterampilan berfikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan inovatif serta ketrampilan komunikasi dan kolaborasi. Selain itu ketrampilan mencari, mengelola dan menyampaikan informasi serta trampil menggunakan informasi dan teknologi. Karena tak berlebihan bila dikatakan keterampilan yang musti dimiliki MA di era revolusi industri 4.0 meliputi *leadership, digital literacy, communication, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizenship, problem solving, team-*

³Prasetyo, B., & Trisyanti, U., "Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial. Dalam *Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0"*, 2018).

⁴Satya, V. E., "Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0." Jakarta. Retrieved from <https://bikinpabrik.id/wp-content/uploads/2019/01/Info-Singkat-X-9-IP3DI-Mei-2018-249.pdf>

⁵Eko Risdianto, "Analisis Pendidikan Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0". Dalam <https://www.researchgate.net/publication/332423142>, 15 April 2019.

working. Karena itu, pendidikan MA harus menitikberatkan pada pendidikan karakter, pendidikan vokasi, inovasi.⁶

Disinyalir salah satu upaya menjadikan MA mampu berkompetisi di era revolusi industri 4.0 dengan menerapkan pembelajaran Sistem Kredit Semester. Atas dasar inilah sejak tahun ajaran 2015/2016, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Palembang telah menerapkan model pembelajaran dengan menggunakan SKS sebagai upaya inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Penerapan SKS di MAN 3 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3274 Tahun 2015 yang menetapkan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Palembang menggunakan SKS. Dengan adanya surat keputusan tersebut MAN 3 Palembang termasuk 29 MA di Indonesia yang ditetapkan sebagai penyelenggara program pembelajaran SKS.

Penerapan SKS di MAN 3 Palembang dapat menjadi alternatif bagi siswa MAN 3 yang berminat masuk kelas akselerasi. Di samping itu, SKS merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki keragaman bakat, minat dan kecerdasan. Sehingga siswa MAN 3 dapat mengikuti proses pendidikan sesuai kemampuan yang mereka miliki. Jadi, SKS ini dilaksanakan layaknya seperti sistem pembelajaran di jenjang perguruan tinggi. siswa bisa jadi mata pelajaran yang akan diambil berbeda-beda di setiap semester atau jenjang kelasnya.⁷

Dalam penerapan pembelajaran SKS beban belajar di MAN 3 Palembang dinyatakan dengan jam pelajaran (JP) dengan beban keseluruhan pada tingkat MA minimal 306 JP. Beban belajar 1 JP secara umum terdiri dari atas 45 menit kegiatan tatap muka dan minimal 60%

⁶*Ibid.*,

⁷Mochamad Krisnariansyah, "MAN 3 Palembang Terapkan Sistem SKS di Tahun Ajaran Baru", TRIBUNnews.com, Rabu, 8 Juli 2015.

(sekitar 27 menit) untuk kegiatan penugasan terstruktur dan tugas mandiri tidak terstruktur. Secara khusus kegiatan satu jam pelajaran tatap muka dalam beban belajar bagi peserta didik yang memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata, durasi satu jam pelajaran dapat dilaksanakan selama 30 menit.

Dalam program pendidikan, pengertian semester dipakai sebagai satuan waktu terkecil untuk menyatakan suatu program pendidikan satu jenjang, artinya program pendidikan satu jenjang dari awal sampai akhir dibagi-bagi dalam penyelenggaraan program semester. Oleh sebab itu seorang siswa MAN 3 Palembang yang menempuh suatu program pendidikan lengkap satu jenjang harus menjalani program-program semester sebanyak yang dituntut oleh program pendidikan jenjang tersebut. SKS juga berarti suatu sistem penghargaan terhadap prestasi peserta didik dalam bidang pengalaman belajar dalam rangka pemenuhan syarat-syarat program pendidikan yang diikutinya.⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran SKS memberikan pilihan mata pelajaran dan waktu penyelesaian masa belajar yang memungkinkan peserta didik menentukan dan mengatur strategi belajar secara mandiri. Selain itu, penyelenggaraan SKS memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan belajar dan mencapai tingkat kemampuan optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar. Sehingga memungkinkan peserta didik langsung mengikuti muatan, mata pelajaran atau program lebih lanjut tanpa terkendala oleh peserta didik lain.

⁸Oemar Hamalik, *Manajemen Belajar Di Perguruan Tinggi Pendekatan Sitem Kredit Semester (SKS)*, (Bandung: Sinar Baru. 1991), hlm. 35.

B. Rumusan Masalah

Meningkatkan kualitas SDM Indonesia, sehingga mampu menghadapi tantangan di era Revolusi Industri 4.0 tidak terlepas dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk di dalamnya MAN 3 Palembang dengan menerapkan model pembelajaran SKS.

Penerapan model pembelajaran SKS sudah diterapkan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Palembang sejak tahun ajaran 2015/2016 lalu. Model pembelajaran ini diyakini sebagai upaya inovatif meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, penerapan SKS di MAN 3 Palembang dapat menjadi alternatif bagi siswa MAN 3 Palembang yang berminat masuk kelas akselerasi dan sekaligus bentuk pelayanan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki keragaman bakat, minat dan kecerdasan.

Untuk lebih jelasnya rumusan masalah dapat dirinci sebagai berikut;

1. Bagaimana implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) di MAN 3 Palembang dalam menghadapi era revolusi industri 4.0?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) di MAN 3 Palembang dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan fokus utama penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah ingin mengkaji dan mendeskripsikan implementasi dan sekaligus faktor kendala dalam proses implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) di MAN 3 Palembang dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 serta faktor kendala dan evaluasi pelaksanaannya.

Dengan demikian penelitian secara teoritis diharapkan akan bermanfaat dalam menambah khazanah intelektual, khususnya studi

kurikulum pendidikan Islam di Madrasah Aliyah. Sedangkan secara praksis, penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan/atau bahan masukan bagi penyusunan rencana strategis (renstra) pengembangan kurikulum, terutama desain kurikulum yang berorientasi SKS di MAN 3 Palembang agar nantinya pelaksanaan SKS di lembaga pendidikan Islam ini dikelola secara profesional, *credible*, dan *accountable* serta *capable* untuk meningkatkan kapasitas, mutu, dan reputasi sivitas akademika MAN 3 Palembang dalam bidang akademik dan non akademik.

D. Kajian Pustaka

Telah banyak penelitian dan tulisan yang dimuat di beberapa jurnal ilmiah mengenai implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) di lembaga pendidikan Islam. Di antaranya, Trisna Dwi Anjarsa,¹⁶ "Sistem SKS Untuk Meningkatkan Prestasi Peserta Didik pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas XI MIA 1 di MAN 1 Tulungagung".⁹ Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa; (1) SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan dimana peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan atau kecepatan belajar. Persiapan yang harus dilakukan saat penyelenggaraan SKS di MAN 1 Tulungagung Ada 3 tahapan. Dengan adanya Persiapan sebelum melakukan penyelenggaraan SKS, memudahkan semua belah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SKS Di MAN 1 Tulungagung. (2) Implementasinya dilakukan secara bertahap dengan Tulungagung masih pada tahun kedua dalam penerapan SKS ini jadi yang menggunakan SKS saat ini masih hanya untuk kelas X dan XI untuk Kelas

⁹Trisna DwiAnjarsa,"Sistem SKS Untuk Meningkatkan Prestasi Peserta Didik pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas XI MIA 1 di MAN 1 Tulungagung". *Skripsi*. (Tulungagung: Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, IAIN Tulungagung, 2017).

XII masih menggunakan paket. (3) evaluasi menggunakan standart Kurikulum 2013 yang mencakup nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan. (4) implikasi penerapan SKS antara lain, (a) Bagi siswa yang kecerdasannya diatas rata-rata maka akan cepat lulus, (b) Siswa lebih senang dan lebih enjoy karna sejak daftar sudah disuruh memilih sendiri jurusan yang diinginkan yang sesuai dengan bakat dan minatnya, (c) anak merasa dihargai, karena anak menentukan sendiri beban belajarnya sendiri sesuai dengan bakat minatnya, (d) Hubungan peserta didik dengan dengan pembimbing akademik lebih kuat sejak awal tahun pertama sampai dengan selesai masa studinya, (e) Memotivasi belajar peserta didik lebih tinggi karena hak memilih beban belajar dan mata pelajaran tiap semester.

Sementara itu, Achmad Muhlis, ¹⁶ “Pengembangan Pembelajaran Dengan Sistem Kredit Semester Di MTs Negeri Sumber Bungur Pamekasan”.¹⁰ Dari hasil penelitiannya, terungkap bahwa pengembangan pembelajaran dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan upaya inovatif yang dilakukan oleh MTs Negeri Sumber Bungur Pamekasan, sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pembelajarannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam memberikan layanan pendidikan yang efektif, efisien dan maksimal terhadap kemajemukan peserta didik agar potensinya bisa tereksplorasi dengan baik, maksimal dan cepat, serta memungkinkan bagi peserta didik ²⁰ mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perlakuan ¹⁵ sesuai dengan kapasitas belajar yang dimiliki dan prestasi belajar yang dicapainya secara perseorangan. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang mencoba mengurai secara utuh tentang pengembangan

¹⁰Achmad Muhlis, “Pengembangan Pembelajaran Dengan Sistem Kredit Semester Di Mts Negeri Sumber Bungur Pamekasan”. Dalam *Jurnal Nuansa*, Vol. 14 No. 1 Januari-Juni, (2017).

pembelajaran dengan sistem kredit semester di MTs Negeri Sumber Bungur Pamekasan.

Fitriyanto, “Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 3 Purwokerto”.¹¹ Hasil penelitiannya menunjukkan: (1) Manajemen mutu pendidikan berbasis Sistem Kredit Semester meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. (2) Strategi peningkatan mutu pendidikan berbasis Sistem Kredit Semester meliputi: *School Review*, *Benchmarking*, *Quality Assurance* dan *Quality Control*. (3) Hasil dari manajemen peningkatan mutu pendidikan meliputi: siswa dan orang tua siswa puas, mutu pendidikan meningkat dilihat dari peningkatan pada prestasi akademik dan non akademik siswa. (4) Faktor pendukung meliputi: kepemimpinan yang profesional, iklim pembelajaran yang kondusif, *performance* atau kinerja guru, dorongan belajar tuntas peserta didik,. Selanjutnya faktor penghambatnya meliputi: kerepotan guru, kesulitan peserta didik pindah sekolah, kurang disiplinnya peserta didik.

Maulana Ahsanul Chuluq, “Evaluasi Sistem Kredit Semester (Studi Kasus di MTs.Unggulan Amanatul Ummah Surabaya)”.¹² Berdasarkan hasil penelitiannya perencanaan pelaksanaan program SKS di MTs.Unggulan Amanatul Ummah Surabaya. Pelaksanaan program SKS di mana siswa dapat memilih mata pelajaran di MTs.Unggulan Amanatul Ummah Surabaya sesuai aturan. Evaluasi CIPP (Context, Input, Proses, Produk)

¹¹Fitriyanto, “Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 3 Purwokerto”. *Tesis*. (Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Islam, Konsentrasi Manajemen Kebijakan dan Pendidikan Islam. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

¹²Maulana Ahsanul Chuluq, “Evaluasi Sistem Kredit Semester (Studi Kasus di MTs.Unggulan Amanatul Ummah Surabaya)”. *Skripsi*. (Surabaya: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

dimulai dari konteks dan input sekolah serta proses: perangkat yang dibutuhkan dalam pembelajaran: Silabus, RPP, Sarana Pra Sarana pembelajaran, produk yang dihasilkan: nilai siswa memuaskan siswa memiliki prestasi yang baik serta lolos jenjang selanjutnya.

Sedangkan Arfie Bayu Santosa, “Pendidikan Berbasis Sistem Kredit Semester (SKS) Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Akademik Siswa Kelas SCI (Siswa Cerdas Istimewa) Studi Kasus di SMA Thakassus Al-Qur’an Kalibeber Wonosobo”.¹³ Tesis ini mendeskripsikan bahwa banyak permasalahan di SMA Thakassus Al-Qur’an Wonosobo dalam menerapkan pendidikan berbasis Sistem Kredit Semester (SKS), mulai dari kualitas dan kuantitas guru, input siswa dan sarana prasarana namun masih bisa menghasilkan output yang bagus jika dibandingkan dengan program biasa.

Berdasarkan penelusuran kajian pustaka di atas dapat ditegaskan bahwa penelitian ini bukanlah duplikasi atau plagiat dari penelitian sebelumnya. Memang terdapat penelitian yang berkaitan langsung dengan penerapan SKS di Madrasah Aliyah. Namun sejauh ini belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai implementasi SKS di MAN 3 Palembang serta kaitannya dengan tantangan era revolusi 4.0.

E. Kerangka Teori

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penelitian ini menggunakan teori George C. Edwards III. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan--termasuk kebijakan SKS--dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.¹⁴

¹³ Arfie Bayu Santosa, “Pendidikan Berbasis SKS Dalam Meningkatkan Prestasi Akademik Siswa Kelas SCI (Siswa Cerdas Istimewa) Studi Kasus di SMA Takasus Al-Qur’an Kalibeber Wonosobo”. *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2015)

¹⁴ Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, (London: Jai Press Inc, London England. Goggin, Malcolm L *et al.* 1990), hlm 149-154.

Pada variabel komunikasi bahwa keberhasilan implementasi SKS di MAN 3 Palembang menghadapi era revolusi industri 4.0 mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan tersebut harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), yakni siswa MAN 3 Palembang, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.¹⁵

Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisiian informasi) diperlukan agar implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan.¹⁶

Varibel kedua adalah sumber daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Karena itu, kompetensi implementor dan sumber daya finansial sangat penting. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi SKS di MAN 3 Palembang menghadapi era revolusi industri 4.0 agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: a) Staf; b) Informasi; dan c) Wewenang;¹⁷

¹⁵ *Ibid.* hlm 142

¹⁶ Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 3

¹⁷ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 143

Pada variabel ketiga, ⁸ disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah.¹⁸

Variabel struktur organisasi. Struktur organisasi yang dimaksudkan di sini adalah organisasi MAN 3 Palembang yang bertugas mengimplementasikan kebijakan SKS memiliki pengaruh yang signifikan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.¹⁹

F. Metode Penelitian

Objek penelitian ini dilaksanakan di MAN 3 Palembang. Penelitian ini termasuk dalam kategori *field research*. Metode yang ⁷ digunakan dalam penelitian ini adalah *qualitative research*²⁰ karena data yang

¹⁸Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 154

¹⁹Tabrani Rusyan, *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, tth⁷ hlm. 4

²⁰Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan *setting* fenomena yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang

dikumpulkannya lebih banyak bersifat ⁷ kualitatif dalam arti data bukan dalam bentuk angka baik interval, ordinal maupun data diskrit sekaligus berusaha menggambarkan realitas sebagaimana adanya (realitas aslinya). Sedangkan jenis penelitian ini adalah eksploratif, yakni studi deskriptif analisis²¹ dengan ragam penelitian kasuistis.²² Merujuk pada pemikiran Creswell, pendekatan studi kasus adalah strategi penelitian, yaitu peneliti menyelidiki secara cermat program, peristiwa, aktifitas, proses, atau kelompok.²³

¹⁶ Sumber data dalam penelitian ini, berupa sumber data primer dan data sekunder (penunjang). Data primer diperoleh dari informan atau stakeholder yang terlibat langsung dalam implementasi SKS di MAN 3 Palembang. Dalam konteks ini, sumber data primer adalah Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah bagian Kurikulum, staf pengajar dan siswa MAN 3 Palembang.

⁷ diteliti, dan setiap kejadian merupakan sesuatu yang unik dan berbeda dengan yang lain karena adanya perbedaan konteks. Periksa Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro* (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), hlm 2. Menurut Muhadjir, pendekatan kualitatif dilandasi oleh filsafat fenomenologi sehingga melahirkan beberapa istilah seperti naturalistik oleh Guba, fenomenologi oleh Bogdan dan interaksi simbolik oleh Blumer. Metode ini disebut naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan disebut kualitatif karena pengumpulan datanya bersifat kualitatif. Lihat Imron Arifin, ed., *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan keagamaan* (Malang: Kalimasahada Press, 1996), hlm 4. lihat juga S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), hlm. 24.

²¹Di antara ciri-ciri penelitian kualitatif adalah dilakukan pada latar yang alami sebagai sumber langsung, bersifat deskriptif analisis, lebih mementingkan proses⁷ dari pada hasil produk, bersifat induktif, dan lebih mementingkan esensi. Periksa: Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 9.

²²Ciri khas penelitian kasus adalah [a] Sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar dan dokumen. [b] Sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara⁷ mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai⁷ kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya.. Imron Arifin, ed., *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada Press, 1996), hlm. 57.

²³John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Third Edition), (California: Sage, 2009), hlm. 24

Sumber data sekunder (penunjang) adalah sumber data yang diambil dari literatur dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini, seperti Pedoman penyelenggaraan sistem kredit semester, struktur kurikulum, struktur organisasi, jadwal kegiatan dan lain-lain.

Adapun instrumen pengumpul data dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah *functional and structural prerequisites*, yaitu fungsi yang harus sudah ada sebelum unit dibentuk atau didirikan. Demikian pula *structural prerequisites*, berarti struktur harus ada sebelum suatu unit dibentuk atau didirikan. Sedangkan untuk menjaga keabsahan temuan, peneliti melakukan pengecekan keabsahan temuannya dengan teknik triangulasi.

Menurut Moleong²⁴, teknik triangulasi ini digunakan untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan antar sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan dengan memeriksa derajat keabsahan data temuan dengan membandingkan antar metode yang digunakan, antar sumber data dan antar konteks ketika data diperoleh. Hal ini dilakukan secara terus menerus selama pelaksanaan penelitian di lapangan, baik ketika akan dilaksanakan analisis data dan saat sedang melakukan analisis data itu sendiri. Dari proses ini tidak hanya keabsahan data yang diperoleh, tetapi juga data tambahan atau data yang menjelaskan secara lebih mendalam.

Indikator utama keabsahan data adalah kesesuaian data dengan konsep yang digunakan dalam penelitian dan sekaligus menghubungkannya secara langsung dengan indikator-indikator dari konsep tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan derajat keabsahan masing-masing data sampai ditemukan “titik kejenuhan”. Triangulasi ini menjadi penting, karena

²⁴Lihat Lexy J., Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, (Bandung: Rosda Karya, 1996), hlm. 178.

dari penggunaan teknik ini sekaligus sebagai salah satu teknik untuk mengetahui validitas penelitian kualitatif dan bahkan dengan triangulasi ini dapat meningkatkan reabilitas penelitian ini; sejauh mana temuan dapat direplikasi.²⁵

Asumsinya adalah penelitian kualitatif tidak terdiri atas sebuah realitas tunggal (*single reality*) yang dapat dipelajari ulang dengan menghasilkan kesimpulan yang sama, tetapi sebuah realitas majemuk yang sangat kompleks (*multirealitas*) dan terus berubah. Penelitian kualitatif ini tidak secara eksplisit mensyaratkan reabilitas. Tetapi secara implisit lebih tepat dengan menyebut maksud istilah reabilitas tersebut sebagai kehandalan atau istiqomah (*dependability* atau *consistency*) dengan apa yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dalam penelitian ini.²⁶

Dalam penelitian ini, analisis data berlangsung sejak masa pengumpulan data sampai data ditulis secara deskriptif kualitatif. Data yang sudah dikumpulkan diperiksa (*editing*) untuk melihat ketepatan, kelengkapan dan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya data diberi kode (*coding*) berdasarkan masing-masing hubungan antar data, dan antar data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian dan bahkan dalam hubungan dengan keseluruhan data penelitian. Setelah data dianggap lengkap, selanjutnya dikonsultasi kembali dengan sumber data (*trilingualisasi*), guna memeriksa keabsahan data.

Berdasarkan kerangka berpikir penelitian ini, karakteristik data temuan dan rumusan masalah penelitian ini, selanjutnya ditetapkan klasifikasi dan kategorisasi data dan memasukkan data dalam masing-

²⁵Lihat A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Dunia Pustaka, 2002), hlm. 175-176 dan 186.

²⁶Lihat Jacob Vredenburg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1980).

masing klasifikasi dan kategori yang ditetapkan berdasarkan data itu sendiri. Adapun langkah-langkah analisis adalah menemukan pola atau tema tertentu, sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, mencari hubungan yang logis antara satu fenomena dengan fenomena yang lain baik dalam bentuk hubungan yang identik maupun hubungan yang saling berbeda, sehingga dapat menggambarkan keutuhan dan keseluruhan data (*holistik*), dari keseluruhan langkah dan proses tersebut dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian. Pola analisis, dilakukan dengan pola induktif-deduktif, di mana kesimpulan dibangun berdasarkan data lapangan. Sedangkan dalam pelaporannya dikemukakan secara deduktif-induktif yaitu ditampilkan dulu anggapan atau kesimpulan umum kemudian dilanjutkan pembuktian dengan data temuan yang lebih spesifik atau sering disebut dengan piramida terbalik.

G. Sistematika Pembahasan

Kerangka atau *out line* penelitian ini adalah dibagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut.

Pada bab pertama, pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua membahas landasan teoritis mengenai pengertian dan variabel implementasi kebijakan, implementasi sistem SKS, dan Madrasah Aliyah di Era Revolusi Industri 4.0..

Pada bab ketiga deskripsi umum obyek penelitian, meliputi pembahasan profil singkat MAN 3 Palembang, pedoman akademik MAN 3 Palembang, dan struktur kurikulum.

Pada bab keempat membahas temuan dan analisis hasil penelitian, meliputi implementasi dan kendala penerapan SKS di MAN 3 Palembang menghadapi era revolusi industri 4.0.

Pada bab kelima akan dikemukakan kesimpulan hasil penelitian sebagai penegasan jawaban terhadap fokus permasalahan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian dan Variabel Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.²⁷ Ada juga yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.²⁸ Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.²⁹

Menurut Lane, implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. *Pertama, implementation=F (Intention, Output, Outcome)*. Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. *Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari implementation=F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time)*. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.³⁰

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini

²⁷Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World*, (New Jersey: Princnton University Press, 1980), hlm.7

²⁸Sodra Wibawa, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Intermedia, 1994), hlm. 15

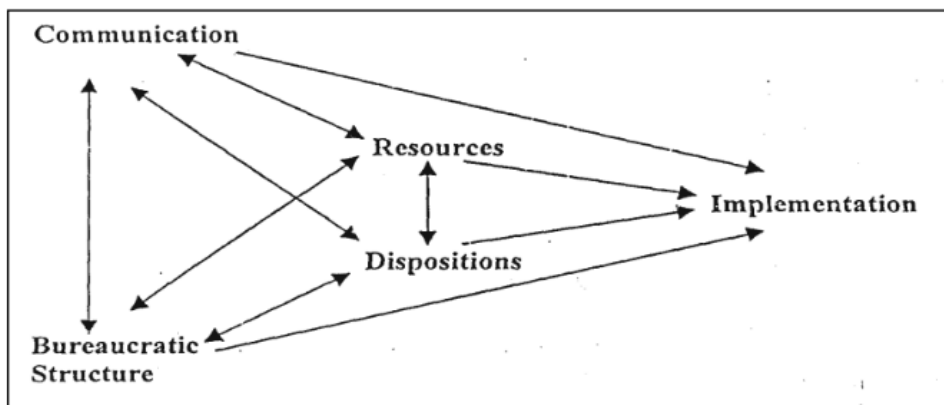
²⁹Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World*, hlm. 7

³⁰Sabatier, Paul, "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research" *Journal of Public Policy* 6, January, (1986), hlm. 21-48.

22

sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn³¹ bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh banyak variabel, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Guna memperkaya pemahaman mengenai variabel yang terlibat di dalam implementasi, maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.³²



Gambar 2.1 : Implementasi kebijakan Edwards III (1980:148)

³¹ Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World*, hlm. 6

³² George C. Edward III, (edited), *Public Policy Implementing*, (London: Jai Press Inc, London England, 1990), hlm 149-154; Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Edisi ke-2 Revisi, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), hlm. 31-34.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini;

10

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.³³

Komunikasi dalam sebuah organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

13

Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu; *pertama*, *transmisi*, adalah

³³ Anwar Arifin, *Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 5

13

penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

Kedua, kejelasan informasi, di mana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Ketiga, konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.³⁴

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting

³⁴Dwi Nurani, "Analisis implementasi Program Bantuan Rasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Jakarta Selatan", *Tesis*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Administrasi, Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Pendidikan, 2009), hlm. 18-21.

8
untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

5
Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.³⁵

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan

³⁵*Ibid.*, hlm. 21.

bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan tidak efisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/ mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.³⁶

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara

³⁶*Ibid*, hlm. 22.

sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.³⁷

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

4. Struktur Birokrasi

⁸ Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Kemudian dalam memperkuat implementasi dengan menerapkan implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Proses tersebut mungkin meliputi perubahan

³⁷*Ibid.*, hlm. 23.

budaya secara menyeluruh, struktur dan atau sistem manajemen dari organisasi secara keseluruhan.³⁸

Selanjutnya, adalah evaluasi dan kontrol mengukur apa yang dapat dihasilkan. Kinerja adalah hasil akhir dari suatu aktivitas. Ukuran apa yang dipilih untuk mengukur kinerja tergantung pada unit organisasi yang akan dinilai dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang telah dibuat terlebih dahulu pada bagian formulasi strategi dari proses manajemen strategik, seperti profitabilitas, pangsa pasar, pengurangan biaya dan sebagainya, harus digunakan semestinya untuk mengukur kinerja perusahaan jika strategi tersebut telah diimplementasikan.³⁹

Evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat atau mengukur tingkat kinerja pelaksanaan suatu kebijakan publik yang latar belakang dan alasannya diambil suatu kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan, berbagai instrumen kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan, responsi kelompok sasaran dan stakeholder lainnya serta konsistensi aparat, dampak yang timbul dan perubahan yang ditimbulkan, perkiraan perkembangan tanpa kehadirannya dan kemajuan yang dicapai kalau kebijakan bisa saja mempersoalkan pada tataran “abstrak” berupa pemikiran, teori, ataupun paradigma yang mendasari suatu kebijakan apabila dipandang perlu.

Oleh karena itu, evaluasi kebijakan publik dibedakan dalam dua macam tipe. *Pertama*, tipe evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*) merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Ukuran keberhasilan kebijakan adalah sejauhmana apa yang

³⁸Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 149

³⁹Mustopadidjaja, AR, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. (Jakarta: LAN, 2002), hlm. 45.

menjadi tujuan program dapat dicapai. *Kedua*, tipe evaluasi proses (*process of public policy implementation*) merupakan riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk yang telah ditetapkan. Bahkan dalam pandangan Mustopadijaj⁴⁰ ditegaskan bahwa evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada tahap pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Lebih jauh, Weiss mengatakan evaluasi kebijakan publik mengandung beberapa unsur penting, yaitu; 1). Untuk mengukur dampak (*measure the effects*) dengan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan. 2). Dampak (*effects*) tadi menekankan pada suatu hasil (*outcomes*) dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan-aturan atau standar. 3). Perbandingan antara dampak (*effects*) dengan tujuan (*goals*) menekankan pada penggunaan kriteria (*criteria*) yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik. 4). Memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaiki kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial (*the social purpose*) dari evaluasi.⁴¹

Berkaitan dengan kesulitan yang terjadi dalam pengukuran kinerja organisasi publik, Dwiyanto⁴² mengemukakan bahwa kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi pelayanan publik sebagian muncul karena tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya kabur akan tetapi juga bersifat multidimensional. Organisasi publik memiliki

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 45

⁴¹Dwi Nurani, "Analisis implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Jakarta Selatan", hlm. 24.

⁴²Agus Dwiyanto, *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Fisipol UGM, 1995), hlm. 1.

17

stakeholders yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta. Stakeholders dari organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan satu dengan yang lainnya, akibatnya ukuran kinerja organisasi publik dimata para stakeholders juga menjadi berbeda-beda.

Namun ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu;

1. *Produktivitas*. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.
2. *Kualitas Layanan*. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.
3. *Responsivitas*. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. *Responsibilitas*. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
5. *Akuntabilitas*. Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat.⁴³

⁴³ Agus Dwiyanto, *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*, hlm. 2. Lihat juga Charles Levine, H.B. Guy. Peters. Frank, dan J. Thomson. *Public Administration: Challenges, Choices, Consequences*, (London: SCOTT, 1990).

14

Kinerja birokrasi sebenarnya dapat dilihat melalui berbagai dimensi seperti dimensi akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, responsivitas maupun tanggung jawab. Berbagai literatur yang membahas kinerja birokrasi pada dasarnya memiliki kesamaan substansial yakni untuk melihat seberapa jauh tingkat pencapaian hasil yang telah dilakukan oleh birokrasi pelayanan. Kinerja itu merupakan suatu konsep yang disusun dari berbagai indikator yang sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penggunaannya

B. Implementasi Sistem SKS

1. Pengertian Sistem Kredit Semester

Secara filosofis diterapkannya Sistem Kredit Semester atau disingkat dengan SKS atas pertimbangan tuntutan agar penyelenggaraan layanan pembelajaran diterapkan secara adil. Adil yang dimaksudkan di sini adalah bagi siswa yang normal akan mendapatkan layanan pembelajaran regular. Berbeda dengan siswa yang cerdas akan mendapatkan layanan pembelajaran yang sesuai dengan *habitat*-nya. Demikian pula dengan siswa yang *slow learner* (lambat), sehingga dapat maju sesuai dengan kemampuannya.⁴⁴

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penerapan SKS dalam proses pembelajaran ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun demikian, menerapkan pembelajaran sistem SKS membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta aturan yang memadai untuk terselenggaranya SKS ini. Sistem ini mengharuskan semua peserta didik menempuh sistem pembelajaran yang sama dalam proses penuntasan materi ajarnya. Sistem ini menjadi kurang aspiratif ketika dihadapkan pada realitas peserta didik yang memiliki kecerdasan atau

20

⁴⁴Eko Supriyanto, "Model Penguatan Sekolah Madrasah Untuk Melayani Siswa Berkecenderungan Tinggi Melalui Implementasi Pembelajaran Sistem Kredit Semester (SKS)". Dalam *Profetika*, Jurnal Studi Islam, Volume. 17, Nomor. 2, Desember, (2016), hlm. 16

intelligence quotient (IQ) di atas rata-rata maupun terhadap minat dan bakatnya yang berpengaruh terhadap cepat tidaknya proses penyelesaian materi ajar.⁴⁵

Kenyataan peserta didik yang memiliki kecerdasan atau *intelligence quotient* (IQ) di atas rata-rata telah direspon dengan baik dalam amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 12 ayat 1 poin (b): “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya”. Selanjutnya pada poin (f): “Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan”.⁴⁶

Berdasarkan pada undang-undang di atas, maka tidak terjadi ketimpangan pelayanan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa untuk menyelesaikan program studinya tanpa harus terhambat oleh temannya yang lain. Demikian pula peserta didik yang memiliki kelemahan dalam proses percepatan penyelesaian program studinya, tidak akan terpaksa mengikuti pola belajar peserta didik yang memiliki kecerdasan lebih. Karena itu, upaya demikian dapat dikatakan memenuhi pelayanan pendidikan yang adil dan efektif pada semua peserta didik.

Lebih jauh, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada pendidikan dasar dan menengah pasal 1 menyebutkan bahwa;

“Sistem Kredit Semester selanjutnya disebut SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menyepakati

⁴⁵Abdul Majid Sayyid Ahmad Mansur, *Ilm al Lughah al Nafsi* (Riyadh: Jami'ah al Muluk Su'ud, 1982), hlm. 91

⁴⁶Salinan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)

jumlah beban belajar yang diikuti atau strategi belajar setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajarnya. SKS diselenggarakan melalui pengorganisasian pembelajaran bervariasi dan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel. Pengorganisasian pembelajaran bervariasi dilakukan melalui penyediaan unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik. Pengelolaan waktu belajar yang fleksibel dilakukan melalui pengambilan beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Unit pembelajaran utuh disebut juga dengan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM).⁴⁷

Di sini, unit belajar dimaknai sebagai satuan pelajaran terkecil yang disusun berurutan dari yang mudah sampai ke yang sukar. Satuan pelajaran itu merupakan pelabelan penguasaan belajar peserta didik terhadap pengetahuan dan keterampilan yang disusun menjadi unit-unit kegiatan belajar yang melibatkan satuan waktu belajar, misalnya 2x45 menit (90 menit), UKBM tersebut menuat Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) serta strategi pembelajaran individual untuk mencapai ketuntasan beban belajar yang telah ditentukan. Dalam UKBM di samping sebagai pelabelan penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan dan keterampilan diharapkan juga memberikan dampak pengiring terbangunnya karakter yang dibutuhkan dalam kehidupan era industri 4.0 seperti berpikir kritis, bertindak kreatif, bekerjasama, berkomunikasi, dan lain-lain.⁴⁸

Selanjutnya, dalam lampiran IV Permendikbud Nomor 81A menjelaskan bahwa Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan

⁴⁷Kemendikbud dan Kebudayaan, *Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2017), hlm. 5.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 5.

sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada SKS dinyatakan dalam satuan kredit semester. Beban belajar satu SKS meliputi satu jam pembelajaran tatap muka satu jam tugas terstruktur dan satu jam kegiatan mandiri. SKS merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didik²⁰nya menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, dan kemampuan atau kecepatan belajar.⁴⁹

Dalam program pendidikan, pengertian semester dipakai sebagai satuan waktu terkecil untuk menyatakan satu program pendidikan satu jenjang, artinya program pendidikan satu jenjang dari awal sampai akhir dibagi-bagi dalam dalam penyelenggaraan program semester. Oleh sebab itu seorang siswa yang menempuh suatu program pendidikan lengkap satu jenjang harus menjalani program-program semester yang dituntut oleh program pendidikan jenjang tersebut.⁵⁰

Sistem kredit merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan SKS untuk menyatakan beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan. Sistem kredit juga berarti suatu sistem penghargaan terhadap prestasi siswa dalam bidang-bidang pengalaman belajar dalam rangka pemenuhan syarat-syarat program pendidikan yang diikutinya.⁵¹

Demikian pula, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar

⁴⁹Lihat Lampiran IV Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Impelementasi Kurikulum

⁵⁰ Slameto, *Proses Belajar Mengajar Dalam Sistem Kredit Semester*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 254-255.

⁵¹Oemar Hamalik, *Manajemen Belajar di Perguruan Tinggi Pendekatan Sistem Kredit Semester*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), hlm. 35.

dan menengah menyatakan bahwa SKS adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada SKS dinyatakan dalam satuan kredit semester.⁵²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa SKS merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan beban studi siswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan studi siswa, keberhasilan kumulatif bagi studi siswa serta besarnya beban mengajar didalam menyelenggarakan pendidikan. SKS juga merupakan sebuah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester. Sedangkan beban belajar atau SKS meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur.

2. Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan SKS

Berbicara mengenai tujuan penyelenggaraan SKS, secara umum supaya satuan pendidikan dapat menyajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, untuk memberikan peluang kepada peserta didik memilih program pembelajaran menuju pada suatu jenjang profesi tertentu. Sedangkan secara khusus, tujuan penerapan SKS adalah; 1). Untuk memberikan kesempatan kepada para peserta didik yang cakap dan giat belajar, agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu sesingkat mungkin; 2). Memberikan kesempatan kepada peserta didik agar dapat mengambil mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya; 3). Memberikan kemungkinan sistem pendidikan untuk mewujudkan keseimbangan antara *input* dan *output*;

⁵² Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi

4). Mempermudah penyesuaian kurikulum tingkat satuan pendidikan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan 5). Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar peserta didik dapat diselenggarakan dengan baik.⁵³

Merujuk pada tujuan penyelenggaraan SKS di atas, maka penerapan SKS di Madrasah Aliyah (MA) berpijak pada beberapa prinsip pokok, yakni; 1). Peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti pada setiap semester sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 2). Peserta didik yang berkemauan dan berkemampuan tinggi dapat mempersingkat waktu penyelesaian studinya dari periode belajar yang ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajar; 3). Peserta didik didorong untuk memberdayakan dirinya sendiri dalam belajar secara mandiri; 4). Peserta didik memiliki kesempatan untuk memilih kelompok peminatan, lintas minat, dan pendalaman minat, serta mata pelajaran sesuai dengan potensinya; 5). Peserta didik dapat menentukan dan mengatur strategi belajar dengan lebih fleksibel; 6). Sekolah menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih memadai secara teknis dan administratif; 7). Peserta didik dapat pindah ke sekolah lain yang sejenis dan telah menggunakan SKS dan semua kredit yang telah diambil dapat dipindahkan ke sekolah yang baru (transfer kredit); 8). Guru memfasilitasi kebutuhan akademik peserta didik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan 9). Penjadwalan kegiatan pembelajaran diupayakan dapat memenuhi kebutuhan untuk pengembangan potensi peserta didik yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.⁵⁴

⁵³Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, *Implementasi Sistem Kredit Semester pada Sekolah Menengah Kejuruan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2008), hlm. 13

⁵⁴Badan Standar Nasional Pendidikan, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester*, (Jakarta: BSNP, 2010), hlm. 6

Mengacu pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan⁵⁵ terdapat beberapa prinsip khusus dan umum berkaitan dengan penyelenggaraan SKS di sekolah/madrasah. Prinsip khusus yang dimaksud, adalah; *pertama*, setiap peserta didik harus diperlakukan dan dilayani sebagai individu yang unik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan gaya belajar serta kebutuhan ekosistem pendidikan yang mendukung. Implementasi SKS dimaksudkan untuk melayani semua kelompok peserta didik yang termasuk pembelajar cepat, pembelajar normal, dan pembelajar lambat, jadi, bukan hanya untuk peserta didik pembelajar cepat saja.

Kedua, proses belajar dan pembelajaran harus dirancang dan dikembangkan sebagai proses interaktif yang mengorganisasikan pengalaman belajar untuk membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta karakter melalui transformasi pengalaman belajar melalui pembelajaran tatap muka, terstruktur, dan mandiri yang bersifat sistematis dan sistemik.

Ketiga, setiap peserta didik harus difasilitasi demikian rupa agar mampu mencapai ketuntasan belajar dalam setiap mata pelajaran secara optimal sesuai kecepatan belajarnya. Bagi peserta didik termasuk kelompok pembelajar lambat harus dibantu dengan program remediasi yang memadai untuk mengejar penuntasan kompetensi paling tidak sama dengan peserta didik yang normal, dan bagi peserta didik yang termasuk pembelajar cepat harus difasilitasi untuk mempelajari paket belajar berikutnya sehingga dapat menyelesaikan setiap mata pelajaran, dan pada akhirnya seluruh mata pelajaran dalam waktu yang lebih cepat dari waktu yang tersedia secara formal.

⁵⁵Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2017), hlm. 5-7.

Keempat, penilaian hasil belajar peserta didik harus menggunakan penilaian acuan patokan berbasis kompetensi atau tugas otomatis. Artinya penugasan/capaian belajar setiap peserta didik diukur dari penguasaan kompetensi yang dicapai secara individual. Penguasaan kompetensi peserta didik diukur dari kriteria ketuntasan setiap KD masing-masing mata pelajaran pada semester berjalan. Kelulusan setiap peserta didik ditentukan oleh penyelesaian seluruh mata pelajaran secara tuntas dan diakhiri dengan ujian sekolah atau ujian yang bersifat nasional sebagai penilaian sumatif yang dapat diadakan pada setiap semester.

Kelima, bahan belajar dan pembelajaran harus menggunakan paket belajar utama yang ditetapkan oleh pihak berwenang atau oleh satuan pendidikan dan tersedia secara publik di pasaran, yang dapat berbentuk buku teks pelajaran (BTP) atau modul, yang berbentuk kemasan unit-unit pembelajaran utuh individual yang dapat dipelajari secara resmi oleh Kemendikbud atau dikembangkan bahan belajar baru yang bersifat moduler yang sepenuhnya atau sebagian bersifat membelajarkan sendiri. Disamping itu harus dikembangkan Unit Kegiatan Belajar (UKBM) berbasis KD yang digunakan untuk memfasilitasi peserta didik secara bertahap berlanjut mempelajari dan menguasai unit-unit pembelajaran dalam suatu mata pelajaran. Dengan demikian setiap peserta didik dapat belajar untuk menguasai kompetensi sesuai dengan gaya dan kecepatan belajarnya.

Keenam, program pendidikan harus sepenuhnya menggunakan struktur kurikulum 2013 beserta semua perangkat pendukungnya yang relevan dan pengambilan mata pelajaran oleh peserta didik dilakukan secara fleksibel secara individual atau kelompok kecil. Seluruh mata pelajaran yang diwajibkan harus ditempuh oleh setiap peserta didik. Karena itu setiap peserta didik memiliki kuota belajar di sekolah/madrasah sama selama 6

semester, tidak boleh ada pemampatan ke dalam program kurang dari 6 semester. Dalam implementasi SKS proses pendidikan diprogramkan agar setiap peserta didik dapat belajar lebih efisien sehingga lama belajarnya bisa kurang dari 6 semester dengan cara menyelesaikan penguasaan setiap/seluruh mata pelajaran lebih cepat. Bagi peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan seluruh mata pelajaran sesuai waktu belajar yang tersedia (8 semester) harus tetap difasilitasi sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang dipersyaratkan dalam kurikulum.

Ketujuh, guru dan sekolah harus berperan sebagai fasilitator belajar, pengorganisasi belajar, penopang kajian, pembangun karakter, dan sumber belajar. Pada dasarnya setiap guru, sesuai dengan kewenangannya, harus menyelenggarakan pembelajaran klasikal, pembelajaran kelompok kecil, dan pembelajaran individual sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang bervariasi. Jadwal semua pembelajaran diatur sepenuhnya oleh masing-masing satuan pendidikan dengan pimpinan kepala sekolah dan seluruh perangkatnya. Demikian juga untuk pengelolaan sarana dan prasarannya sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing satuan pendidikan dalam kerangka peningkatan mutu berbasis sekolah.

Sedangkan prinsip umum penyelenggaraan SKS adalah harus fleksibel, maksudnya; penyelenggaraan SKS dengan fleksibilitas pilihan mata pelajaran dan waktu penyelesaian masa belajar yang memungkinkan peserta didik menentukan dan mengatur strategi belajar secara mandiri, keunggulan yaitu peserta didik memperoleh kesempatan belajar dan mencapai tingkat kemampuan optimal sesuai bakat, minat, kemampuan, dan kecepatan belajar, maju berkelanjutan yaitu peserta didik dapat langsung mengikuti muatan mata pelajaran, atau program lebih lanjut tanpa

terkendala oleh peserta didik lain, keadilan yaitu peserta didik mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan belajar yang dimiliki secara perorangan, dan relevansi yaitu yang disesuaikan dengan karakteristik jenjang, jenis, dan satuan pendidikan.¹⁵

3. Persyaratan Penyelenggaraan SKS

Dalam menyelenggarakan SKS di Madrasah Aliyah (MA) membutuhkan sumber daya memadai untuk mendukung pengelolaan layanan pendidikan yang fleksibel. Dengan kata lain, perlu adanya sumber daya yang memadai dalam memberikan layanan pendidikan, sehingga mampu mengakomodir keragaman potensi, kebutuhan, dan kecepatan belajar. Oleh karena itu diperlukan kriteria minimal kualifikasi sekolah sesuai dengan acuan delapan standar pada standar pendidikan nasional.

Untuk jenjang pendidikan MA haruslah terakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) agar dapat menyelenggarakan SKS. Penyelenggaraan SKS pada setiap satuan pendidikan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan ketuntasan minimal dalam pencapaian setiap kompetensi. Penyelenggaraan SKS di MA harus didukung persiapan yang mengacu pada pemenuhan delapan standar nasional pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.⁵⁶

Dalam hal struktur kurikulum SKS, maka alokasi waktu yang diperlukan per minggu per satu SKS dapat dijelaskan sebagai berikut; untuk mata pelajaran teori (TMT=Tatap Muka Teori): 1) Bagi peserta didik berarti: a) 45 menit melaksanakan proses pembelajaran tatap muka. b) 45

⁵⁶ Badan Standar Nasional Pendidikan, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester*, (Jakarta: BSNP, 2010), hlm. 7.

menit penugasan terstruktur. c) 45 menit kegiatan mandiri. 2) Bagi guru berarti: a) 45 menit melaksanakan proses pembelajaran tatap muka. b) 45 menit perencanaan dan penilaian hasil belajar. c) 45 menit pengembangan materi pembelajaran; untuk pelajaran praktik sekolah (PS): 1) Bagi peserta didik berarti: a) 90 menit kegiatan praktik di laboratorium atau praktik di bengkel atau studio atau di tempat olah raga di lapangan. b) 45 menit kerja mandiri. 2) Bagi guru berarti: a) 90 menit kegiatan pembelajaran dan penilaian di laboratorium/bengkel/studio. b) 45 menit pengembangan materi dan persiapan mengajar; untuk pelajaran praktik lapangan/Industri (PI): Bagi peserta didik berarti: 1) 180 menit kegiatan praktik lapangan/industri. 2) 45 menit penugasan terstruktur. 3) 45 menit kerja mandiri. Tiap semester peserta didik mempunyai kesempatan memilih mata pelajaran yang akan diambil berdasarkan mata pelajaran yang ditawarkan oleh sekolah. Penawaran mata pelajaran dibagi menjadi tiga yaitu semester gasal, semester genap, dan semester pendek. Mata pelajaran yang akan diambil dikonsultasikan dengan guru pembimbing akademik. Pengurangan mata pelajaran yang sudah diambil atau penambahan mata pelajaran yang diinginkan hanya dapat dilakukan pada saat menambah-mengurangi dalam semester yang sedang berjalan. Program produktif untuk masing-masing kompetensi keahlian dikelompokkan dalam mata pelajaran inti dan mata pelajaran pilihan. Satu tahun akademik dilaksanakan sebanyak 38 minggu.

Satuan pendidikan juga wajib mensosialisasikan penerapan SKS yang akan dilaksanakan kepada *stakeholders*. Sekolah yang telah memutuskan untuk melaksanakan SKS harus melakukannya secara taat azas atau konsisten. Sekolah wajib melaksanakan 1 SKS dalam pengertian yang benar seperti yang dituangkan dalam jadwal pelajaran. Pelaksanaan pembelajaran melalui tatap muka (TM), tugas terstruktur (TT), dan kegiatan

mandiri (KM). Peserta didik didorong untuk belajar secara mandiri. Oleh karena itu program pembelajaran untuk tugas terstruktur, kegiatan mandiri wajib disusun oleh guru pemangku mata pelajaran. Jumlah SKS maksimal yang dapat diambil oleh peserta didik ditentukan berdasarkan hasil prestasi pada semester sebelumnya.⁵⁷

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya SKS ini akan mampu memberikan layanan pendidikan bagi siswa. Sebab SKS merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan beban studi siswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan studi siswa, keberhasilan kumulatif bagi studi siswa serta besarnya beban mengajar didalam menyelenggarakan pendidikan. SKS juga adalah sebuah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester. Sedangkan beban belajar atau SKS meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur.

C. Madrasah Aliyah di Era Revolusi Industri 4.0

Disrupsi teknologi ternyata telah melahirkan era baru, era revolusi industri 4.0 yang dikenal dengan nama RI 4.0 yang kemudian menjadi wacana terkini dalam inovasi dan otomatisasi di bidang teknologi dan informasi. Revolusi industri 4.0 mulanya digulirkan oleh pemerintah Jerman pada tahun 2011 yang kemudian diimplementasikan melalui peningkatan teknologi sektor manufaktur, penciptaan kerangka kebijakan strategis yang konsisten, serta penetapan prioritas tertentu dalam menghadapi kompetisi global. RI 4.0 juga disebut dengan revolusi digital karena otomatisasi dan

⁵⁷Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, *Implementasi Sistem Kredit Semester pada Sekolah Menengah Kejuruan*, hlm. 15-17.

1 konektivitas telah mempengaruhi pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. Efek dari revolusi industri berdampak otomatisasi mesin, sehingga peran manusia akan sedikit banyak tergantikan dengan program kecerdasan buatan (*artificial intelligent*).

Di era RI 4.0 ini 1 terdapat tiga faktor yang saling terkait, sebagaimana diungkapkan Zesulka,⁵⁸ yaitu; 1) digitalisasi dan interaksi ekonomi dengan teknik sederhana menuju jaringan ekonomi dengan teknik kompleks; 2) digitalisasi produk dan layanan; dan 3) model pasar baru. lebih jauh, Baur dan Wee⁵⁹ memetakan industri 4.0 dengan istilah “kompas digital” sebagai berikut;



1 Gambar 2.2. Level industri 4.0 (Sumber: Baur & Wee, 2015)

⁵⁸Lihat Muhammad Yahya, “Era Industri 4.0: Tantangan dan Peluang Pengembangan Pendidikan Kejuruan Indonesia”. Orasi Ilmiah Professor bidang Ilmu Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Makassar, 14 Maret, (2018), hlm. 4.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 4-5.

Bila dilihat gambar 2.1 di atas dapat ditegaskan bahwa ¹ instrumen bagi perusahaan dalam mengimplementasikan industri 4.0 agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada gambar 2.1, komponen tenaga kerja (*labor*), harus memenuhi; 1) kolaborasi manusia dengan robot; 2) kontrol dan kendali jarak jauh; 3) manajemen kinerja digital; dan 4) otomasi pengetahuan kerja. Demikian pula pada komponen lainnya digunakan sebagai instrumen implementasi industri 4.0.

Jadi, era RI 4.0 telah membawa dampak yang tidak sederhana. Ia berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk dalam hal ini adalah pendidikan. Era ini ditandai dengan semakin sentralnya peran teknologi *cyber* dalam kehidupan manusia. Maka tak heran jika dalam dunia pendidikan muncul istilah “Pendidikan 4.0”.⁶⁰

Pendidikan 4.0 (*Education 4.0*) adalah istilah umum digunakan oleh para ahli pendidikan untuk menggambarkan berbagai cara untuk mengintegrasikan teknologi *cyber* baik secara fisik maupun tidak ke dalam pembelajaran. Ini adalah lompatan dari pendidikan 3.0 yang menurut Jeff Borden mencakup pertemuan ilmu saraf, psikologi kognitif, dan teknologi pendidikan. Pendidikan 4.0 adalah fenomena yang merespons kebutuhan munculnya revolusi industri keempat dimana manusia dan mesin diselaraskan untuk mendapatkan solusi, memecahkan masalah dan tentu saja menemukan kemungkinan inovasi baru.⁶¹

Pendidikan Islam di RI4.0 perlu untuk turut mendisrupsi diri jika ingin memperkuat eksistensinya. Mendisrupsi diri berarti menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta berorientasi pada masa

⁶⁰ Sigit Priatmoko, “Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam Di Era 4.0”. Dalam *Jurnal Pendidikan Islam, Ta’lim*, Vol.1 No.2 Juli (2018), hlm. 3

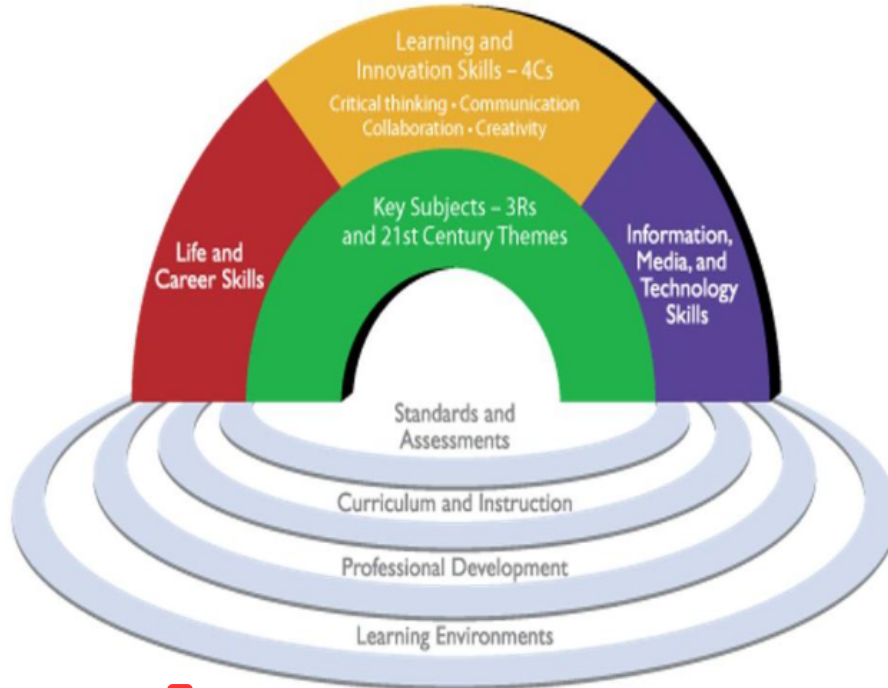
⁶¹Lihat Eduaksi, *Pendidikan 4.0, Apa Itu?*, <https://eduaksi.com/pendidikan-4-0-apa/>. Diakses 04 Februari 2020.

depan. Muhadjir Efendy dalam pidatonya mengatakan bahwa perlu ada reformasi sekolah, peningkatan kapasitas, dan profesionalisme guru, kurikulum yang dinamis, sarana dan prasarana yang andal, serta teknologi pembelajaran yang muktakhir agar dunia pendidikan nasional dapat menyesuaikan diri dengan dinamika zaman.⁶²

Muatan pembelajaran di era RI4.0 harus selalu menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Muatan pembelajaran diharapkan mampu memenuhi keterampilan RI4.0 adalah; 1) pembelajaran dan keterampilan inovasi meliputi penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang beraneka ragam, pembelajaran dan inovasi, berpikir kritis dan penyelesaian masalah, komunikasi dan kolaborasi, dan kreatifitas dan inovasi; 2) keterampilan literasi digital meliputi literasi informasi, literasi media, dan literasi ICT; dan 3) karir dan kecakapan hidup meliputi fleksibilitas dan adaptabilitas, inisiatif, interaksi sosial dan budaya, produktifitas dan akuntabilitas, dan kepemimpinan dan tanggung jawab,⁶³ sebagaimana digambar seperti dibawah ini;

⁶²Lihat Febrianto Adi Saputro, "Mendikbud Ungkap Cara Hadapi Revolusi 4.0 di Pendidikan". Dalam <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/18/05/02/p8388c430-mendikbud-ungkap-cara-hadapi-revolusi-40-di-pendidikan>. Diakses 5 April 2020..

⁶³B. Trilling & C. Fadel, *21st-Century Skills: Learning for Life in Our Times*, (US: Jossey-Bass A Wiley Imprint, 2009).



Gambar 2.3. ¹ *Core Subject 21st Century Skills* (Trilling dan Fadel, 2009)

Dari gambar di atas, ¹ elemen yang berinteraksi dalam *chronosystem* harus mengintegrasikan fokus dari era RI4.0, yang meliputi; ¹ fisik, digital, dan biologikal. Elemen yang ada dalam pendidikan sebagai bagian dari *chronosystem* harus menguatkan gerakan literasi baru (literasi ¹ digital, literasi teknologi, dan literasi manusia). Penguatan itu dilakukan untuk memberikan nilai tambah dan daya saing lulusan lembaga pendidikan di era industri 4.0. Interaksi dan integrasi antar elemen dengan muatan industri 4.0 dapat dilihat pada gambar 2.3.



Gambar 2.4. *Chronosystem* Pendidikan Kejuruan Era Industri 4.0

1
 Gambar 2.4 di atas menunjukkan adanya integrasi seluruh komponen seharusnya dapat dimediasi oleh sistem pendidikan kejuruan karena pada dasarnya pendidikan kejuruan memiliki kepentingan sangat besar untuk memediasi seluruh elemen untuk meningkatkan kualitas sistem pembelajaran, kualitas sistem pendidikan, kualitas peserta didik, dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan demi menciptakan lulusan yang berdaya saing di era industri 4.0.

Dalam kondisi demikian, Madrasah Aliyah sebagai satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah harus merubah

paradigma pembelajaran yang tidak lagi berpusat pada guru (*teacher centered*), namun lebih berpusat pada peserta didik (*student centered*). Bahkan M. Nur Kholis Setiawan mengatakan setidaknya terdapat dua tantangan berat pendidikan madrasah. *Pertama*, tantangan dalam menghadapi di arus perubahan teknologi dan industri 4.0 dan *kedua* tantangan tentang moderasi beragama. Dalam menjawab tantangan tersebut diharapkan madrasah mampu menjawab dua tantangan tersebut melalui tiga unsur penting, yakni aktor (para guru, tenaga kependidikan, *stakeholder*), lingkungan dan fasilitas.⁶⁴

Sementara itu, Nur Syam mengatakan bahwa tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks pada masa sekarang ini berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) seperti robot.⁶⁵ Seiring dengan perkembangan digitalisasi pada semua lini kehidupan termasuk dalam lingkup pendidikan, kompetensi guru tidak cukup bila hanya mengaplikasikan proses belajar atau mengajar dengan menggunakan metode tradisional. Guru ke depan dituntut meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya menyesuaikan perkembangan teknologi yang canggih.

Teknologi *artificial intelligence* (AI) tidak untuk dilawan atau dihilangkan, tetapi kita mencari hal unik yang tidak dimiliki dalam kemampuan kecerdasan buatan tersebut. Salah satunya tentang pemahaman nilai-nilai religius yang tidak ada pada *artificial intelligence* (AI). Seharusnya pendidikan dibangun dan ditanamkan kepada siswa didik sekarang adalah mengenai pendidikan karakter sehingga menjadi *religious values*. Madrasah Aliyah harus mengajarkan nilai-nilai dalam membangun tim working, menghindari individualisas dan nilai *care to the other*.

⁶⁴ Lihat <https://kemenag.go.id/berita/read/>. Diakses 6 April 2020.

⁶⁵ Lihat <https://kemenag.go.id/berita/read/508674/nur-syam-ingatkan-pendidikan-islam-tantang-an-eraindustri-4-0>. Diakses 6 April 2020.

Pendidikan di Madrasah Aliyah hendaknya menyadarkan peserta didik akan kepedulian dengan yang lain, sehingga terbentuknya aspek *social intelligence* sebagai kemampuan untuk secara efektif menavigasi dalam interaksi dan lingkungan sosial.⁶⁶

Dengan demikian ada sisi kosong dalam pendidikan di era RI4.0 yaitu nilai-nilai kemanusiaan (*human values*). Nilai-nilai inilah yang harus diambilalih oleh Madrasah Aliyah dengan terus berupaya mencari strategi yang efektif agar dapat melahirkan generasi muda yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan humanis, sehingga berkontribusi Madrasah Aliyah dalam perkembangan ilmu pengetahuan-teknologi saat ini. Madrasah Aliyah sebagai pusat pembelajaran memiliki peran konservatif dan sosialisasi ilmu agama khususnya dari kalangan masyarakat ahlu sunnah wal jamaah (sunnah).⁶⁷ Madrasah Aliyah berperan penting dalam proses transmisi ilmu dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses pendidikan di Madrasah Aliyah yang memadukan kehidupan akademik dengan kehidupan sosial dengan bekal pendidikan agama yang lebih dari pendidikan umum dari orang yang tinggal di lingkungannya. Hal ini menjadi nilai lebih di mana Madrasah Aliyah tidak hanya menawarkan peserta didiknya memiliki kematangan intelektual semata, melainkan juga memiliki kematangan mental dan spiritual. Pendidikan di Madrasah Aliyah secara intensif dibekali dengan pendidikan keagamaan baik secara teori maupun praktik, sehingga Madrasah Aliyah dapat menjadi alternatif pendidikan ditengah runtuhnya nilai dan norma agama yang terjadi di masyarakat.

⁶⁶Lihat <https://kemenag.go.id/berita/read/508674/nur-syam-ingatkan-pendidikan-islam-tantangan-era-industri-4-0>. Diakses 6 April 2020

⁶⁷Faridah Alawiyah, "Islamic School Education in Indonesia". Dalam *Jurnal Aspirasi*, Vol. 5 No. 1, Juni (2014), hlm. 54

Pada gilirannya, sosok yang diharapkan mampu menghadapi era RI4.0 memiliki berbagai kecerdasan di dalam dirinya, baik itu kecerdasan fisik, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Dengan demikian, jelaslah bahwa manusia “cerdas, kreatif, dan beradab” adalah sosok yang sangat dibutuhkan pendidikan Islam, termasuk pendidikan Madrasah Aliyah untuk menghadapi globalisasi informasi saat ini.⁶⁸ Dalam proses pendidikan ada upaya untuk mengembangkan potensi manusia, baik secara jasmani, rohani maupun akal. Pada hakikatnya, keseluruhan potensi manusia yang dikembangkan dalam pendidikan tersebut bertujuan agar manusia dapat melaksanakan kehidupannya dengan baik, bermanfaat bagi dirinya, bagi agamanya, masyarakatnya dan juga bagi negaranya.

⁶⁸ Syamsul Ma'arif, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu 2007), hlm. 123

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat MAN 3 Palembang

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Palembang beralamat di Jalan Inspektur Marzuki Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan Siring Agung Palembang adalah salah satu madrasah di kota Palembang, Sumatera Selatan. MAN 3 Palembang terletak di Lintang;-2.962755756556198, Bujur; 104.72524166107178, dan ketinggian 17 dari permukaan laut. MAN 3 Palembang sebagai salah satu madrasah top di Sumatera Selatan dan bahkan tingkat nasional saat telah terakreditasi A.⁶⁹

Dilihat dari aspek sejarah berdirinya MAN 3 Palembang, pada mulanya adalah sebuah lembaga pendidikan kejuruan bidang keguruan, yaitu Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN 6 tahun/PGAN 3 tahun). Tetapi sejak tahun 1991, PGAN dialihfungsikan menjadi Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang. Hal ini berdasarkan regulasi penunjang MAN 3 Palembang, berupaya Surat Keputusan (SK) Menteri Agama RI Nomor 42 tahun 1992 tertanggal 27 Januari 1992, PGAN Palembang dialihfungsikan menjadi Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang. Kemudian, pada tahun 1997 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor F/248.K/1997 bahwa MAN 3 Palembang terpilih sebagai salah satu Madrasah Aliyah di 26 Provinsi yang menyelenggarakan keterampilan Las Listrik, Tata Busana dan Elektro.⁷⁰

Selanjutnya pada tahun 1998 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.

⁶⁹Dikutip dari lama <https://man3plg.sch.id/website/>. Diakses 1 April 2020. Pukul 19.00 WIB

⁷⁰*Ibid.*,

00.6/KEP/17.A/ 1998 tertanggal 20 Februari 1998 tentang Penunjukan MAN 3 Palembang sebagai salah satu MAN Model di Indonesia. Sertifikat Akreditasi dari Departemen Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: C.Kw.06/08/MA/005/2006 tertanggal 20 Maret 2006 untuk MAN 3 Palembang dengan peringkat A (amat baik).⁷¹

Lebih jauh, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Bidang MAPENDA ISLAM Kantor Wilayah departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor KW.06.04/4/PP.03.2/035/2008 tertanggal 1 Februari 2008 tentang Rekomendasi Program Pengembangan Madrasah Aliyah Negeri Bertaraf Internasional bagi MAN 3 Palembang. Kemudian, Surat Keputusan (SK) Kepala Bidang MAPENDA ISLAM Kantor Wilayah departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor KW.06.04/4/PP.03.2/035/2008 tertanggal 13 Maret 2008 tentang Rekomendasi Usulan Anggaran Rintisan Madrasah Bertaraf Internasional bagi MAN 3 Palembang. Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor: Kw.06/4/I/PP.00/ 1752/2008 tertanggal 31 Oktober 2008 tentang perizinan penyelenggaraan Program Akselerasi di MAN 3 Palembang. Surat Rekomendasi Ka Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor: Kw.06.4/4/PP.03.2/039/2008 tertanggal 1 Februari 2008 tentang Usulan Rintisan Madrasah Internasional. Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor: Kw.06.4/1/PP.00/890 A/2009 tertanggal 02 April 2009 tentang Rekomendasi Madrasah Model (unggul) di wilayah Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan. Pada tahun 2010, MAN 3 Palembang mendapat Sertifikat ISO 9001-2008 Nomor: QSC 00810 tertanggal 12

⁷¹Buku *Profil MAN 3 Palembang*, (Palembang: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 3.

Januari 2010 tentang Pernyataan bahwa MAN 3 Palembang telah menerapkan sistem manajemen mutu yang memenuhi standar SNI ISO 9001:2008. Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 007534 tertanggal 16 November 2010 untuk MAN 3 Palembang dengan peringkat A+ (amat baik).⁷²

B. Visi, Misi, dan Tujuan MAN 3 Palembang

Sebuah lembaga pendidikan sudah seharusnya berusaha menciptakan *image* (citra) positif di hati masyarakat, sehingga masyarakat mampu membuat keputusan untuk mendaftarkan putra-putri mereka dan turut berpartisipasi aktif dalam pengembangan lembaga pendidikan tersebut. Untuk mewujudkan citra positif tersebut, selain melalui peningkatan kualitas juga memerlukan kegiatan hubungan masyarakat yang produktif berdasarkan visi dan misi yang jelas. Selain itu, visi dan misi juga dapat menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan kerja, inovasi, kreativitas dan semangat kerja, sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dan merencanakan serta melaksanakan kegiatan di sebuah lembaga pendidikan. Sebuah lembaga yang semua kinerjanya didasarkan pada visi dan misi yang telah disusun, maka lembaga tersebut akan terarah, terfokus dan terukur termasuk di dalamnya visi dan misi dalam kehumasan. Sebaliknya, lembaga yang tidak didasarkan pada visi dan misi ataupun sudah ada visi dan misi tetapi tidak dipahami oleh anggotanya, maka lembaga tersebut bisa tidak terarah dan tidak berjalan dengan baik.⁷³

⁷² *Ibid.*, hlm 18

⁷³ Sutrimo Purnomo, "Pengembangan Sasaran, Visi dan Misi Hubungan Masyarakat di Lembaga Pendidikan Berbasis Kepuasan Pelanggan". Dalam *Jurnal Kependidikan*, Vol. III No. 2 November, (2015), hlm. 53 dan 55

Dalam pandangan Jones dan Kahaner⁷⁴ yang telah melakukan riset atas pernyataan visi dan misi perusahaan-perusahaan tingkat dunia, visi perusahaan sukses bukan saja berupa konsep dan falsafah, melainkan gagasan yang dipikirkan masak-masak yang membantu mereka memenuhi bahkan melampaui apa yang ingin mereka capai. Memang antara visi dan misi perusahaan berbeda dengan visi dan misi pendidikan, tetapi pada hakikatnya sama sebagai media yang menggambarkan citra (*image*) positif, sehingga membuat masyarakat tertarik.

Mengutip Yusuf Hamdan⁷⁵ telah menghimpun pengertian visi dan misi dari beberapa ahli, di antaranya; Cardani menyebutkan; *“a vision statement pushes the association toward some future goal or achievement”*. Sedangkan misi diartikan sebagai; *“guides current, critical, strategic decision making”*. Abraham mengatakan; *“a mission statement is an enduring statement of purpose for an organization that identifies the scope it operations in product and market terms, and reflects its values and priorities”*. Selanjutnya dikatakan Abraham, misi sebagai sumber arah, sebagai kompas, yang membuat para pekerja, pelanggan, juga pemilik saham mengetahui mengapa mereka berada di situ dan mau menuju ke mana. Sedangkan menurut Stone mengatakan; *mission statement ...are the operational, ethical, and financial guiding lights of companies. They are not simply mottoes or slogans; they articulates the goals, dreams, behavior, culture, and strategies of companies”*.

Dari berbagai pernyataan di atas dapat ditegaskan bahwa visi sebagai suatu pandangan ke depan yang akan menjadi sasaran ataupun tujuan akhir

⁷⁴ Patricia Jones, dan Larry Kahaner, *Misi dan Visi 50 Perusahaan Terkenal di Dunia*. Terj. Anton Asiwiyoto, (Jakarta, Interaksara, 1999), hlm. 6.

⁷⁵ Yusuf Hamdan, “Pernyataan Visi Dan Misi Perguruan Tinggi”. Dalam Jurnal Mimbar, Volume .XVII No. 1 Jauari – Maret, (2001), hlm. 92-93.

dari suatu kegiatan. Jadi sebuah visi adalah suatu pandangan yang sifatnya sangat umum, tetapi mengandung arti yang cukup mendalam, sehingga di dalam membuat suatu uraian harus benar-benar dipikirkan secara filosofis, namun terungkap dalam kata sederhana. Sedangkan misi mengandung makna suatu pesan kemanusiaan yang tinggi dan juga terkandung suatu aktivitas yang mengarah kepada suatu tujuan dari aktivitas tersebut. Dengan kata lain, misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu lembaga pendidikan.

Bagi MAN 3 Palembang sebagai salah satu madrasah di Sumatera Selatan yang telah meraih Sertifikat ISO 9001-2008 dan pada 16 November 2010 telah memperoleh predikat Akreditasi A+ memiliki visi yang jauh ke depan, yaitu; “Berakhlak Mulia, Unggul dan Berprestasi”.⁷⁶ Indikator visi itu adalah; 1). Meningkatnya perilaku sumber daya manusia yang Islami; 2). Terwujudnya lingkungan madrasah yang Islami; 3). Terwujudnya penguasaan bahasa Arab dan Inggris dilingkungan madrasah; 4). Terlaksananya proses belajar mengajar dalam bahasa Arab dan Inggris; 5). Terwujudnya Rencana Induk Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan; 6). Terimplementasinya penguasaan Teknologi komunikasi dan informasi; 7). Meningkatnya prestasi akademik dan non akademik; 8). Meningkatnya pengembangan kurikulum/standar isi; dan 9). Terwujudnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah dan peningkatan mutu kelembagaan.⁷⁷

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban oleh MAN 3 Palembang adalah; (1) Meningkatkan perilaku sumber daya manusia yang Islami; (2) Mewujudkan lingkungan madrasah yang Islami;

⁷⁶ Buku *Profil MAN 3 Palembang*, (Palembang: Kementrian Agama RI, 2019), hlm. 4-5.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 5

(3) Mewujudkan penguasaan bahasa Inggris dan bahasa Arab dilingkungan madrasah; (4) Melaksanakan proses belajar mengajar dalam bahasa Arab dan Inggris; (5) Mewujudkan Rencana Induk Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan; (6) Mengimplementasikan penguasaan ICT; (7) Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik; (8) Meningkatkan pengembangan kurikulum/standar isi; dan (8) Mewujudkan pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah dan peningkatan mutu kelembagaan. Sejalan dengan visi dan misi tersebut, maka slogan misi MAN 3 Palembang adalah BAQA=*Brain, Attitude, Quality, Achievement*. Sedangkan tujuan MAN 3 Palembang adalah menciptakan civitas akademika yang berakhlak mulia, unggul dan berprestasi.⁷⁸

C. Program Pendidikan MAN 3 Palembang

1. Berasrama (*Boarding School*)

Program pendidikan khusus untuk siswa kelas X di asrama MAN 3 melaksanakan konsep pendidikan di Pondok Pesantren (Pondok Pesantren Al-Ihsan MAN 3). Di pondok pesantren (*boarding school*) para siswa MAN 3 Palembang diwajibkan menghafal al-Qur'an. Kegiatan yang rutin dilakukan 2 kali dalam satu minggu ini dilangsungkan sesuai jadwal dari pembina masing-masing. Hapalan yang diwajibkan untuk para santriwan/santriwati dalam satu tahun asrama adalah juz ke- 30 yang nantinya pada akhir tahun ajaran akan di wisuda. Walaupun diwajibkan pada juz 30, tidak sedikit santriwan dan santriwati yang menghafal lebih, bahkan sampai 3 juz. Kegiatan yang berpengaruh positif ini bertujuan untuk melatih para santriwan dan santriwati untuk menjadi hafidz dan hafidzah sedikit demi sedikit.

⁷⁸Dikutip dari lama <https://man3plg.sch.id/website/>. Diakses 1 April 2020. Pukul 19.00 WIB.

Selain tahfiz qur'an, terdapat program yang dilaksanakan selain program reguler (sore-malam) adalah:

- 1) Bahasa Arab
- 2) Ilmu Alat (Barzanji, tahlil, kepengurusan jenazah
- 3) Kesenian hadroh
- 4) Muhadhoroh

2. Pendidikan Reguler

- 1) Program IPA
- 2) Program IPS
- 3) Keagamaan
- 4) SKS
- 5) Cambridge

3. Intra dan Ekstrakurikuler

- 1) OSIS
- 2) Pramuka
- 3) Paskibraka
- 4) Rohis dan Tahfizh Qur'an
- 5) Robotik
- 6) KIR
- 7) Club Olimpiade Matematika
- 8) Club Olimpiade Kimia
- 9) Club Olimpiade Biologi
- 10) Club Olimpiade Fisika
- 11) Club Olimpiade Ekonomi
- 12) Club Olimpiade Geografi
- 13) Club Olahraga Basket

- 14) Club Olahraga Futsal
- 15) Club Olahraga Volly
- 16) Club Olahraga Badminton
- 17) Club Olahraga Tenis Meja
- 18) Club Olahraga Takraw
- 19) Pencak Silat
- 20) Karate
- 21) Tapak Suci
- 22) Sanggar Seni Islam
- 23) Lingkungan Hidup/Adiwiyata
- 24) Grup Band
- 25) Jurnalistik dan Photography
- 26) PMR
- 27) Nasyid Islami
- 28) Drumband
- 29) Dan lainnya.⁷⁹

D. Sarana dan Prasarana MAN 3 Palembang

Lembaga pendidikan adalah sebuah sistem yang terdiri atas beberapa komponen, di antaranya sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal. Hal ini disebabkan sarana dan prasarana merupakan objek vital dalam mendukung sukses dan tercapainya tujuan pendidikan. Di MAN 3 Palembang saat ini setidaknya terdapat 71 sarana dan prasarana yang dapat menunjang sukses dan tercapai tujuan pembelajaran, sebagai berikut;⁸⁰

⁷⁹Buku *Profil MAN 3 Palembang*, (Palembang: Kementrian Agama Agama RI, 2019), hlm. 5.

⁸⁰Dikutip dari laman <https://man3plg.sch.id/website/>. Diakses 1 April 2020. Pukul 19.00 WIB.

Ruang Kepala Madrasah

Kategori: Ruang Pimpinan

Lokasi: Bangunan Gedung Kantor Permanen

Ruang Kepala Tata Usaha

Kategori: Ruang Pimpinan

Lokasi: Bangunan Gedung Kantor Permanen

Ruang Waka Humas

Kategori: Ruang Pimpinan

Lokasi: Bangunan Gedung Kantor Permanen

Ruang Bagian Kepegawaian

Kategori: Ruang Tata Usaha

Lokasi: Bangunan Gedung Kantor Permanen

Ruang Bagian Administrasi Kesiswaan dan Pengajaran

Kategori: Ruang Tata Usaha

Lokasi: Bangunan Gedung Kantor Permanen

Ruang Bagian Umum

Kategori: Ruang Tata Usaha

Lokasi: Bangunan Gedung Kantor Permanen

Ruang Bendahara

Kategori: Ruang Tata Usaha

Lokasi: Bangunan Gedung Kantor Permanen

Ruang Wakil Manajemen Mutu (QMR)

Kategori: Ruang Pimpinan

Lokasi: Bangunan Gedung Kantor Permanen

Ruang Lab Komputer A

Kategori: Laboratorium Komputer

Lokasi: Bangunan Gedung Kantor Permanen

Ruang Lab Komputer B

Kategori: Laboratorium Komputer

Lokasi: Bangunan Gedung Kantor Permanen

Gudang

Kategori: Gudang

Lokasi: Bangunan Gedung Kantor Permanen

Kamar Mandi / WC Ruang Kepala

Kategori: Toilet

Lokasi: Bangunan Gedung Kantor Permanen

Kamar Mandi & WC Ruang Tata Usaha

Kategori: Toilet

Lokasi: Bangunan Gedung Kantor Permanen

Kamar Mandi & WC Umum Pria

Kategori: Toilet

Lokasi: Bangunan Gedung Kantor Permanen

Kamar Mandi & WC Umum Wanita

Kategori: Toilet

Lokasi: Bangunan Gedung Kantor Permanen

Ruang Baca dan Koleksi Perpustakaan

Kategori: Ruang Perpustakaan

Lokasi: Gedung Perpustakaan Permanen

Ruang Kepala Perpustakaan

Kategori: Ruang Perpustakaan

Lokasi: Gedung Perpustakaan Permanen

Kamar Mandi & WC Laki-laki

Kategori: Toilet

Lokasi: Gedung Perpustakaan Permanen

Kamar Mandi & WC Wanita

Kategori: Toilet

Lokasi: Gedung Perpustakaan Permanen

Koperasi Guru & Pegawai "TUNAS" MAN 3 Palembang

Kategori: Ruang Serba Guna

Lokasi: Gedung Perpustakaan Permanen

Ruang Komite MAN 3 Palembang

Kategori: Ruang Serba Guna

Lokasi: Bangunan Gedung Kantor Permanen

Ruang Periksa

Kategori: Ruang UKS

Lokasi: Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (WC Siswi)

Ruang Perawatan

Kategori: Ruang UKS

Lokasi: Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (WC Siswi)

Ruang Pembina UKS

Kategori: Ruang UKS

Lokasi: Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (WC Siswi)

Loket Bank Syariah Mandiri

Kategori: Ruang Serba Guna

Lokasi: Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (WC Siswi)

Ruang Piket

Kategori: Ruang Serba Guna

Lokasi: Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (WC Siswi)

Kamar Mandi & WC

Kategori: Toilet

Lokasi: Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (WC Siswi)

Ruang Kelas 10 IPA 1

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Ruang Kelas 10 IPA 2

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Lantai 1 : Ruang Guru

Kategori: Ruang Guru

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Ruang Kelas 10 IPA 3

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Ruang Kelas 10 IPA 4

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Ruang Kelas10 IPA 5

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Lantai 2 : Ruang Rapat

Kategori: Ruang Serba Guna

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Ruang Kelas 10 IPA 6

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Ruang Kelas 10 IPA 7

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Ruang Kelas 10 IPA 8

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Ruang Kelas 10 IPA 9 CAMBRIDGE

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Ruang Kelas 10 IPS 1

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Ruang Kelas 10 IPS 2

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Ruang Kelas 10 IPS 3

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Ruang Kelas 11 IPA 1

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Ruang Kelas 11 IPA 2

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Ruang Kelas 11 IPA 3

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Ruang Kelas 11 IPA 4

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Ruang Kelas 11 IPA 5

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Ruang Kelas 11 IPA 6

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Ruang Kelas 11 IPA 7

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Ruang Kelas 11 IPS 1

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Ruang Kelas 11 IPS 2

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Ruang Kelas 12 IPA 1

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Ruang Kelas 12 IPA 2

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Ruang Kelas 12 IPA 3

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Ruang Kelas 12 IPA 4

Kategori: Ruang Kelas

Lokasi: Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Kelas)

Lapangan Basket

Kategori: Lapangan

Lokasi: Gedung Tempat Olahraga Lainnya (R.Ganti Tenis Lapangan)

Aula

Kategori: Ruang Serba Guna

Lokasi: Gedung Pertemuan Permanen (Aula Serba Guna)

Ruang Ketua Komite MAN 3 Palembang

Kategori: Ruang Serba Guna

Lokasi: Bangunan Gedung Kantor Permanen

Ruang Praktek Keterampilan elektro

Kategori: Ruang Praktik/Bengkel Kerja

Lokasi: Bengkel/Hanggar Permanen (Ket. Elektronika)

Luas: 96 m²

Ruang praktek keterampilan Las

Kategori: Ruang Praktik/Bengkel Kerja

Lokasi: Bengkel/Hanggar Permanen (Keterampilan Las)

E. Prestasi MAN 3 Palembang

Prestasi merupakan hasil yang telah dicapai, dilakukan, diperoleh atau dikerjakan. Prestasi setiap orang tidak selalu sama dalam berbagai bidang. Misalnya, prestasi dalam bidang kesenian, olahraga, sastra, kepemimpinan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Orang yang berprestasi adalah orang yang mendapatkan keberhasilan atas usahanya. Prestasi bukanlah sesuatu yang datang tanpa usaha keras. Jika kita menyimak kisah-kisah perjalanan hidup orang-orang yang berprestasi, kita akan mendapati bahwa mereka bekerja keras untuk mencapai prestasi tersebut.

Di antara sederet prestasi yang pernah diraih oleh siswa MAN 3 Palembang adalah prestasi berbasis riset. Seperti prestasi yang diraih oleh siswa MAN 3 Palembang berangkat dari kreatifitas. Dua siswa siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) III Palembang berhasil menorehkan gelar juara nasional di ajang Asyifa Reseachers and Inventors Award (ARIA) 2019 kategori penemuan di Subang Jawa Barat. Dua orang siswa MAN 3 tersebut adalah M Agung Kusuma Bangun siswa kelas X MIA 9 MAN 3 Palembang dan Raka Hadiyan siswa kelas XII MIA 1 MAN 3 Palembang. Untuk meraih prestasi itu bukanlah hal yang mudah, sebab hasil karya mereka harus diadu dengan ratusan peserta sebelum kemudian masuk kategori final. Dari 171 paper yang diseleksi secara online tersaring menjadi 6 besar tim peserta yang ikut semi final di Subang Jawa Barat. Dalam final ini peserta mempresentasikan penemuan yang sudah mereka teliti. Mereka mendapat juara dua dan keberhasilan ini tak lepas dari bimbingan para guru dan support dari kepala sekolah serta doa kedua orang tua.⁸¹

Selain itu, prestasi siswa MAN 3 Palembang bidang Robotika tingkat Nasional bahkan Internasional juga sangat membanggakan. Selama tahun 2014 dan 2015 tercatat sudah 4 penghargaan bergengsi diraih, yaitu dua penghargaan di tingkat nasional dan dua penghargaan di tingkat Internasional. Di antara prestasi tingkat nasional diraih November 2015, yaitu juara 3 dalam kompetisi yang di gelar Kementerian Republik Indonesia. Sementara di tingkat Internasional yaitu saat mengikuti kompetisi di Malaysia akhir tahun 2014. Siswa MAN 3 meraih spesial award kategori transporter dan juara tiga kategori *mission challenge*.⁸²

⁸¹Hasan Basri, "Dua Siswa MAN 3 Palembang Juara Nasional Ajang ARIA 2019". Dalam <https://intens.news/dua-siswa-man-3-palembang-juara-nasional-ajang-aria-2019/>. Diakses 2 April 2020. Pukul. 19.30 WIB

⁸²Humas, "Klub Robotik MAN 3 Syuting Program Metro Ekskul". dalam <https://man3plg.sch.id/website/index.php?halm=beritadetail&di=87>. Diakses 6 April 2020. Pukul. 10.00 WIB.

BAB IV

TEMUAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

1. Implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) di MAN 3 Palembang dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0.

a. Latar Belakang Penerapan SKS di MAN 3 Palembang

Sesuai dengan visi dan misi MAN 3 Palembang, maka seluruh jajaran pendidik dan tenaga kependidikan berusaha membentuk jiwa kemandirian peserta didik. Kondisi demikian sangat penting, mengingat secara umum kondisi kemandirian siswa jenjang pendidikan setingkat SMA/MA saat ini cukup memprihatinkan. Di usianya yang masih remaja dan labil, terkadang siswa ragu dan tidak tahu kemana mereka harus melanjutkan studi.

Tidak sedikit siswa yang belum dapat menentukan pilihan karier dan pendidikan di masa depan. Sejumlah siswa merasa yakin memilih jurusan bisnis yang dianggap favorit juga tidak memiliki alasan yang rasional. Mereka umumnya hanya ikut-ikutan berdasarkan *trend* yang terjadi di kalangan remaja. Salah satu penyebabnya adalah pengembangan kemandirian di sekolah maupun keluarga belum optimal. Belum ada iklim yang kondusif dalam membangun kemandirian siswa MA. Madrasah dengan layanan yang dilakukan selama ini belum memberikan alternatif yang dapat dipilih dan diambil keputusan sebagai bentuk pengembangan kemandirian.

Permendikbud Nomor 61 tahun 2014 tentang KTSP,⁸³ dalam rangka meningkatkan mutu dan mencerdaskan kehidupan masyarakat di setiap

⁸³Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*, (Jakarta: Kemdikbud, 2014).

daerah. Terkait dengan pembangunan pendidikan, masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Kurikulum sebagai jantung pendidikan perlu diimplementasikan secara kontekstual untuk merespon kebutuhan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik di masa kini dan masa mendatang. Pendidikan diharapkan dapat mengembangkan potensi peserta didik agar lebih optimal. Sekolah dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik kebutuhan dan potensi peserta didik, masyarakat, dan lingkungannya.

Realitas menunjukkan bahwa peserta didik memiliki karakteristik yang beraneka ragam. Masing-masing memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Dengan mudah kita temukan bahwa kecepatan belajar, potensi belajar, serta minat peserta didik terhadap mata pelajaran tidak sama.⁸⁴ Padahal peserta didik akan lebih sukses jika belajar sesuai dengan potensi dan minatnya. Dengan demikian diperlukan pola penyelenggaraan pendidikan yang dapat secara optimal melayani realitas tersebut.

Berkaitan dengan hal di atas, pola pembelajaran Sistem Kredit Semester (SKS) memberikan kebebasan peserta didik dalam memilih beban belajar dan mata pelajaran dipandang dapat melayani keragaman lebih luas dibanding dengan Sistem Paket. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran dan beban belajar sesuai dengan minat, potensi, dan kebutuhan.⁸⁵ Dengan demikian kondisi belajar diharapkan merupakan upaya sadar yang diawali

⁸⁴Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Renika Cipta, 2003), hlm. 54

⁸⁵Slameto, *Proses Belajar Mengajar Dalam Sistem Kredit Semester (SKS)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 254; Nursyamsudin, *Panduan Pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA Implementasi Kurikulum 2013*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), hlm. 6; Badan Standar Nasional Pendidikan, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester*, (Jakarta: BSNP, 2010), hlm. 6; lihat juga hasil penelitian Achmad Muhlis, "Pengembangan Pembelajaran Dengan Sistem Kredit Semester Di Mts Negeri Sumber Bungur Pamekasan". Dalam *Jurnal Nuansa*, Volume. 14 Nomor. 1 Januari – Juni (2017).

sejak pemilihan beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Kebebasan memilih beban belajar dan mata pelajaran dapat mendorong kesadaran dan motivasi yang tinggi sehingga memungkinkan prestasi belajar tercapai lebih optimal.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3364 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) pada Madrasah Aliyah. Dalam lampiran tersebut dijelaskan tentang kebijakan, konsep, dan prinsip penyelenggaraan SKS pada Madrasah Aliyah. Penjelasan tersebut masih bersifat umum sehingga MA masih banyak mengalami kendala, di antaranya dalam menentukan beban belajar, menyusun struktur kurikulum, memfasilitasi pilihan beban belajar dan mata pelajaran, serta menyusun jadwal pelajaran fleksibel untuk mata pelajaran tertentu.⁸⁶

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Palembang mencoba memfasilitasi keragaman peserta didik dalam hal kecepatan belajar, sehingga memungkinkan mereka menyelesaikan studi dalam waktu yang beragam menjawabnya dengan model pelaksanaan SKS. Sebagai respon nyata atas kebijakan tersebut, MAN 3 Palembang perlu menyusun strategi pengembangan yang tepat sebagai bagian dari pencapaian standar pengelolaan. Bagian penting dari pedoman pengelolaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SKS adalah pedoman dan peraturan akademik yang memberikan gambaran tentang alternatif penyelenggaraan SKS di MAN 3 Palembang.

Pada hakikatnya, SKS merupakan perwujudan dari amanat Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

⁸⁶Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3364 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Madrasah*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag RI, 2015)

Nasional. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak, antara lain: (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; dan (f) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan”.

Penerapan SKS dalam pengelolaan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia merupakan suatu upaya inovatif untuk menambah kekayaan pengelolaan pembelajaran. Selama ini sistem pengelolaan pendidikan hanya menggunakan satu cara, yaitu Sistem Paket. Melalui penerapan SKS dimungkinkan peserta didik dapat menyelesaikan program pendidikan lebih cepat sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Beban belajar pada SKS di MAN 3 Palembang dinyatakan dengan jam pelajaran (JP) dengan beban keseluruhan minimal 306 JP. Beban belajar satu jam pelajaran secara umum terdiri atas 45 menit kegiatan tatap muka dan minimal 60% (sekitar 27 menit) untuk kegiatan penguasaan terstruktur dan tugas mandiri tidak terstruktur. Secara khusus kegiatan satu jam pelajaran tatap muka dalam beban belajar bagi peserta didik yang memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata, durasi satu jam pelajaran dapat dilaksanakan selama 30 menit (Permendikbud 158 tahun 2014 pasal 9).

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penyelenggaraan SKS pada setiap satuan pendidikan dilakukan melalui pengorganisasian pembelajaran bervariasi dilakukan melalui penyediaan unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik dan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel dilakukan melalui

pengambilan beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing.

b. Prinsip Penerapan SKS di MAN 3 Palembang

Penerapan atau penyelenggaraan SKS di MAN 3 Palembang mengacu pada prinsip sebagai berikut:

1. Fleksibel, artinya penyelenggaraan SKS harus memberikan pilihan mata pelajaran dan waktu penyelesaian masa belajar yang memungkinkan peserta didik menentukan dan mengatur strategi belajar secara mandiri.
2. Keunggulan, artinya penyelenggaraan SKS memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan belajar dan mencapai tingkat kemampuan optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar.
3. Maju berkelanjutan, artinya penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didik dapat langsung mengikuti muatan, mata pelajaran atau program lebih lanjut tanpa terkendala oleh peserta didik lain.
4. Keadilan, artinya penyelenggaraan SKS memungkinkan peserta didik mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perlakuan sesuai dengan kapasitas belajar yang dimiliki dan prestasi belajar yang dicapainya secara perseorangan.
5. Peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti pada setiap semester sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
6. Peserta didik yang berkemampuan dan berkemauan tinggi dapat mempersingkat waktu penyelesaian studinya dari periode belajar yang ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajar;

7. Peserta didik didorong untuk memberdayakan dirinya sendiri dalam belajar secara mandiri;
8. Peserta didik dapat menentukan dan mengatur strategi belajar dengan lebih fleksibel;
9. Peserta didik memiliki kesempatan untuk memilih kelompok peminatan, lintas minat, dan pendalaman minat, serta mata pelajaran sesuai dengan potensinya;
10. Peserta didik dapat pindah ke sekolah lain yang sejenis dan telah menggunakan SKS dan semua kredit yang telah diambil dapat dipindahkan ke sekolah yang baru (transfer kredit);
11. Sekolah menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih memadai secara teknis dan administratif;
12. Penjadwalan kegiatan pembelajaran diupayakan dapat memenuhi kebutuhan untuk pengembangan potensi peserta didik yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan;
13. Guru memfasilitasi kebutuhan akademik peserta didik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
14. MAN 3 Palembang menyelenggarakan Sistem Kredit Semester (SKS) karena telah terakreditasi A.⁸⁷

SKS diselenggarakan melalui pengorganisasian pembelajaran bervariasi dan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel. Penyelenggaraan SKS di MAN 3 Palembang merupakan salah satu upaya inovatif dan kreatif dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui layanan yang bervariasi untuk mengakomodasi kemajemukan peserta didik dalam hal minat, kebutuhan, potensi, bakat, dan kecepatan belajarnya.

⁸⁷ Tim Pengembang Kurikulum, *Pedoman dan Peraturan Akademik Sistem Kredit Semester (SKS) di MAN 3 Palembang*, (Palembang, 2019), hlm. 6-7.

Dalam penyelenggaraan SKS di MAN 3 Palembang dirancang mulai dari persiapan fisik dan non fisik dalam memberikan layanan yang bervariasi dan fleksibel. Berbeda dengan sistem paket dengan pola layanan yang seragam, penyelenggara SKS di MAN 3 Palembang disiapkan paradigma terkait keragaman dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan.

Berkaitan dengan pengorganisasian pembelajaran bervariasi dilakukan melalui penyediaan unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik. Variasi pembelajaran normal ditempuh rata-rata enam semester dengan beban rata-rata 42 sampai dengan 46 jam pelajaran per minggu. Variasi pembelajaran lebih cepat dapat diselesaikan dalam waktu empat atau lima semester. Layanan seperti ini ditempuh dengan beban belajar 54 sampai dengan 70 jam pelajaran per minggu.

Pengelolaan waktu belajar yang fleksibel dilakukan melalui pengambilan beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Peserta didik dengan kecepatan belajar dan prestasi tinggi dapat mengambil beban lebih banyak dibanding dengan lainnya. Layanan pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk individu dan/atau kelompok. Layanan individu diberikan kepada peserta individu yang meminta tambahan beban belajar dan mata pelajaran di luar jam pelajaran kelas atau rombongan belajar.

Disebabkan MAN 3 Palembang berasrama (*boarding*), maka layanan yang diberikan sampai malam hari sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Layanan kelompok dapat dilakukan dengan membuat kelompok/kelas tertentu dengan kecepatan dan prestasi/kemampuan yang hampir sama. Pengelompokan dalam kelas secara

bervariasi dapat dilakukan berdasarkan data yang diperoleh pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pada layanan kelompok pola kontinyu, MAN 3 Palembang telah menyusun variasi pembelajaran sesuai dengan kecepatan belajarnya. Struktur kurikulum untuk tahun pembelajaran 2019-2020 ini disusun terdiri atas dua varian, masing-masing: 4 semester dan/atau 6 semester.

Untuk layanan kelompok, MAN 3 Palembang menyusun serial mata pelajaran dengan jumlah 4 seri dan 6 seri. Penyusunan serial mata pelajaran sesuai dengan urutan materi dan kompetensi (KI dan KD) yang tertuang pada standar isi. Keragaman serial dilengkapi dengan silabus dan bahan ajar yang disesuaikan dengan silabus pada Permendikbud RI Nomor 024 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Seluruh unit-unit pembelajaran disusun berdasarkan perhitungan alokasi waktu, yaitu satu semester minimal 18 minggu efektif termasuk dua minggu efektif yang terpakai untuk PTS dan PAS. Karena pola kontinyu yang dipilih dalam penyelenggaraan SKS, maka MAN 3 Palembang tidak memberlakukan *On/Off* pada mata pelajaran tertentu atau semuanya, dengan kata lain setiap mata pelajaran selalu muncul tiap semester. MAN 3 Palembang menyediakan struktur kurikulum dan beban belajar mata pelajaran bervariasi. Program aplikasi menggunakan pengkodean mata pelajaran berbeda untuk kecepatan belajar yang berbeda.

MAN 3 Palembang untuk tahun pembelajaran 2019/2020 ini tegas memilih model penyelenggaraan pendidikan untuk Kurikulum 2013 Revisi dengan SKS karena sistem ini memiliki keunggulan penyelenggaraan antara lain sebagai berikut:

1. Peserta didik dapat terlayani sesuai dengan keragaman bakat, minat, dan kemampuannya;

2. Kemandirian peserta didik terkondisi dengan adanya pengisian KRS (kartu rencana studi) setiap semester pada saat memilih beban belajar dan mata pelajaran;
3. Dapat menyusun strategi lebih efektif dalam menghadapi Ujian Nasional (UN) di semester 6, yaitu dengan cara menyelesaikan semua beban belajar dan mata pelajaran di semester 5. Dengan demikian ujian sekolah (US) sudah terlaksana sampai awal semester 6. Sedangkan di semester dapat difokuskan pada kegiatan *Try Out* persiapan UN dan seleksi perguruan tinggi;
4. Ujian Sekolah dapat dilakukan tiap semester untuk mengurangi beban yang selama ini terpusat di semester 6;
5. Hubungan antara peserta didik dengan pembimbing akademik (PA) lebih kuat sejak awal tahun pertama sampai dengan selesai masa studinya;
6. Tidak ada kenaikan kelas. Kelulusan mata pelajaran dilakukan di akhir semester;
7. Dapat melayani peserta didik tertentu sesuai dengan kecepatan belajarnya dengan tetap memungkinkan hasil belajar tinggi meskipun masa studinya lebih lama; Keunggulan ini memungkinkan peserta didik yang selesai 8 semester (empat tahun) tetap dapat mengikuti seleksi perguruan tinggi jalur SNMPTN (Undangan);
8. Motivasi belajar peserta didik lebih tinggi karena hak memilih beban belajar dan mata pelajaran tiap semester.⁸⁸

MAN 3 Palembang menyitir beberapa kelemahan penyelenggaraan SKS di SMA/MA sebagai bahan kajian dan pertimbangan untuk meminimalisasi, antara lain sebagai berikut:

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 9.

1. Keragaman layanan dianggap menyulitkan karena terbiasa dengan pola yang seragam;
2. Memerlukan dukungan administrasi berbasis TIK yang memadai ;
3. Pengaturan peta jalan (*roadmapp*) pada pola diskontinu dianggap sulit karena harus mengakomodasi distribusi jam mengajar guru. Hal ini untuk memenuhi tuntutan minimal mengajar 24 jam tatap muka;
4. Pemahaman peran dan fungsi pembimbing akademik (PA) yang berbeda dibanding dengan wali kelas. Pelaksanaan layanan PA sampai peserta didik selesai juga dianggap sulit dalam pengadministrasian;
5. Adaptasi terhadap PDSS, terutama pada pola diskontinu (*On/Off*). Satuan pendidikan perlu membuat tabel konversi dari serial pada SKS dengan semester pada sistem paket. Hambatan ini dapat diatasi dengan penyediaan PDSS yang fleksibel dan difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
6. Peraturan daerah dan tradisi harus masuk dan pulang secara bersamaan masih menjadi kendala bagi satuan pendidikan. Peserta didik tertentu yang tidak dapat masuk mulai jam pertama belum bisa dilayani;
7. Pelaksanaan UN tiap semester oleh pemerintah belum terlaksana. Sebagian satuan pendidikan penyelenggaran SKS masih ragu untuk melaksanakan US tiap semester;
8. Sebagian perguruan tinggi masih belum memahami pelaksanaan SKS di SMA/MA.⁸⁹

c. Desain Kurikulum SKS di MAN 3 Palembang

Secara umum desain struktur kurikulum dan beban belajar SKS mengacu pada Permendikbud Nomor 59 tahun 2014, terdiri dari mata

⁸⁹Tim Pengembang Kurikulum, *Pedoman dan Peraturan Akademik Sistem Kredit Semester (SKS) di MAN 3 Palembang*, (Palembang, 2019), hlm. 9-10.

pelajaran kelompok A dan B (Umum) dan kelompok C peminatan. Beban belajar untuk tingkat MA berjumlah 306 jam pelajaran (JP) yang dapat ditempuh secara bervariasi. Dengan demikian MA penyelenggara SKS dapat menyusun struktur kurikulum dan beban belajar tiap semester secara bervariasi. Ada dua pola pembelajaran yang dapat dilakukan, yaitu pola kontinu dan pola diskontinu (*on/off*). Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut;

1. Pola Kontinyu

Pada pola pembelajaran kontinyu setiap mata pelajaran selalu muncul di tiap semester. Dalam hal ini pemilihan beban belajar berlaku ketika peserta didik memilih tambahan jam pelajaran (beban belajar) pada beberapa atau semua mata pelajaran sesuai dengan kemampuan dan pilihannya. Penambahan jam pelajaran berimplikasi pada tambahan unit pembelajaran (konten) dan kegiatan yang diperlukan.

Pada layanan kelompok pola kontinyu, satuan pendidikan dapat menyusun variasi pembelajaran sesuai dengan kecepatan belajarnya. Struktur kurikulum disusun beragam, terdiri atas 6 semester dan 4 semester.

Tabel 4.1:

**Struktur Kurikulum Program SKS dan/atau Reguler 6 Semester MAN
3 Palembang Tahun Ajaran 2019/2020**

N0	MATA PELAJARAN	Kelas	X	X	XI	XI	XII	XII	JUM JAM
		Semester	1	2	3	4	5	6	
	Kelompok A (Wajib)		26	26	24	24	24	24	148
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti								0
	Al-Qu'ran Hadis		2	2	2	2	2	2	12
	Akidah Akhlak		2	2	2	2	2	2	12

	Fiqih	2	2	2	2	2	2	12
	Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2	2	2	2	12
2	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2	2	2	2	12
3	Bahasa Indonesia	4	4	4	4	4	4	24
4	Bahasa Arab	4	4	2	2	2	2	16
5	Matematika	4	4	4	4	4	4	24
6	Sejarah Indonesia	2	2	2	2	2	2	12
7	Bahasa Inggris	2	2	2	2	2	2	12
	Kelompok B (Wajib)	7	7	7	7	7	7	42
7	Seni Budaya	2	2	2	2	2	2	12
8	Pend. Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan	3	3	3	3	3	3	18
9	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2	2	2	2	12
10	...							0
	Kelompok Peminatan IPA/ IPS	12	12	16	16	16	16	88
11	Matematika / Ekonomi	3	3	4	4	4	4	22
12	Biologi / Sosiologi	3	3	4	4	4	4	22
13	Fisika / Geografi	3	3	4	4	4	4	22
14	Kimia / Sejarah	3	3	4	4	4	4	22
	Kelompok Lintas Minat	6	6	4	4	4	4	28
15	Lintas Minat 1	3	3	4	4	4	4	22
16	Lintas Minat 2	3	3					6
	Jumlah	51	51	51	51	51	51	306

Sumber : Tim Pengembang Kurikulum, *Pedoman dan Peraturan Akademik*

Sistem Kredit Semester (SKS) di MAN 3 Palembang, (2019: 11)

Tabel 4.2:
Struktur Kurikulum Program SKS 4 Semester Pola Kontinyu MAN 3
Palembang Tahun Ajaran 2019/2020

NO	MATA PELAJARAN	Kelas					JUM
		Semester	1	2	3	4	JAM
	Kelompok A (Wajib)		36	38	40	34	148
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti						0
	Al-Qu'ran Hadis		4	2	2	4	12
	Akidah Akhlak		4	2	4	2	12
	Fiqih		4	2	2	4	12
	Sejarah Kebudayaan Islam		4	2	2	4	12
2	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan		2	4	2	4	12
3	Bahasa Indonesia		4	8	8	4	24
4	Bahasa Arab		4	4	4	4	16
5	Matematika		4	8	8	4	24
6	Sejarah Indonesia		4	2	4	2	12
7	Bahasa Inggris		2	4	4	2	12
	Kelompok B (Wajib)		14	12	8	8	42
7	Seni Budaya		4	4	2	2	12
8	Pend. Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan		6	4	4	4	18
9	Prakarya dan Kewirausahaan		4	4	2	2	12
10	...						0
	Kelompok Peminatan IPA		24	24	24	16	88
11	Matematika		6	6	6	4	22
12	Biologi		6	6	6	4	22
13	Fisika		6	6	6	4	22
14	Kimia		6	6	6	4	22
	Kelompok Lintas Minat		6	6	8	8	28

15	Lintas Minat 1	3	3	8	8	22
16	Lintas Minat 2	3	3			6
Jumlah		80	80	80	66	306

Sumber : Tim Pengembang Kurikulum, *Pedoman dan Peraturan Akademik Sistem Kredit Semester (SKS) di MAN 3 Palembang*, (2019: 11-12)

2. Pola Diskontinyu

Pada pola pembelajaran diskontinyu, ² mata pelajaran disusun dalam bentuk serial. Untuk mengakomodasi peserta didik yang cepat, maka jumlah serial maksimum adalah 4 (empat) seri. Dengan serial mata pelajaran ini, satuan pendidikan menyusun peta pembelajaran (road map) untuk enam, lima, dan empat semester secara bervariasi. Berikut ini contoh struktur kurikulum dan beban belajar model empat seri tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3:

**Struktur Kurikulum Program SKS 4 Semester Pola Diskontinyu MAN
3 Palembang Tahun Ajaran 2019/2020**

NO	MATA PELAJARAN	Kelas					JUM
		Semester	1	2	3	4	JAM
Kelompok A (Wajib)			34	38	40	36	148
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti						0
	Al-Qu'ran Hadis		2	2	4	4	12
	Akidah Akhlak		2	2	4	4	12
	Fiqih		2	4	2	4	12
	Sejarah Kebudayaan Islam		2	4	2	4	12

2	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	4	4	12
3	Bahasa Indonesia	6	6	6	6	24
4	Bahasa Arab	4	4	4	4	16
5	Matematika	6	6	6	6	24
6	Sejarah Indonesia	4	4	4		12
7	Bahasa Inggris	4	4	4		12
	Kelompok B (Wajib)	10	12	10	10	42
7	Seni Budaya	4	4	2	2	12
8	Pend. Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan	4	4	6	4	18
9	Prakarya dan Kewirausahaan	2	4	2	4	12
10	...					
	Kelompok Peminatan IPA	24	24	24	16	88
11	Matematika	6	6	6	4	22
12	Biologi	6	6	6	4	22
13	Fisika	6	6	6	4	22
14	Kimia	6	6	6	4	22
	Kelompok Lintas Minat	12	6	6	4	28
15	Lintas Minat 1	6	6	6	4	22
16	Lintas Minat 2	6				6
	Jumlah	80	80	80	66	306

Sumber : Tim Pengembang Kurikulum, Pedoman dan Peraturan Akademik Sistem Kredit Semester (SKS) di MAN 3 Palembang, (2019:12)

Struktur kurikulum dengan serial mata pelajaran menjadi acuan untuk merancang peta pembelajaran (*roadmapp*) yang disediakan sebagai pilihan bagi peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar dan strategi

belajarnya. Peserta didik dapat memilih masa studi 4 atau 6 semester sesuai dengan kecepatan belajarnya. Di sisi lain untuk masa studi 6 semester diberikan variasi roadmapp yang disusun untuk mengakomodasi distribusi lebih merata terkait beban mengajar guru 24 jam pelajaran tatap muka.

Memperhatikan struktur kurikulum, baik pola kontinyu maupun diskontinyu di atas, maka dalam satuan pendidikan perlu melakukan beberapa langkah dalam pengelolaan pembelajaran, antara lain; 1) Menetapkan KI-KD serial mata pelajaran bagi sistem diskontinyu, dan pembagian KI- KD pada sistem kontinyu; 2) Menyediakan pilihan peta pembelajaran atau roadmapp yang dapat dipilih oleh peserta didik; 3) Menetapkan kelas atau rombongan belajar berdasarkan variasi kecepatan belajar dan/atau kesamaan pilihan *roadmapp*; 4) Menetapkan guru mata pelajaran yang akan mengajar, pembimbing akademik, dan konselor/BK pada angkatan pertama penyelenggaraan SKS, tahun kedua, dan seterusnya; 5) Menyiapkan perangkat pembelajaran dilengkapi bahan ajar yang disusun dalam satuan unit pembelajaran; dan 6) Menyiapkan peraturan akademik yang mengatur mekanisme pemilihan beban belajar, mekanisme penilain, pelaksanaan semester pendek, serta pengaturan pembelajaran dan penilaian lainnya.

Sedangkan penyusunan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu; *pertama*, pembagian KI-KD pada sistem kontinyu. Lama belajar 6 semester Pembagian KI-KD untuk 6 semester mengacu pada standarisasi Permen Nomor 23 tahun 2016 dan lama belajar 4 semester Pembagian KI-KD untuk 4 semester sama dengan serial mata pelajaran pada sistem diskontinyu.

Kedua, serial mata pelajaran pada sistem diskontinyu. Konsekuensi dari penyusunan serial mata pelajaran adalah merekonstruksi KI dan KD

yang semula tersusun atas tingkatan kelas X, XI, dan XII menjadi KI dan KD yang tersusun menjadi serial mata pelajaran. Penyusunan KI dan KD mempertimbangkan beberapa hal, yaitu; 1). Tingkat perkembangan fisik dan mental peserta didik; 2). Hierarki kompetensi inti dan kompetensi dasar; 3). Kontinuitas materi pelajaran dan antar mata pelajaran; dan 4). Kemudahan dalam keterpakaian. Penyusunan KI dan KD serial mata pelajaran dilakukan dengan cara mengurutkan KD sesuai serial dan beban belajar (SKS).

Berkaitan dengan penetapan rombongan belajar dapat dilakukan pada tahun pertama dilakukan pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). MAN 3 Palembang sebagai penyelenggara SKS perlu memfasilitasi pengisian data elektronik yang memuat riwayat hasil belajar dari nilai raport, data potensi waktu di SMP/MTs, dan data kemampuan lain yang diperlukan untuk membuat klasifikasi kecepatan belajar peserta didik.

Ada beberapa langkah kegiatan penetapan rombongan belajar antara lain; *pertama*, mengelompokkan siswa dengan variasi kecepatan belajar 4 semester dan 6 semester pada peminatan MIPA, IPS, dan Keagamaan. Komposisi jumlah kelas/rombongan belajar umumnya lebih banyak pada kategori 6 semester. Sementara itu kategori 4 semester paling sedikit atau sulit diperoleh. Kriteria pengelompokan berdasarkan nilai di SMP/MTs dan/atau hasil seleksi PPDB. Kriteria pengelompokan berdasarkan nilai akhir (NA: gabungan NS dan NUN) adalah sebagai berikut;

- Nilai (NA) > 3,50 → kategori 4 semester
- Nilai (NA) 3,00 s.d 3,49 → kategori 5 semester
- Nilai (NA) < 3,00 → kategori 6 semester

Kedua, pada pola diskontinyu, hasil pengelompokan berdasarkan kecepatan belajar dilanjutkan pengelompokan berdasarkan pilihan *roadmapp*. *Ketiga*, memberikan nama rombongan belajar dengan kelas A,

B, C, dan seterusnya sebagai kelas mayor (utama). Kelas utama ini dapat berkembang menjadi kelas minor mulai semester dua akibat adanya peluang menambah beban mata pelajaran pada saat pengisian KRS. *Keempat*, menetapkan ruang kelas jika menggunakan sistem belajar kelas tetap. Pada sistem belajar kelas bergerak (*moving classroom*) tidak memiliki ruang kelas tertentu. Sistem *moving class* merupakan sistem pendukung yang mempermudah pelaksanaan SKS tetapi tidak mutlak untuk dilaksanakan.

Untuk tenaga pendidikan, penerapannya mencakup guru mata pelajaran, pembimbing akademik, dan konselor/BK pada tahun pertama sangat berpengaruh pada keberhasilan penyelenggaraan SKS. Pendidik tahun pertama menjadi perintis bagi penyelenggaraan pada tahun berikutnya sehingga menjadi tumpuan keberhasilan. Kriteria penentuan guru mata pelajaran, pembimbing akademik dan konselor/BK antara lain sebagai berikut; a). Memiliki kinerja sangat baik berdasarkan hasil supervisi akademik, penilaian kinerja guru, dan evaluasi responden peserta didik, b). Memiliki keterampilan teknis dan metodologis yang memadai; c). Responsif terhadap inovasi dibidang pendidikan, pengajaran, dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan d). Memiliki sikap baik dan bertanggungjawab.

d. Penyiapan Perangkat Pembelajaran dan Beban Belajar

Di MAN 3 Palembang penyiapan perangkat pembelajaran yang disiapkan mencakup silabus, RPP, dan bahan ajar dalam satuan unit pembelajaran. Penyusunan silabus dapat menggunakan silabus yang diadopsi dari lampiran Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 dengan penyesuaian berdasarkan struktur kurikulum. Pada pola diskontinyu disusun berdasarkan variasi kecepatan belajar, sedangkan pada pola

kontinyu berdasarkan serial mata pelajaran. Penyusunan silabus dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan.

Penyusunan RPP dilakukan oleh guru mata pelajaran di MAN 3 Palembang disesuaikan dengan silabus yang dikembangkan. Penyediaan unit-unit pembelajaran dilakukan oleh satuan pendidikan MAN 3 Palembang berdasarkan struktur kurikulum dan materi pokok serta Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Satuan pendidikan mengkoordinir kegiatan penyusunan unit-unit pembelajaran dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; a). Kegiatan dilakukan oleh guru mata pelajaran dibawah koordinasi wakil bidang akademik; b). Guru mata pelajaran merekap seluruh materi pokok dan alokasi waktu mata pelajaran yang tertuang dalam struktur kurikulum dan beban belajar; c). Satu materi pokok dapat dinyatakan sebagai satu satuan unit pembelajaran yang dinyatakan dengan beban belajar yang harus ditempuh dalam tatap muka beserta tugas terstruktur dan tugas mandiri. Kemudian dilakukan rekapitulasi jumlah unit pembelajaran untuk seluruh seri dan masing-masing ditiap serial mata pelajaran. Beban belajar yang dimaksud dinyatakan dalam satuan jam pelajaran (JP); dan d). Setiap unit pembelajaran dikembangkan menjadi bahan ajar atau modul.

Mekanisme pemilihan beban belajar dan mata pelajar diatur dalam peraturan akademik. Mekanisme tersebut harus mengakomodasi fleksibilitas berdasarkan variasi kebutuhan, kemampuan, dan kecepatan belajar peserta didik. Termasuk pengelolaan waktu belajar yang fleksibel. Pengelolaan waktu belajar yang fleksibel dilakukan melalui pengambilan beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Pengambilan beban belajar

dapat dilakukan dengan mengisi format perencanaan pengambilan beban belajar dalam bentuk Kartu Rencana Studi (KRS) atau kontrak belajar. Peserta didik dapat memilih beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan pilihan yang disediakan oleh satuan pendidikan.

Untuk menyediakan pilihan beban belajar, satuan pendidikan dapat merancang variasi dengan mempertimbangkan: perbedaan kecepatan belajar, perbedaan pilihan peminatan, dan perbedaan pilihan lintas minat. Lebih jauh lagi, variasi pilihan disesuaikan dengan perbedaan pendidikan lanjutan. Pengambilan beban belajar sebagaimana dimaksud menggunakan kriteria prestasi yang dicapai pada satuan pendidikan sebelumnya untuk pengambilan beban belajar pada semester 1, dan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya untuk pengambilan beban belajar pada semester berikutnya.

Bagi siswa MAN 3 Palembang pada semester 2 dan seterusnya dapat mengambil beban belajar berdasarkan IP semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- IP < 2,67 dapat mengambil beban belajar paling banyak 54 jam pelajaran;
- IP 2,67 – 3,39 dapat mengambil beban belajar paling banyak 62 jam pelajaran; dan
- IP 3,40 – 4,00 dapat mengambil beban belajar paling banyak 80 jam pelajaran

Kegiatan tatap muka dalam beban belajar bagi peserta didik yang memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata yang ditunjukkan dengan IP > 3,40 durasi setiap satu jam pelajaran dapat dilaksanakan selama 30 menit.

e. Pengawasan dan Penilaian

Dalam penyelenggaraan SKS di MAN 3 Palembang tidak dilakukan secara sendiri-sendiri. Tetapi difasilitasi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama RI dan untuk tingkat provinsi difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi serta tingkat kabupaten/kota difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Untuk pengawasan dilakukan mulai dari persiapan, pelaksanaan tahun pertama, hingga tahun ke tiga. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui Kabid Penmad menjamin keterlaksanaan penyelenggaraan SKS di MAN 3 Palembang dengan mengeluarkan ijin penyelenggaraan. Ijin penyelenggaraan dikeluarkan setelah pengawas madrasah dan Kabid Penmad melakukan verifikasi persiapan dan pelaksanaan.

Adapun evaluasi dilakukan secara menyeluruh baik MAN 3 Palembang sebagai institusi pendidikan Islam maupun guru sebagai individu pelaksana program. Secara institusional, MAN 3 Palembang pelaksana SKS dapat melakukan evaluasi diri dengan instrumen tertentu dalam pengawasan Kabid Penmad Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Secara individual, guru mata pelajaran yang mengajar di tahun pertama pelaksanaan SKS dapat melaksanakan evaluasi keterlaksanaan dan evaluasi hasil menggunakan instrumen evaluasi. Hasil evaluasi berguna untuk memotret keberhasilan atau kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan untuk dijadikan pertimbangan atau bahan masukan melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Informasi tersebut bermanfaat bagi sekolah penyelenggara dalam menyempurnakan program yang dilakukan pada periode berikutnya. Secara institusional MAN 3 Palembang melaksanakan evaluasi keterlaksanaan dan hasil penyelenggaraan SKS menggunakan

instrument dengan bimbingan dan pengawasan Kabid Penmad Kementerian Agama Provinsi. Hasil evaluasi bermanfaat untuk penyempurnaan dan memperoleh dukungan dari pemerintah melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Evaluasi dilakukan meliputi evaluasi keterlaksanaan, evaluasi kurikulum, evaluasi pengelolaan, evaluasi hasil, dan evaluasi perilaku.

Pada evaluasi keterlaksanaan atau pelaksanaan SKS meliputi; evaluasi kinerja satuan pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap akhir semester, meliputi: tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan; pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler; hasil belajar peserta didik. Hasil evaluasi dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada evaluasi kurikulum meliputi: a. Struktur beban belajar dan struktur kurikulum setiap program, b. Serial mata pelajaran, c. Susunan KI dan KD sesuai dengan serial mata pelajaran, d. Peraturan akademik, e. Mekanisme pemilihan beban belajar, f. Mekanisme penjurusan, g. Menentukan pembimbing akademik, dan h. Melaksanakan penilaian hasil belajar untuk menentukan Indeks Prestasi.

Untuk evaluasi terhadap pengelola dilakukan setahun sekali, mencakup; a. tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, dan tujuan; b. tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan pendidikan; c. tingkat efisiensi dan produktivitas satuan pendidikan; d. tingkat daya saing satuan pendidikan pada tingkat daerah, nasional, regional, dan global.

Evaluasi hasil juga dilakukan melalui analisis hasil belajar peserta didik dalam bentuk hasil tiap mata pelajaran dan perubahan perilaku. Setiap

mata pelajaran memiliki data hasil belajar pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Evaluasi dilakukan setiap semester hingga hasil akhir Ujian Madrasah, UN, dan kelanjutan peserta didik di perguruan tinggi. Sedangkan evaluasi terhadap perilaku dilakukan melalui survey dan pengamatan pada aspek kemandirian, motivasi, dan kepuasan terhadap layanan pembelajaran dan penilaian. Hasil evaluasi menjadi data pendukung bagi penguatan mutu pendidikan melalui pelaksanaan SKS.

Sedangkan penilaian hasil belajar secara umum mengacu pada standar penilaian Kurikulum 2013 revisi, yaitu dilakukan dalam bentuk penilaian autentik (*authentic assessment*) mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian dilakukan secara berimbang dan terus menerus sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan, mencakup;

- *Penilaian sikap* dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman dan jurnal.
- *Penilaian pengetahuan* dapat dilakukan melalui tes (tertulis dan/atau tes lisan), penugasan, dan pengamatan saat diskusi/presentasi.
- *Penilaian keterampilan* dilakukan melalui pengamatan kinerja praktik, penilaian proyek, penilaian produk, menulis, dan penilaian portofolio.

Penilaian kelulusan peserta didik di MAN 3 Palembang yang menyelenggarakan SKS dapat dilakukan pada setiap akhir semester. Peserta didik dinyatakan lulus apabila: 1). Menyelesaikan beban belajar minimal 306 JP yang mencakup minimal 190 JP pada mata pelajaran kelompok A dan B (Umum), dan minimal 116 JP pada mata pelajaran kelompok C (Peminatan), serta memperoleh IPK minimal 2,66; 2). Memperoleh nilai baik pada penilaian sikap; dan 3). Lulus Ujian Madrasah (UM).

Laporan hasil belajar mengacu pada Permendikbud 104 tahun 2014 dan dilengkapi dengan indeks prestasi (IP). IP merupakan gabungan hasil penilaian kompetensi KD dari KI-3 (pengetahuan) dan KI-4 (Keterampilan) dari seluruh mata pelajaran yang diikuti tiap semester. Indeks prestasi menggunakan skala maksimal 4 dengan rumus perhitungan adalah sebagai berikut;

$$IP = \frac{\sum (N_i \times B_i)}{\sum B_i}$$

IP = Indeks Prestasi

N_i = Rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan tiap mata pelajaran

B_i = Beban belajar tiap mata pelajaran (SKS)

f. Peraturan Akademik

Secara umum Peraturan Akademik di MAN 3 Palembang tahun pelajaran 2019/2020 diberlakukan untuk semua peserta didik kelas X, XI dan XII. Untuk beberapa bagian yang diberi tanda khusus lebih ditujukan untuk peserta didik angkatan 2019/2020 yang menggunakan Kurikulum 2013 Revisi untuk Sistem Kredit Semester (SKS).

1) Waktu Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam periode tahun pelajaran. Satu Tahun Pelajaran dibagi menjadi dua semester. Jumlah minggu efektif untuk pelaksanaan proses pembelajaran setiap semesternya rata-rata sebanyak **18 - 20** minggu. Hari efektif pembelajaran dalam satu minggu adalah **6 hari**, yaitu hari **Senin sampai dengan Sabtu**. Jam belajar diatur sebagai berikut :

Senin, Selasa, Rabu, Kamis : Pukul 06.30 s.d. 17.00 WIB

Jum'at : Pukul 06.30 s.d. 14.30 WIB

Sabtu : libur

Selama Bulan Puasa/Ramadhan, Jadwal Pelajaran akan menyesuaikan.

2) Kehadiran Peserta Didik

1. Peserta didik wajib mengikuti proses pembelajaran selama satu tahun pelajaran untuk setiap tingkat.
2. Peserta didik wajib hadir mengikuti proses belajar mengajar minimal 90 persen kehadiran dalam satu semester.
3. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas sesuai karakteristik mata pelajaran dan tuntutan Standar Isi setiap mata pelajaran.
4. Peserta didik yang tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar di kelas dianggap masuk dalam kegiatan belajar mengajar apabila:
 - a. Mengikuti rapat kegiatan kesiswaan (OSIS/ MPK) yang waktunya telah disetujui oleh Kepala Sekolah
 - b. Menghadiri upacara/kegiatan/lomba yang dilengkapi dengan Surat tugas oleh Sekolah
 - c. Mengikuti lomba/pertandingan seni/olahraga dari lembaga resmi dengan dibuktikan surat dari induk organisasinya.

3) Ketidakhadiran Peserta Didik

1. Ketidakhadiran peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran dapat disebabkan karena :
 - a. Sakit
 - b. Izin
 - c. Tanpa Keterangan
2. Peserta didik yang tidak hadir karena izin harus ada surat izin dari orang tua /wali. Surat izin yang diajukan berlaku untuk paling lama 3 hari, apabila siswa mengajukan izin lebih dari 3 hari, maka orang tua/wali harus menemui Pembimbing Akademik Siswa.

3. Peserta didik yang tidak hadir karena sakit maksimal dua hari harus ada surat izin dari orang tua/wali.
4. Peserta didik yang yang tidak hadir karena sakit lebih dari dua hari, harus ada surat izin dari orang tua/wali dilampiri surat keterangan sakit/rawat inap dari dokter atau rumah sakit.

4) Kelulusan

Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Pendidik dengan kriteria:

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
2. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;
3. Lulus ujian sekolah;
4. Lulus UN. Kriteria peserta didik yang dinyatakan lulus ujian nasional secara rinci sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Prosedur Operasi Standar (POS) tentang Ujian Nasional yang berlaku.

5) Peraturan dalam Ulangan dan Ujian

1. Persyaratan Mengikuti Ulangan dan Ujian
 - a. Prosentase minimal kehadiran peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran agar dapat diikutsertakan dalam proses penilaian adalah 90 % dari kehadiran wajib;
 - b. Peserta didik yang tidak diikutsertakan proses penilaian akibat tidak memenuhi kehadiran minimal, dikembalikan kepada orang

tua setelah ada pembinaan/ peringatan kepada orang tua terlebih dahulu;

- c. Peserta didik yang tidak mengikuti proses penilaian secara lengkap tidak diperkenankan mengikuti Ujian Sekolah maupun Ujian Nasional.

2. Ulangan Harian

- a. Diadakan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu KD atau lebih;
- b. Materinya meliputi indikator pada KD yang dinilai atau terbatas pada indikator yang belum dilakukan penilaian pada penilaian proses;
- c. Ketuntasan KD ditandai ketuntasan indikator pada KD yang bersangkutan;
- d. Ulangan Harian dilaksanakan oleh guru masing-masing dan hasilnya wajib disampaikan kepada peserta didik dan diketahui orangtua/wali;
- e. Jumlah ulangan harian dalam satu semester ditentukan oleh guru mata pelajaran dengan memperhatikan jumlah KD dan jam pelajaran tatap muka per minggu;
- f. Nilai ulangan harian terdiri atas: nilai pengetahuan (nilai tes tulis, observasi, dan atau penugasan), nilai ketrampilan (produk, praktik, proyek, portofolio, dan atau tertulis) dan nilai sikap (observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, jurnal);
- g. Peserta didik yang belum mengikuti ulangan harian diberi kesempatan mengikuti ulangan harian susulan di luar jam tatap muka berdasarkan kesepakatan dengan guru mata pelajaran.

3. Penilaian Tengah Semester (PTS)

- a. Pelaksanaan penilaian tengah semester dikoordinir oleh satuan pendidikan.
- b. Cakupan penilaian tengah semester ³ meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh KD pada periode tersebut;
- c. Bentuk soal penilaian tengah semester (nilai pengetahuan) untuk tes tulis adalah bentuk pilihan ganda dan/atau uraian;
- d. Soal penilaian tengah semester setiap mata pelajaran harus satu macam untuk seluruh rombongan belajar setiap tingkat yang merupakan hasil kesepakatan tim MGMP sekolah (bukan dari perorangan guru);
- e. Lembar jawab komputer penilaian tengah semester dikoreksi bagian Administrasi Akademik dan hasilnya diserahkan kepada guru mata pelajaran;
- f. Hasil penilaian tengah semester dari peserta didik yang sudah tuntas diserahkan kepada bagian Administrasi Akademik;
- g. Peserta didik yang belum mengikuti PTS utama diberi kesempatan mengikuti penilaian tengah semester susulan di luar jam tatap muka selambat-lambatnya 1 minggu setelah pelaksanaan penilaian tengah semester utama;
- h. Laporan Hasil Penilaian Tengah Semester akan dicetak oleh administrasi Akademik dalam bentuk Ledger/form sementara sebagai bahan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik.

4. Penilaian Akhir Semester (PAS)

- a. Penilaian ⁶ akhir semester untuk memantau kemajuan belajar peserta didik setelah proses pembelajaran satu semester;
- b. Pelaksanaan penilaian akhir semester dikoordinir oleh satuan pendidikan;

- c. Penilaian akhir semester (nilai pengetahuan) melalui tes tulis dalam bentuk soal pilihan ganda dikoreksi dengan scanner sekolah, sedangkan soal uraian dikoreksi guru mata pelajaran;
 - d. Nilai akhir semester diolah guru mata pelajaran dan hasilnya diserahkan kepada bagian Administrasi Akademik;
 - e. Analisis hasil penilaian akhir semester untuk perbaikan pembelajaran pada semester berikutnya;
 - f. Cakupan penilaian akhir semester adalah indikator pada KD semester yang bersangkutan;
 - g. Soal penilaian akhir semester setiap mata pelajaran harus satu macam setiap tingkat yang merupakan hasil kesepakatan tim MGMP sekolah (bukan dari perorangan guru).
5. Remedial
- a. Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan pada penilaian harian dan penilaian tengah semester harus mengikuti pembelajaran remedial;
 - b. Pembelajaran remedial diberikan setelah dilakukan analisis terhadap hasil penilaian harian dan/atau penilaian tengah semester;
 - c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pembelajaran remedial adalah sebagai berikut:
 - 1) Siswa mengikuti remedial sesuai dengan KD/Indikator yang belum mencapai ketuntasan;
 - 2) Jika remedial dilakukan di luar jam pertemuan pembelajaran yang terjadwalkan dalam PBM, maka waktu pelaksanaan dan bentuk remedial disepakati bersama oleh guru dan peserta didik yang sedapat mungkin tidak mengganggu pelaksanaan jam belajar tatap muka;

- 3) Jika jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari 75%; maka guru akan melakukan remedial pembelajaran yang diikuti oleh semua peserta didik;
 - d. Semua pembelajaran remedial diakhiri dengan ulangan;
 - e. Nilai hasil remedial tidak melebihi nilai ketuntasan.
6. Pengayaan
- a. Peserta didik yang sudah mencapai nilai di atas ketuntasan pada penilaian harian dan penilaian tengah semester, dapat mengikuti pembelajaran pengayaan;
 - b. Pembelajaran pengayaan diberikan setelah dilakukan analisis terhadap hasil penilaian harian dan/atau penilaian tengah semester;
 - c. Pembelajaran pengayaan yang diberikan guru bersamaan dengan pembelajaran remedial bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, guru dapat memberikan pengayaan pembelajaran berupa modul pengayaan dengan kompetensi yang sama tetapi materi memiliki kedalaman yang detail;
 - d. Jika pembelajaran pengayaan adalah tambahan kompetensi/materi melampaui KD yang telah tuntas, maka pelaksanaannya dapat berupa kegiatan terstruktur dan/atau kegiatan mandiri tidak terstruktur;
 - e. Penilaian hasil belajar kegiatan pengayaan berupa portofolio yang dapat dihargai sebagai tambahan nilai;
 - f. Pelaksanaan pengayaan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pendidik dan peserta didik yang difasilitasi oleh pihak sekolah.

6) Mutasi Peserta Didik

a. Mutasi Keluar. Peserta didik dapat disetujui untuk mutasi ke sekolah/madrasah lain dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Orang tua/wali peserta didik mengajukan permohonan mutasi dengan melampirkan “Surat Pernyataan Bersedia Menerima” dari sekolah tujuan dengan rekomendasi Dinas Pendidikan sekolah tujuan;
- 2) Orang tua/wali wajib menyelesaikan segala tanggungan atau administrasi sampai pada bulan terakhir pada saat mengajukan mutasi;
- 3) Peserta didik berhak atas penilaian hingga bulan terakhir pada saat mengajukan mutasi;
- 4) Peserta didik berhak atas Surat Persetujuan Mutasi yang ditujukan ke sekolah tujuan berdasarkan Surat Pernyataan Bersedia Menerima.
- 5) Orang tua dan peserta didik harus memastikan bahwa satuan pendidikan yang dituju juga menyelenggarakan Sistem Kredit Semester. Apabila satuan pendidikan yang dituju tidak menyelenggarakan SKS maka MAN 3 Palembang tidak mempunyai kewajiban administratif terkait dengan perbedaan sistem tersebut.
- 6) Peserta didik yang sudah keluar dari MAN 3 Palembang tidak dapat diterima kembali.

b. Mutasi Masuk. Karena kepentingan tertentu baik pada peserta didik maupun orang tua yang mengharuskan peserta didik mutasi ke MAN 3 Palembang, maka peserta didik dapat disetujui untuk mutasi ke MAN 3 Palembang dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Sekolah masih memiliki kecukupan daya tampung untuk menambah jumlah peserta didik pada jenjang kelas yang dituju;
- 2) Calon peserta didik berasal dari sekolah dengan akreditasi sekurang-kurangnya sama dengan akreditasi MAN 3 Palembang;
- 3) Calon peserta didik berasal dari SMA/MA penyelenggara Sistem Kredit Semester. Apabila sekolah asal bukan penyelenggara SKS maka nilai pada LCK akan dikonversi kedalam SKS;
- 4) Nilai-nilai yang diperoleh dalam LCK calon peserta didik sekurang-kurangnya sama dengan kriteria ketuntasan yang berlaku di MAN 3 Palembang;
- 5) Orang tua/wali mengajukan permohonan mutasi secara tertulis;
- 6) Madrasah berhak mengadakan tes untuk menentukan peserta didik disetujui atau tidak disetujui diterima di MAN 3 Palembang;
- 7) Calon peserta didik yang belum menuntaskan semua KD sesuai dengan tuntutan serial mata pelajaran yang berlaku di MAN 3 Palembang, wajib mengikuti tambahan pembelajaran untuk menuntaskan KD yang belum tuntas tersebut;
- 8) Peserta didik yang diterima mutasi di MAN 3 Palembang wajib membuat pernyataan sanggup menaati Tata Tertib dan Sistem Pembelajaran yang berlaku di MAN 3 Palembang.

7) Penggunaan Fasilitas Belajar

Peserta didik diperkenankan menggunakan fasilitas belajar di sekolah dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh sekolah.

1. Laboratorium

Laboratorium digunakan untuk kegiatan praktikum sesuai dengan mata pelajarannya, yaitu lab. Fisika, lab. Biologi, lab. Kimia,

lab. Komputer, lab. Keagamaan, dan lab. IPS. Apabila sekolah membutuhkan tambahan ruang, maka ruang laboratorium dapat digunakan sebagai kelas belajar. Semua peserta didik mempunyai hak yang sama menggunakan laboratorium sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Penggunaan laboratorium juga untuk keperluan pengembangan, penelitian, dan kegiatan lain bisa dilakukan sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan didampingi oleh laboran atau guru pembimbing.

2. Perpustakaan

Peserta didik berhak memanfaatkan perpustakaan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peserta didik dapat memanfaatkan perpustakaan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.30 WIB.

3. Lapangan Olahraga

Peserta didik dapat memanfaatkan fasilitas olahraga sesuai dengan jadwal pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Penggunaan fasilitas olahraga diluar waktu pembelajaran harus mendapatkan izin dari sekolah.

4. Ruang Kelas Belajar

Peserta didik menggunakan ruang kelas belajar sesuai dengan ketentuan sekolah terkait dengan denah pembagian ruang kelas. Penggunaan ruang kelas belajar beserta fasilitas yang ada di dalamnya harus memperhatikan kebersihan, keamanan dan kedisiplinan. Waktu penggunaan kelas belajar adalah sesuai dengan jam belajar peserta didik yaitu pukul 06.30 s.d. 16.30 WIB. Penggunaan ruang kelas belajar di luar jam tersebut harus mendapatkan ijin dari sekolah.

5. Internet dan Sistem Informasi.

Penggunaan fasilitas internet diperbolehkan dalam rangka penguatan dalam kegiatan pembelajaran dan layanan informasi dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan (guru BK, guru mapel, bagian TU, ICT dan lain-lain).

6. Fasilitas Lain-Lain

Penggunaan fasilitas lain ditentukan dalam Tata Tertib penggunaan yang berlaku untuk masjid, kantin, kamar mandi, tempat parkir, listrik, sound system, dan lain-lain.

8) Layanan Konsultasi dan Konseling

Layanan konsultasi peserta didik oleh ³ guru mata pelajaran merupakan bagian dari program pengembangan diri yang secara khusus dimaksudkan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik agar siap dan mampu belajar secara efektif, mampu mengatasi hambatan dan kesulitan sesuai tuntutan kompetensi yang harus dicapai pada setiap mata pelajaran. Layanan dilaksanakan pada jam pembelajaran maupun di luar jam pembelajaran. Untuk layanan dapat di luar jam sekolah sesuai kesepakatan guru dengan peserta didik dan tetap di lingkungan sekolah. Layanan konsultasi yang bersifat mendesak, dapat melalui telepon dengan kesepakatan guru yang bersangkutan.

Layanan konsultasi ³ peserta didik oleh Pembimbing Akademik dalam keadaan mendesak dilaksanakan setiap saat di dalam jam pelajaran dan di luar jam pelajaran. Pembimbing akademik dan siswa bimbingan secara berkala minimal 2 minggu sekali mengadakan pertemuan Asistensi Pembimbing Akademik yang jadwal pelaksanaannya menyesuaikan dengan kegiatan siswa bimbingan.

Untuk layanan bimbingan konseling diberlakukan untuk seluruh peserta didik mendapatkan layanan bimbingan dari BK sesuai dengan kebutuhan yang dibedakan atas layanan personal dan layanan klasikal. BK secara berkala melakukan analisis kebutuhan konselor bagi peserta didik. Peserta didik yang mempunyai kepentingan-kepentingan khusus dan mendesak, dengan seijin guru dapat meninggalkan pelajaran untuk mendapat layanan bimbingan dari BK. BK menyiapkan jam-jam khusus untuk peserta didik yang akan berkonsultasi dan memerlukan bantuan konselor. Di luar jam efektif pembelajaran, BK menyiapkan layanan bimbingan untuk seluruh peserta didik sampai pukul 13.30 WIB.

Sedangkan jenis layanan akademik, meliputi layanan orientasi, yaitu a). Layanan dalam bentuk kegiatan peserta didik baru (MOS), b). Layanan informasi, yaitu layanan dalam bentuk pemberian informasi secara verbal dan atau non verbal, baik kepada peserta didik maupun orang tua, c). Layanan penguasaan konten, yaitu layanan dalam bentuk kegiatan remedial, pengayaan, pemantapan, try out dan lain-lain, d). layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan dalam bentuk pembagian kelompok atau kelas dan penyaluran potensi, minat dan bakat peserta didik agar mereka berprestasi secara optimal, d). Layanan bimbingan kelompok, yaitu bimbingan secara klasikal dengan materi tentang tehnik membaca cepat, tehnik membuat ringkasan, tehnik menghafal dan lain-lain, dan e). Layanan konseling kelompok, yaitu layanan dalam bentuk diskusi kelompok dimana setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif membahas permasalahan yang telah mereka pilih sehingga setiap anggota kelompok dapat belajar dari pengalaman anggota kelompok lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik setiap tahun mengalami perubahan. Demikian pula kondisi satuan

pendidikan juga mengalami perubahan. Salah satunya adalah mulai tahun pelajaran 2019/2020, pola pembelajaran yang semula berupa sistem paket, maka akan mulai diterapkan dengan pola pembelajaran Sistem Kredit Semester (SKS) yang akan dimulai untuk siswa kelas X. Oleh karena itu semua komponen satuan pendidikan harus mengetahui dan memahami semua hal penting yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan di MAN 3 Palembang.

Penerapan SKS yang didukung K13 merupakan upaya MAN 3 Palembang agar mampu bersaing di era revolusi industri 4.0. Bila ditelaah lebih jauh, K13 secara material berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang diharapkan mampu memenuhi tuntutan masyarakat industri. Hadirnya era revolusi industri 4.0 yang berbasis komputer dan internet telah banyak memberikan perubahan pada bidang pendidikan, mulai dari proses pendaftaran yang dilakukan secara online, pembelajaran secara online, dukungan multimedia interaktif secara online, penilaian secara online, absensi secara online, dan lain sebagainya.

Eksistensi internet juga mendorong pesatnya perkembangan media informasi digital di segala bidang kehidupan. Demikian halnya pada dunia pendidikan, termasuk di dalamnya MAN 3 Palembang. MAN 3 Palembang telah memiliki laman <https://man3plg.sch.id/website/> yang sangat berguna untuk pendaftaran yang dilakukan secara online, pembelajaran secara online, dan dukungan multimedia interaktif secara online. Artinya, MAN 3 Palembang telah menyesuaikan diri dengan menghadirkan layanan informasi, sosialisasi, publikasi, edukasi, bahkan dakwah secara online. Bagi MAN 3 Palembang keberadaan website sebagai layanan informasi online menjadi sebuah kebutuhan vital. Apalagi seperti dikatakan Effendi

Gazali, saat ini diperkirakan sebanyak 158,8 juta atau setara dengan 62% penduduk Indonesia merupakan generasi digital (*digital native*).⁹⁰ MAN 3 Palembang sebagai entitas pendidikan Islam perlu berinovasi dan menyesuaikan diri sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar tidak terdisrupsi.⁹¹

Memang di era revolusi industri 4.0, masih ada sebagian jenjang pendidikan Madrasah Aliyah yang belum memiliki website. Berdasarkan penelitian Edi Irawan bahwa terdapat berbagai penyebab mengapa Madrasah Aliyah belum memiliki website. *Pertama*, memandang bahwa keberadaan website belum menjadi kebutuhan pokok yang mendesak. Mereka selama ini masih mengandalkan media informasi secara konvensional. *Kedua*, mengalami kendala teknis dalam membuat website, termasuk untuk pembelian domain dan hosting. *Ketiga*, belum memiliki operator atau tenaga ahli dibidang teknologi informasi dan komputer. *Keempat*, belum adanya regulasi yang mengharuskan Madrasah Aliyah untuk memiliki website. Kelima, ketidaksadaran bahwa keberadaan website dapat dioptimalkan sebagai sarana informasi, sosialisasi, publikasi, edukasi, dan bahkan dakwah.⁹²

MAN 3 Palembang sebagai bagian dari pusaran era revolusi industri 4.0 perlu dipersiapkan agar lebih eksis bersaing dalam era ini. *Pertama*, kompetensi pendidik. Perbaikan sumberdaya manusia, terutama tenaga pendidik adalah salah satu hal yang harus sangat diperhatikan dalam era

⁹⁰Effendi Gazali, "Pesantren di Antara Generasi Alfa dan Tantangan Dunia Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0". Dalam *Oasis: Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, 22, (2018)

⁹¹S. Priatmoko, "Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam Di Era 4.0". Dalam *Jurnal Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 12, (2018).

⁹²Edi Irawan, "Digitalisasi Madrasah di Era Revolusi Industri 4.0: Refleksi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Ponorogo". Dalam *Jurnal E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Volume 10, Nomor 2, (2019), hlm. 31.

pendidikan 4.0. Perbedaan generasi antara pendidik dan siswa dinilai sebagai faktor utama penyebab ketidakberhasilan pendidikan. Mengapa demikian? Pendidik yang mengajar mayoritas berasal dari generasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan siswa yang lekat dengan alat digitalnya tidak cocok dengan metode pembelajaran yang ditawarkan oleh para pendidik. Penggunaan metode konvensional dalam pembelajaran bagi generasi millennial merupakan sesuatu hal yang tidak menarik. Pendidik harus meng-*upgrade* kompetensi dalam menghadapi era pendidikan 4.0. Peserta didik saat ini sebagai generasi milenial yang tidak asing lagi dengan dunia digital. Peserta didik sudah terbiasa dengan arus informasi dan teknologi industri 4.0. Ini menunjukkan bahwa produk pendidikan yang diluluskan harus mampu menjawab tantangan industri 4.0 mencetak dan menghasilkan generasi-generasi berkualitas yang akan mengisi revolusi industri 4.0. Setidaknya terdapat lima kualifikasi dan kompetensi pendidik yang dibutuhkan di era 4.0. Kelimanya meliputi: a) *Educational competence*, kompetensi mendidik/pembelajaran berbasis *internet of thing* sebagai *basic skill* di era ini; b) *Competence for technological commercialization*, punya kompetensi membawa siswa memiliki sikap *entrepreneurship* (kewirausahaan) dengan teknologi atas hasil karya inovasi siswa; c) *Competence in globalization*, dunia tanpa sekat, tidak gagap terhadap berbagai budaya, kompetensi *hybrid*, yaitu *global competence* dan keunggulan memecahkan problem nasional; d) *Competence in future strategies*, dunia mudah berubah dan berjalan cepat, sehingga punya kompetensi memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di masa depan dan strateginya, dengan cara *jointlecture*, *joint-research*, *joint-resources*, *staff mobility* dan rotasi, paham arah *SDG's*, dan lain sebagainya. e) *Conselor competence*, mengingat ke depan masalah anak bukan pada

kesulitan memahami materi ajar, tapi lebih terkait masalah psikologis, stres akibat tekanan keadaan yang makin kompleks dan berat.⁹³

Kedua, kurikulum dan metode pembelajaran bidang pendidikan perlu merevisi kurikulum dengan menambahkan lima kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam memasuki era revolusi industri 4.0. Menurut Dewi Surani⁹⁴ ada lima kompetensi yang dianggap sebagai modal yang sangat dibutuhkan untuk mampu bersaing dalam era revolusi industri 4.0. Lima kompetensi tersebut adalah: (1) Diharapkan peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis; (2) Diharapkan peserta didik memiliki kreatifitas dan memiliki kemampuan yang inovatif; (3) Perlu adanya kemampuan dan keterampilan berkomunikasi yang dimiliki peserta didik; (4) Bekerjasama dan berkolaborasi; dan (5) Peserta didik memiliki kepercayaan diri.

Ada beberapa hal yang menjadi poin-poin penting dalam transformasi sistem pendidikan yaitu: 1) kurikulum berorientasi pada masa depan, 2) tenaga pengajar profesional, 3) paparan awal di tempat kerja, 4) kesepakatan baru tentang *life long learning*, dan 5) keterbukaan terhadap inovasi pendidikan.⁹⁵ Sementara itu ada beberapa catatan penting untuk dunia pendidikan dalam menyambut revolusi 4.0, seperti dikatakan Ahmad,⁹⁶ yaitu:

⁹³Dewi Surani, "Studi Literatur: Peran Teknologi Pendidikan Dalam Pendidikan 4.0". Dalam *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 2, No.1, (2019), hlm. 459

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 459

⁹⁵World Economic Forum, "The Global Competitiveness Report 2017-2018". <https://www.weforum.org/reports/the-global-competitivenessreport-2017-2018>. Diakses 17 Januari 2020

⁹⁶Ahmad, Pendidikan Tinggi "4.0" Yang Mampu Meningkatkan Daya Saing Bangsa. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Makassar, 16 Februari 2018. Bahan Presentasi. Diakses 2 April 2020.

- 1) Proses dan Model Belajar perubahan di dalam era Pendidikan 4.0: Bermain, belajar dan bekerja terjadi di dalam satu waktu yang sama; Berkembangnya gamifikasi, e-commerce, virtual, dan belajar dari dunia maya lainnya; Proses belajar mengajar sekarang bukan hanya sebagai lahan bisnis semata; Belajar menjadi lebih personal dan sosial dengan menggunakan digital dan konten visual.
- 2) Strategi dan teknik belajar harus fokus pada pelajar, memanfaatkan teknologi digital, dan menggunakan pendekatan inovatif;
- 3) Kedua belah pihak, guru dan pelajar harus melek digital/informasi, melek teknologi, termasuk melibatkan peran masyarakat, dan orang tua di dalam pendidikan universal;
- 4) Konten pendidikan yang memenuhi preferensi guru dan siswa harus beragam dan diperkaya dalam lingkungan pendidikan;
- 5) Keterampilan dasar TIK harus diajarkan ditingkat dasar.
- 6) TIK harus memiliki peran dalam memperkuat keterampilan sains, teknologi, permesinan (engineering), dan matematika (STEM);
- 7) Keterampilan sosial tidak dapat digantikan oleh robot/teknologi; toleransi, imajinasi, integritas, kebijaksanaan, kreativitas, semangat;
- 8) Konten baru dibutuhkan oleh peserta didik tanpa mengubah kurikulum atau menambahkan pelajaran baru; pengkodean, e-commerce, realitas virtual, dll. Menyelaraskan dengan pelatihan guru dalam jumlah besar dan banyak;
- 9) Peta jalan pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi harus difokuskan pada transformasi digital sejalan dengan Revolusi Industri 4.0;
- 10) Kesadaran harus dibangun di antara semua pemangku kepentingan tentang peluang baru dalam menciptakan pekerjaan baru selama

Revolusi Industri 4.0; k) Teknologi digital yang masif dan mengganggu harus diatasi dengan internalisasi konsep dan kurikulum yang jelas dan cepat;

- 11) Meningkatkan ekosistem pendidikan melalui pemanfaatan TIK untuk pemangku kepentingan multisektor;
- 12) Kemendikbud harus mengantisipasi terlebih dahulu ledakan data besar terkait data pendidikan. Dalam kondisi saat ini, Kemendikbud telah melakukan pengumpulan, penyimpanan dan menganalisis data transaksi;
- 13) Kesadaran keamanan dalam penggunaan internet harus disampaikan kepada guru dan siswa;
- 14) Selain dari aspek teknologi, manajemen, dan keterampilan, siswa harus dilengkapi dengan keterampilan belajar abad 21. Karakter berdasarkan visi nasional dan global penting dibangun, sesuai dengan Pancasila;
- 15) Pembentukan karakter harus mencakup bagaimana pemuda mengatasi perubahan zaman;
- 16) Membangun karakter harus meningkatkan kebanggaan individu sebagai warga negara Indonesia.
- 17) Paradigma dengan memasukkan nilai-nilai agama, spiritualitas, kearifan lokal, harus diperkuat untuk para pemuda;
- 18) Untuk bersaing secara global, menguasai untuk berbicara dan menulis bahasa asing untuk generasi muda harus diprioritaskan, dan juga memperkuat Bahasa Indonesia adalah suatu keharusan untuk meningkatkan kebanggaan nasional;
- 19) Kesadaran harus dibangun di antara semua pemangku kepentingan tentang peluang baru dalam menciptakan pekerjaan selama Revolusi Industri 4.0;

- 20) Profesionalisme keterampilan TIK harus ditanamkan pada jenjang pendidikan menengah, khususnya pendidikan kejuruan;
- 21) Pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat diotomatisasi oleh TIK, seperti keterampilan komunikasi, harus diidentifikasi dan diajarkan di pendidikan kejuruan.

Selanjutnya menurut Dewi Surani⁹⁷ pendidikan 4.0 dituntut mencetak siswa yang mempunyai kompetensi yang menjawab kebutuhan dalam era industri 4.0. kompetensi yang diminta yaitu;

1. Keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah (*critical thinking and problem solving skill*). Kompetensi ini sangat penting dimiliki peserta didik dalam pembelajaran di era industri 4.0. Guru 4.0 harus mampu meramu pembelajaran sehingga dapat mengeksplor kompetensi ini dari diri peserta didik;
2. Keterampilan komunikasi dan kolaboratif (*communication and collaborative skill*). Sebagai satu kompetensi yang sangat dibutuhkan di era industri 4.0. Keterampilan ini harus mampu dikonstruksi dalam pembelajaran. Model pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi harus diterapkan guru guna mengkonstruksi kompetensi komunikasi dan kolaborasi;
3. Keterampilan berpikir kreatif dan inovasi (*creativity and innovative skill*). Revolusi industri 4.0 mengharuskan peserta didik untuk selalu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Tindakan ini perlu dilakukan agar peserta didik mampu bersaing dan menciptakan lapangan kerja berbasis industri 4.0. Kondisi ini diperlukan mengingat sudah banak korban revolusi industri 4.0. Misalnya, banyak profesi yang tergantikan

⁹⁷Dewi Surani, "Studi Literatur: Peran Teknologi Pendidikan Dalam Pendidikan 4.0", hlm. 461.

oleh mesin digital robot. Contoh, pembayaran jalan tol menggunakan e-toll. Sistem ini telah memaksa pengelola jalan tol untuk memberhentikan tenaga kerja yang selama ini digunakan di setiap pintu tol;

4. Literasi teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology literacy*). Literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi kewajiban bagi guru 4.0. Literasi TIK harus dilakukan agar tidak tertinggal dengan peserta didik. Literasi TIK merupakan dasar yang harus dikuasai guru 4.0 agar mampu menghasilkan peserta didik yang siap bersaing dalam menghadapi revolusi industri 4.0;
5. *Contextual learning skill*. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang sangat sesuai diterapkan guru 4.0. Jika guru sudah menguasai literasi TIK, maka pembelajaran kontekstual era pendidikan 4.0 lebih mudah dilakukan. Kondisi saat ini TIK merupakan salah satu konsep kontekstual yang harus dikenalkan oleh guru. Materi pembelajaran banyak kontekstualnya berbasis TIK sehingga guru 4.0 sangat tidak siap jika tidak memiliki literasi TIK. Materi sulit yang bersifat abstrak mampu disajikan menjadi lebih riil dan kontekstual menggunakan TIK.
6. Literasi informasi dan media (*information and media literacy*). Banyak media informasi bersifat sosial yang digandrungi peserta didik. Media sosial seolah menjadi media komunikasi yang ampuh digunakan peserta didik dan guru. Media sosial menjadi salah satu media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan guru 4.0. Kehadiran kelas digital bersifat media sosial dapat dimanfaatkan guru, agar pembelajaran berlangsung tanpa batas ruang dan waktu.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa di era revolusi industri 4.0, diperlukan madrasah yang dapat membentuk generasi kreatif, inovatif, serta kompetitif. Hal ini menyebabkan madrasah, termasuk MAN 3 Palembang, harus meredesain kurikulum dan metode pembelajaran agar sesuai dengan kondisi era pendidikan 4.0. Selain itu, pengembangan *system cyber* di MAN 3 Palembang akan lebih memungkinkan guru dapat memberikan materi ajar yang mutakhir sesuai perkembangan zaman, karena langsung dapat menayangkan materi itu dalam ruang kelas secara *online*. Dengan kata lain, pembangunan atau penyediaan fasilitas jaringan *cyber* sebagai bagian integrasi dengan jaringan teknologi informatika di lembaga MAN 3 Palembang akan menciptakan berbagai kemudahan, baik dalam administrasi akademik, non akademik, dan proses belajar me-ngajar, yang bermuara kepada peningkatan kualitas SDM.

2. Faktor Kendala Implementasi SKS di MAN 3 Palembang dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0.

Dalam implementasinya, penyelenggaraan SKS selama ini dirasa belum semuanya selaras dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena itu, untuk lebih meningkatkan kembali penguatan serta pemantapan program implementasi penyelenggaraan SKS sesuai dengan ketentuan dan pra syarat yang diatur dalam NSPK, maka MAN 3 Palembang yang menyelenggarakan SKS wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Peserta didik yang menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikutinya pada setiap semester berdasarkan kemampuan, bakat, dan minatnya. b. Peserta

didik yang memiliki kemampuan dan bermotivasi tinggi diizinkan untuk mempersingkat waktu penyelesaian studinya dari periode belajar yang ditentukan dengan harus tetap memperhatikan ketuntasan belajar. c. Peserta didik terus dilatih untuk memberdayakan dirinya sendiri agar dapat belajar secara mandiri.

Bagi peserta didik yang ingin mengambil percepatan, pihak sekolah membuat berbagai seri mata pelajaran dimana dalam pelaksanaannya peserta didik dibimbing agar dapat menyelesaikan seluruh SKS-nya dalam jangka waktu 2 tahun, agar peserta didik tersebut dapat mengikuti Ujian Nasional bersama dengan peserta didik lainnya. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi penerapan program SKS, pihak pemerintah belum memfasilitasi peserta didik yang dapat menyelesaikan masa studinya ketika berada di semester antara.⁹⁸

Dalam kondisi demikian, penerapan SKS di MAN 3 Palembang dituntut peserta didik dengan program percepatan agar dapat menyelesaikan masa studinya selama 2 tahun, sehingga peserta didik tersebut dapat mengikuti ujian bersama kakak tingkatnya. Namun, pemerintah belum memberikan regulasi yang jelas bagi peserta didik yang dapat menyelesaikan studinya selama 2,5 tahun. Peserta didik tersebut terpaksa harus menunggu sampai Ujian Nasional dilaksanakan, sehingga hal tersebut menjadi sesuatu yang sia-sia. Oleh karena itu pihak sekolah menyiasati dengan membuat seri mata pelajaran agar para siswa dapat selesai dalam jangka waktu 2 tahun atau 3 tahun. Seperti dikatakan Abu Somah (WKH

⁹⁸Agustina Tyas Asri Hardini dan Bambang Suteng Sulasmono, "Evaluasi Program Sistem Kredit Semester Di SMA Negeri 1 Salatiga". Dalam *Jurnal Kelola, Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember, (Salatiga: Magister Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Kristen Satya Wacana (2016), hlm. 258

MAN 3 Palembang) “kendala utama penerapan SKS di MAN 3 Palembang sampai sekarang penggunaan belum efektif”.⁹⁹

Selain tu, implementasi Kurikulum 2013 dengan SKS di MAN 3 Palembang berdasarkan pengamatan dilapangan adanya sebagian guru yang masih belum siap, sehingga Kurikulum 2013 dirasa menjadi beban, beberapa guru senior yang kurang paham mengenai penggunaan Teknologi Informasi (TI), dan masih ada guru yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) Kurikulum 2013 serta minimnya pelatihan mengenai SKS.

Seperti dikatakan Hj. Komariah Hawa, M.Pd (Kepala MAN 3 Palembang) “perlu adanya pelatihan atau *workshop* mengenai SKS agar lebih mudah dipahami. Adanya *in house training SKS*”.¹⁰⁰ Menurut Riza Kurnia, S.Pd.I (Guru Fiqh MAN 3 Palembang) penerapan SKS di MAN 3 Palembang juga karena “waktu yang kurang efektif, dan kurang fasilitas IT, sehingga perlu melengkapi sarana dan prasana yang ada”.¹⁰¹ Sementara itu, menurut guru MAN 3 Palembang, Hj. Ratna Dewi, MM, bahwa dalam “penerapan SKS secara optimal di MAN 3 Palembang perlu adanya pelatihan secara periodik bagi para guru sebab dengan pelatihan SKS secara periodik ini maka perkembangan mutakhir mengenai penerapan SKS akan diketahui oleh para guru”.¹⁰²

Secara konseptual penerapan SKS ini bukan hanya terkendala dengan penggunaan IT saja, tetapi juga kesulitan mencari bahan rujukan atau referensi buku pegangan, penentuan beban belajar peserta didik yang

⁹⁹ Wawancara dengan Abu Somah (WKH MAN 3 Palembang) pada 12 Februari 2020.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Hj. Komariah Hawa, M.Pd (Kepala MAN 3 Palembang) pada 12 Februari 2020

¹⁰¹ Wawancara dengan Riza kurnia, S.Pd.I (Guru Fiqh MAN 3 Palembang) pada 12 Februari 2020

¹⁰² Wawancara dengan Hj. Ratna Dewu, MM (Guru MAN 3 Palembang) pada 12 Februari 2020

masih berubah-ubah, serta dana yang tersedia sangat terbatas. Upaya sekolah untuk mengatasi faktor kelemahan yang ada yaitu dengan cara mewajibkan guru dalam penggunaan IT, mencari sumber referensi buku-buku yang relevan dengan materi pembelajaran, memberikan kesempatan kepada para pendidik untuk mengikuti diklat implementasi K-13 berbasis SKS, serta mengelola dana pendidikan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁰³

Hal demikian juga diungkapkan Mussolikhah dan Saputra bahwa faktor pendukung implementasi K-13 berbasis SKS adalah guru sudah mengerti mengenai K-13 dengan mengikuti sosialisasi, pedoman K-13 (RPP, silabus, instrumen penilaian). Dari segi sumberdaya manusia, dukungan dari guru berupa kompetensi yang dimilikinya dalam proses pembelajaran. Dari segi non sumberdaya manusia berupa fasilitas yang tersedia dan layanan yang diberikan sekolah sangat mendukung terhadap pelaksanaan K13 dengan SKS.¹⁰⁴

Berdasarkan pengamatan dilapangan ketahui bahwa di MAN 3 Palembang--meskipun jumlahnya sedikit--kendala dalam penerapan program SKS ini disebabkan kurangnya SKS yang didapatkan. Sementara di sisi lain adanya tuntutan dari pemerintah yang mewajibkan guru mengajar 24 jam, tetapi di semester tertentu SKS untuk mata pelajaran tersebut sangat sedikit. Sehingga SKS nya hanya sedikit sedangkan jumlah guru mata pelajaran tersebut banyak. Akhirnya guru harus mengajar mata pelajaran lain untuk memenuhi jam mengajarnya.

¹⁰³Desi Rostika dan Wildan Zulkarnain, "Analisis Implementasi Kurikulum 2013 dengan Sistem Kredit Semester". Dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Volume 25, Nomor 2, September, (2016), hlm. 193

¹⁰⁴D.T, Mussolikhah & I.N, Saputra, Implementasi Kurikulum 2013 Pada Program Keahlian Administrasi Perkantoran (APK) SMK Negeri 1 Turen Kabupaten Malang". Dalam *Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen*, Volumen1, Nomor 3, (2015), hlm. 211

Berdasarkan hasil wawancara pada siswa MAN 3 Palembang sebetulnya mereka sudah tahu mengenai penerapan SKS di madrasah ini, terutama bagi siswa yang mengikuti kelas *cambridge*. Karena sejak awal pendaftaran mereka sudah diberitahu oleh pihak MAN 3 Palembang.¹⁰⁵ Berkaitan dengan kendala yang dihadapi peserta didik MAN 3 Palembang dalam penerapan SKS sebagian besar mereka mengeluhkan kegiatan yang terlalu padat, sehingga waktu istirahat mereka sangat sedikit. “Kegiatan asrama yang padat, sehingga terlalu larut malam untuk tidur sedangkan UKBM harus dikerjakan. Jadi agak sedikit bosan dan monoton. Kurangi kegiatan asrama, PR harus dihapus, diperbolehkan membawa handphone, dan guru yang asyik belajarnya dan samakan guru mengajar di kelas dengan mengajar Bimbel”, ungkap mereka.¹⁰⁶

Berdasarkan informasi responden di atas dapat dikatakan bahwa volume atau tingkat pembebanan pada siswa MAN 3 Palembang yang terlalu tinggi akan berdampak pada *oversitas* energi, baik pikiran dan psikis, sehingga terjadi *overstress*. Tetapi, sebaliknya intensitas pembebanan yang terlalu rendah memungkinkan rasa bosan dan kejenuhan atau *understress*. Kedua hal ini, baik *overstress* maupun *understress* berakibat pada garis mendatar--tidak ada kemajuan dalam belajar. “Peristiwa jenuh ini kalau dialami seorang siswa yang sedang dalam proses belajar (kejenuhan belajar) dapat membuat siswa tersebut merasa telah menyia-nyiaikan usahanya”.¹⁰⁷ Atau dengan kata lain, bila *overstress*

¹⁰⁵ Dikutip dari wawancara siswa MAN 3 Palembang pada 12 Februari 2020, di antaranya; wawancara dengan M. Afif Budiyan Y (Kelas X IPA 7) dan M. Ichsan Hawari (Kelas X IPA 7).

¹⁰⁶ Wawancara siswa MAN 3 Palembang pada 12 Februari 2020, di antaranya; Afina Ayu Widyadhari (Kelas X IPA 7), M. Rajab Fadhly Hartawibawa, (Kelas X IPA 7), Muhammad Bimo (Kelas X IPA 7), dan Kauthar Abdillah (Kelas X IPA 7).

¹⁰⁷ Noer Rohmah, *Psikologi Pendidikan*. (Yogyakarta: Kalimedia cet 1, 2015). hlm.286

maupun *understress* terakumulasi pada diri peserta didik akan berdampak buruk bagi prestasi belajarnya.

Dalam hal ini, Suwarjo dan Diana Septi Purnama memaknai kejenuhan (*burnout*) sebagai “suatu keadaan keletihan (*exhaustion*) fisik emosional dan mental, keletihan tersebut dicirikan dengan perasaan tidak berdaya dan putus harapan, keringnya perasaan, konsep diri yang negatif dan sikap negatif. Keadaan seperti yang dicirikan disebut *physical depletion*”.¹⁰⁸ Kejenuhan belajar adalah suatu kondisi mental di mana seorang siswa mengalami kebosanan yang amat sangat untuk melakukan aktifitas belajar, dan kebosanan tersebut membuat motivasi belajar mereka menurun. Kejenuhan dalam bidang apa saja, umumnya disebabkan oleh aktifitas rutin yang dilakukan dengan cara yang monoton atau tidak berubah-ubah dalam waktu lama.¹⁰⁹

Terlalu banyak beban pekerjaan apabila dikaitkan dengan belajar yakni banyaknya tugas-tugas sekolah yang meliputi tugas mata pelajaran, maupun ekstrakurikuler. Seperti yang disebutkan oleh Slivar bahwa adanya “tuntutan tugas dari sekolah yang terlalu banyak dengan waktu yang relatif singkat dan sumber pengetahuan yang sangat sedikit sehingga seringkali siswa merasa terbebani”.¹¹⁰

Kejenuhan belajar sebenarnya sama seperti halnya kejenuhan pada aktivitas-aktivitas lainnya, pada umumnya disebabkan suatu proses yang berlangsung secara monoton (tidak bervariasi) dan berlangsung lama. Menurut Thursan Hakim faktor-faktor yang menjadi penyebab kejenuhan

¹⁰⁸Suwarjo & Diana Septi Purnama, “Model Bimbingan Pengembangan Kompetensi Pribadi Sosial Bagi Siswa SMA yang Mengalami Kejenuhan Belajar (Burnout)”. Laporan Penelitian, FIP UNY, (2014), hlm. 12

¹⁰⁹Thursan Hakim, *Belajar 19 cara Efektif*, (Jakarta: Pustaka Swara, 2005), hlm. 62

¹¹⁰Maslach & Leiter, “The Truth About Burnout, and Pro-Organizational Behaviour”. In *Journal of Criminal Justice and Behaviour*, Vol. 30 No. 5 (1997).

belajar sebagai berikut: 1. Cara atau metode belajar yang tidak bervariasi. 2. Belajar hanya ditempat tertentu. 3. Suasana belajar yang tidak berubah-ubah. 4. Kurang aktivitas rekreasi atau hiburan. 5. Adanya ketegangan mental kuat dan berlarut-larut pada saat belajar.¹¹¹ Kejenuhan belajar dapat terjadi pada peserta didik apabila ia telah kehilangan motivasi dan kehilangan konsolidasi salah satu tingkat keterampilan tertentu sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. Selain itu kejenuhan juga dapat terjadi karena proses belajar peserta didik telah sampai pada batas kemampuan jasmaniahnya karena bosan (*boring*) dan keletihan (*fatigue*). Namun, penyebab kejenuhan belajar yang paling umum adalah keletihan, sehingga menyebabkan munculnya perasaan bosan pada peserta didik yang bersangkutan.

Dalam konteks demikian, menurut hemat peneliti, para tenaga pendidik di MAN 3 Palembang hendaknya menggunakan metode belajar yang bervariasi dan tidak monoton yang akan menyebabkan kejenuhan dalam belajar, sehingga menciptakan suasana baru didalam kelas atau belajar di asrama. Selain itu, melakukan penataan ruangan belajar atau asrama agar lebih variatif dan inovatif, baik perubahan bentuk materi seperti perubahan letak meja, kursi, papan tulis dan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan aktifitas belajar. Penting menciptakan suasana baru di ruang belajar, misalnya, belajar sambil mendengarkan musik instrumental yang berirama tenang atau musik kesukaan siswa sendiri. Tak kalah penting, belajar adalah salah satu kegiatan mental yang sangat melelahkan dan sangat menyita banyak energi, kelelahan yang berlarut-larut akan mengakibatkan kejenuhan, untuk itu perlu adanya istirahat yang cukup sebagai alternatif dalam mengembalikan atau memulihkan energi yang

¹¹¹ Thursen Hakim, *Belajar Secara Efektif*, hlm. 63-65.

banyak tersita/terkuras saat belajar. Hindari adanya ketegangan mental saat belajar. Ketegangan mental akan membuat aktifitas belajar akan terasa jauh lebih berat dan melelahkan dan berujung pada kejenuhan belajar. Ketegangan mental dapat dihindari dengan jalan belajar santai artinya belajar dengan sikap rileks dan bebas dari ketegangan.

Selain kendala yang berkaitan dengan peserta didik, MAN 3 Palembang akan dihadapkan pada tantangan era revolusi industri 4.0. Sebab lembaga pendidikan Islam tidak terlepas tantangan global sebagai bagian dari masyarakat dunia. Salah satu bentuk tantangan yang dihadapi MAN 3 Palembang adalah era revolusi industri 4.0. Munculnya era revolusi industri 4.0 di antaranya ditandai dengan pesatnya perkembangan dunia digital, yang memudahkan setiap lapisan masyarakat untuk berinteraksi atau terhubung satu dengan yang lainnya.

Di dunia pendidikan, misalnya, telah ditandai dengan munculnya adanya pemanfaatan dibidang teknologi informasi dalam kegiatan pembelajaran baik yang bersifat *hybrid learning* ataupun *blended learning*. Perkembangan era digital telah merasuk ke berbagai kawasan negara-negara di dunia. Semua saling terhubung satu sama lain, seakan tiada batas yang menjadi sekat (*borderless*). Segala informasi terbuka yang ada dalam suatu kawasan dapat diketahui seketika juga oleh penduduk diketahui di kawasan lain. Semua itu terjadi karena hadirnya era digital yang telah menggantikan dominasi era konvensional. Era digital sendiri terlahir dari rahim serta pesatnya perkembangan era global atau globalisasi.¹¹²

Perubahan dalam kehidupan manusia sudah dimulai dengan adanya era digital atau disebut juga revolusi industri 4.0. Aktivitas yang mendominasi aktivitas manusia adalah internet dan mulai dari aspek

¹¹²Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 10

pendidikan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam era global keadaan dunia menurut seorang futurolog terkenal, Alvin Toffler, bergerak memasuki dunia baru yang dikenal dengan istilah *The Third Wave* (Gelombang Ketiga), yakni gelombang peradaban dengan merambahnya teknologi informasi, komputerisasi, revolusi biologi, teknologi perang dan terorisme, dan lain-lain yang bersifat global.¹¹³

Di era itulah perkembangan teknologi dan perangkat digital semakin canggih dan terus dikembangkan serta diperbarui. Gelombang peradaban tersebut membuat manusia tidak terlepas dari produk-produk digital. Bahkan semuanya kian terhubung, terbuka dan saling ketergantungan. Meski tetap memiliki wilayah teritorial dan garis pemisah yang jelas secara geografis, namun batas-batas tersebut tak menjadi tirai penghalang untuk berinteraksi, berkomunikasi dan berbagi informasi secara terbuka oleh masyarakat digital. Gambaran tentang masyarakat digital dapat terlihat dari dinamika perilaku dan kecenderungan peminatan generasi milenial saat berinteraksi dengan dunia internet dalam kaitannya dengan dunia pendidikan. Hakikatnya, dinamika dan arah seluruh perubahan sosial dan pendidikan di era digital adalah suatu tingkat kemajuan masyarakat, baik material maupun spiritual.¹¹⁴

Hanya saja, karena adanya perbedaan sudut pandang tentang material dan spiritual dari masing-masing ideologi, kemajuan yang dikehendaki sudah tentu tidak sama. Masyarakat maju sekarang lebih diwakili oleh kapitalisme dan sosialisme. Dalam implementasi perubahan yang dilakukan di era digital lebih bertumpu perubahan material, sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama Islam. Auguste Comte, seorang filosof barat, pernah

¹¹³Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, Cet ke-1, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 41-42.

¹¹⁴M. A. Sud, *Latihan Kepemimpinan Islam Tingkat Dasar (LKID)*, (Yogyakarta: UII Press. 2005), hlm.131.

melakukan analisis terhadap perkembangan intelektual manusia dengan konsep *Law of Three Stages*. Teori ini mengatakan bahwa tahap permulaan intelektual manusia adalah tahap berfikir teosofik, kemudian tahap metafisik, dan meningkat ke tahap berpikir positif. Melalui pengkategorian tersebut, Auguste Comte mengatakan jika manusia atau masyarakat khususnya siswa masih saja memeluk agama artinya tingkat berpikirnya bermain pada teosofik dan metafisik itu sama artinya dengan masyarakat purba atau primitif yang tingkat intelektualnya masih rendah.¹¹⁵

Menurut Comte, tingkat intelektual yang paling maju adalah tahap berpikir positif. Resep Comte tersebut menjadi dominasi masyarakat khususnya siswa saat ini, terutama anak muda. Maka, tidak heran jika kemudian anak muda sekarang lebih menomerduakan agama. Melihat realitas dan tantangan di atas, maka perlu adanya glocalisasi dalam pengembangan kurikulum. Glocalisasi atau *glocalization* merupakan perpaduan antara istilah globalisasi dan lokalisa dimana glocalisasi merupakan sesuatu yang global diinterpretasikan dengan nilai-nilai lokal. Glocalisasi muncul sebagai efek dari globalisasi. Nilai-nilai global yang biasanya berasal dari budaya barat dapat dengan mudah diterima dengan mudah oleh masyarakat sebagai dampak negatif globalisasi. Serta terjadinya perubahan gaya hidup remaja dan mulai memudarnya nilai religius serta kearifan lokal budaya bangsa, membuat perlu adanya penyisipan nilai-nilai budaya lokal, khususnya dalam pendidikan. Hal ini ditujukan agar generasi muda siap menyongsong revolusi industri 4.0 tanpa meninggalkan karakter budaya bangsa sendiri.¹¹⁶

¹¹⁵*Ibid.*, hlm. 131-132.

¹¹⁶Heny Kusmawati dan Anista Ika Surach⁹n, "Glocalisasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Madrasah Aliyah Keagamaan di Era Revolusi Industri 4.0". Dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 6 No. 2 Juli, (2019), hlm. 100.

Seperti dijelaskan di atas, MAN 3 Palembang sebagai bagian dari dunia global, saat ini telah menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas nilai-nilai religius keislaman, mulai banyak menarik perhatian, terutama para pemerhati pendidikan. Madrasah Aliyah, termasuk MAN 3 Palembang, telah menjadi salah satu alternatif lembaga pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0 sebab tidak hanya memberikan pendidikan keagamaan (Islam) *an sich*, tetapi juga ilmu pengetahuan umum lainnya.

Dalam konteks demikian, salah satu upaya menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0 melalui pengembangan kurikulum. Kurikulum memiliki kedudukan sentral dalam proses pendidikan karena didalamnya terdapat rencana pendidikan yang memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹¹⁷

Pengembangan kurikulum di MAN 3 Palembang harus lebih difokuskan untuk mendalami agama Islam dan juga memuat ilmu pengetahuan umum yang selaras dengan dengan kompetensi lulusan yang mampu bersaing menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0. Di sinilah sesuai dengan Anwar menyebutkan bahwa; *“the development of curriculum that should be noticed generally is the management of madrasah curriculum, Madrasah Curriculum has uniqueness with its Islamic*

¹¹⁷Pemerintah Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: SISDIKNAS, 2003)

*education, but it should be thought about how to level the curriculum which becomes guidance for all schools within the group of general school”.*¹¹⁸

Munculnya era **9** **revolusi industri 4.0** ditandai lahirnya teknologi berbasis *cyber physical system*, gabungan antara domain digital, fisik, dan biologi. Lembaga pendidikan madrasah harus menyadari pentingnya ketersediaan infrastruktur teknologi digital guna memudahkan kegiatan pendidikan.¹¹⁹ Pada umumnya lembaga pendidikan Islam, misal di Madrasah Aliyah, mengalami kendala dalam kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan administrasi berkaitan dengan tidak atau kurang tersedianya infrastruktur gital ini. Inilah yang harusnya dibenahi agar kedepannya pendidikan Islam mampu berbicara lebih baik, memudahkan siswa memperoleh informasi terbaru. Selain itu, alumni MAN 3 Palembang mampu menjadi lulusan yang memahami dan menguasai teknologi berbasis *cyber physical system* agar mampu berdakwah di dunia internet. Misalnya, membuat konten *youtube* berisi kajian keislaman dengan narasumber siswa madrasah itu sendiri atau diskusi melalui *wibinar (online)*. Siswa MAN 3 Palembang harus meningkatkan kemampuan dalam bidang teknologi ini.

Adanya *link and match*, di mana kesesuaian lulusan dan daya saing era revolusi industri 4.0. dapat menjadi tolok ukur kualitas lulusan dalam menjawab tantangan tersebut. Lulusan MAN 3 Palembang yang tersedia apakah sudah mampu memiliki kompetensi/skill yang sesuai profesinya atau ataukah lulusan hanya sekedar memiliki sebuah gelar tanpa memiliki

¹¹⁸Anwar, “Implementation Of Education Management Standard In The Guidance Of Private Islamic High School”. Jurnal *Pendidikan Islam*, Volume 4, Nomor 1, (2018), hlm. 78

¹¹⁹Heny Kusmawati dan Anista Ika Surachman, “Glokalisasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Madrasah Aliyah Keagamaan di Era Revolusi Industri 4.0”, hlm. 104.

kompetensi/skill sehingga pada akhirnya profesi yang diambil tidak linier dengan jurusannya karenanya minimnya kompetensi/skill. Tantangan ini harus dijawab dengan penyusunan kurikulum di mana, siswa memiliki kesempatan menjadi pribadi yang memiliki *number one skill* dalam dunia pendidikan dan *second skill*, yakni kewirausahaan sesuai dengan jurusan keagamaan.

Penerapan SKS berbasis K-13 yang telah diselenggarakan di MAN 3 Palembang harus dielaborasi secara kreatif dan inovatif agar peserta didik tidak mengalami kejenuhan dan *overstress*,¹²⁰ sehingga memiliki kesadaran global (*global awareness*), kesadaran literasi (*literacy awareness*), kesadaran sebagai warga bangsa (*civic awareness*) dan kesadaran terhadap kesehatan dan kesejahteraan (*health and wellness awareness*). Hal ini, sebagaimana diungkapkan Trilling dan Fadel, perlu ada tiga ketrampilan yang diperlukan agar dapat bersaing di era revolusi industri 4.0, yaitu kecakapan belajar dan inovasi yang meliputi berfikir kritis dan pemecahan masalah, komunikasi dan kolaborasi, serta kreativitas dan inovasi, kecakapan melek digital yang meliputi, melek informasi, melek media dan

¹²⁰Akibat kejenuhan dengan kegiatan yang rutinitas *face to face* akan lebih mengesankan dan mengurangi rasa bosan, rutinitas dari hari ke hari selama satu tahun yang diberikan guru terhadap siswa akan memberi efek kebosanan siswa, untuk berkreasi dan aktif dalam proses pembelajaran. Guru dituntut agar dapat memberi pembelajaran dengan pendekatan yang lebih menantang siswa mengeksplorasi diri, mengembangkan diri untuk menguasai mata pelajaran yang diberikan oleh guru. Guru harus mampu memotivasi siswa memberi dorongan secara psikis untuk maju yang positif *thinking* dalam meningkatkan perkembangan pribadi intelektualitas untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi baik secara pribadi atau dalam menguasai sesuatu pembelajaran, guru tidak boleh meremehkan bahwa siswa tidak mampu, sebelum dia membuktikan diri dengan sekuat tenaga dan mampu memecahkan suatu persoalan dengan baik. Kepala madrasah perlu peka terhadap permasalahan guru, tapi bukan berarti menghakimi. Namun membantu guru dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, untuk itu pusat pengembangan profesi guru dapat membantu pelatihan-pelatihan yang menyangkut pengelolaan kelas. Lihat Jumadi, "Budaya Madrasah dan Masalah Perubahan". Dalam Arif Rahman, *Pendidikan Islam Di Era Revolusi Industri 4.0*, (Depok: Komojoyo Press, 2019), hlm. 154-155.

melek teknologi informasi (ICT) dan yang ketiga kecakapan hidup dan kecakapan karier.¹²¹

B. Analisis Temuan Penelitian

1. Komunikasi

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan publik George C. Edward III, program SKS merupakan suatu kebijakan pemerintah, khusus Kementerian Agama, yang bertujuan untuk mengakselerasi peserta didik yang memiliki kemampuan intelektual lebih di atas rerata. Sebagai sebuah kebijakan, implementasi SKS di MAN 3 Palembang telah terjadi komunikasi efektif antara pihak pelaksana SKS, dalam hal ini kepala madrasah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan guru-guru MAN 3 Palembang dengan pihak siswa dan wali murid/siswa. Dalam kajian implementasi kebijakan publik, kata Sabatier¹²² terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model *top down* dan model *bottom up*. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model *top down*. Sedangkan gambaran model *bottom up* dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan.

Kebijakan SKS dapat dikatakan sebagai kebijakan model elit dan cenderung bersifat *top down*. Karena kebijakan tersebut merupakan regulasi yang dibuat pemerintah, khusus Kementerian Agama. Di MAN 3 Palembang penerapan SKS sejak tahun pelajaran tahun ajaran 2015/2016

¹²¹M. Samani dan Hariyanto, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 21. 37.

¹²²Paul Sabatier, "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research". Dalam *Journal of Public Policy* 6, January, (1986), hlm. 21-48.

hingga saat ini. Penerapan SKS di MAN 3 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3274 Tahun 2015 yang menetapkan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Palembang menggunakan SKS. Dengan adanya surat keputusan tersebut MAN 3 Palembang termasuk 29 MA di Indonesia yang ditetapkan sebagai penyelenggara program pembelajaran SKS.

Kendati, kebijakan program SKS di MAN 3 Palembang dapat terus diterapkan tentu dengan sendirinya harus disesuaikan dengan kondisi madrasah tersebut. Dengan kata lain, meskipun kebijakan program SKS cenderung *top down* karena otoritas kebijakan ada di tangan menteri liding sektor Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Palembang yang begitu besar, kuat, dan bila tidak melaksanakan kebijakan tersebut besar kemungkinan akan mendapat sanksi. Tetapi, dalam proses komunikasi kebijakan, baik dengan instansi terkait, maupun antara kepala madrasah MAN 3 Palembang dengan para guru dan siswa, telah berjalan dengan baik.

Secara teoritis, ungkap Arwildayanto, Arifin Sukung, dan Warni Tune Sumar kebijakan pendidikan--dalam hal ini kebijakan program SKS--akan bisa dilaksanakan dengan baik, jika terdapat komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program dapat disosialisasikan dengan baik dengan harapan bisa menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program sudah ditetapkan. Ini sangat penting asumsinya semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengimplementasikan kebijakan yang sesungguhnya.¹²³

¹²³Arwildayanto, Arifin Sukung, dan Warni Tune Sumar, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*, (Bandung: Cendekia Press, 2018), hlm. 93.

Memang dalam implementasinya karena tuntutan tugas dari sekolah yang terlalu banyak dengan waktu yang relatif singkat dan sumber pengetahuan yang sangat sedikit sehingga seringkali peserta didik merasa terbebani. Namun, kendala tersebut telah diatasi dengan adanya komunikasi antara kepala MAN 3 Palembang dengan para guru agar menerapkan metode pembelajaran yang tidak monoton dan lebih difokuskan waktu belajar, merancang pembelajaran yang lebih efektif serta lebih terbuka dan diskusi dengan peserta didik dan tenaga pendidik lainnya.¹²⁴

2. Sumberdaya

Setiap kebijakan, dalam hal ini kebijakan program SKS, harus didukung oleh sumber daya yang berkualitas dan memadai, khususnya sumber daya manusia. Melihat tingkat pendidikan dan prestasi yang telah ditunjukkan oleh para tenaga pendidik MAN 3 Palembang sudah lebih dari memadai dan berkualitas baik. Apalagi bila merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 yang mengisyaratkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Status kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan di MAN 3 Palembang terdiri dari tenaga pendidik berjumlah lebih dari 100 orang, di mana jumlah tersebut yang berstatus PNS dengan kualifikasi pendidikan S1 dan S2. Lebih jauh, tenaga pendidik di MAN 3 Palembang yang termasuk dalam kategori guru berprestasi untuk tingkat kota Palembang, Provinsi, maupun nasional.

Mencermati penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di MAN 3 Palembang sangat cukup dan berkualitas ditinjau dari aspek jenjang pendidikan. Hal ini berarti pula tidak akan menghambat

¹²⁴ Wawancara dengan Heniati, S.Pd.I (guru SKI MAN 3 Palembang) pada 12 Februari 2020

implementasi kebijakan program SKS di madrasah ini. Yang dimaksud sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi adalah para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan program SKS yang ditetapkan. Memang jumlah pelaksana yang banyak tidak otomatis mendorong implementasi yang berhasil, jika tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai. Di sisi lain kurangnya personil yang memiliki keterampilan juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Di sinilah perlu juga kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan.

Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan program SKS. Informasi yang dimaksudkan di sini adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sarana dan prasarana dalam sumber daya adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.

Bila melihat kondisi MAN 3 Palembang semua informasi itu telah tersedia. Di mana kepala madrasah telah menyampaikan informasi tentang program SKS dan melakukan pembinaan kepada para tenaga pendidik. Bahkan dianjurkan tenaga pendidik yang pernah mengikuti pelatihan (*workshop*) mengenai penerapan program SKS. Lebih dari itu, para siswa pun telah mendapat informasi dan bimbingan dari kepala madrasah dan para guru mengenai kebijakan program ini.

3. Disposisi

Pada variabel disposisi berkaitan dengan sikap para pelaksana program kebijakan. Sikap para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi dalam implementasi kebijakan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal, dan sebaliknya bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit.¹²⁵

Sikap para pelaksana dalam kesediaan menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa suatu paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan. Tetapi, akan berbeda jika sikap para pelaksana kebijakan tidak sepatutnya dalam melihat substansi suatu kebijakan, yang berbeda dengan pandangan mereka. Di samping itu mungkin sikap para pelaksana yang menghindari dampak dari suatu kebijakan dengan melihat secara selektif persyaratan atau mengabaikan beberapa persyaratan yang bertentangan dengan pandangan mereka.

Di sini variabel disposisi merupakan karakter penting yang dimiliki implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam *guideline* program. Komitmen dan kejujuran membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa

¹²⁵Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo Publishing, 2004), hlm. 142.

percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program.

Selama ini di MAN 3 Palembang belum ditemukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang pelaksanaan program SKS dari pihak kepala madrasah atau guru. Memang ada saja siswa yang melanggar regulasi atau peraturan (tata tertib sekolah) yang telah disepakati bersama. Tetapi, hanya sebatas sanksi ringan, yakni hanya teguran langsung.

8 **4. Struktur Birokrasi**

Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan. Birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern yang terkadang sengaja dibentuk untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Dalam analisis teori George Edward III, ada dua karakteristik utama dalam birokrasi, yaitu prosedur kerja baku standar atau *operating procedure* (SOP) dan fragmentasi. *Standard Operating Procedure* berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

SOP mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula SOP menghambat implementasi. Namun SOP juga memiliki manfaat dimana organisasi dengan prosedur perencanaan yang baik dan kontrol yang sejalan dengan program yang memungkinkan, akan lebih dapat menyesuaikan

dengan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi tanpa mempunyai ciri tersebut.

Dari keterangan di atas maka dapat dikatakan bahwa adanya SOP atau petunjuk pelaksanaan walaupun dibuat secara sederhana, tidak akan menyulitkan aparat pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan tanpa mengurangi makna secara keseluruhan. Karakteristik yang kedua dalam birokrasi adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan unit diluar organisasi. Konsekuensi buruk dari fragmentasi birokrasi usaha untuk menghambat koordinasi. Para birokrat dengan alasan prioritas dari organisasinya masing-masing, mendorong para birokrat untuk menghindari koordinasi dengan organisasi lain, padahal terkadang penyebaran wewenang dan sumber untuk melaksanakan kebijakan kompleks membutuhkan koordinasi. Hambatan ini diperburuk oleh struktur pemerintah yang terpecah-pecah padahal semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan untuk berhasil.

Penerapan kebijakan program SKS yang telah dilaksanakan di MAN 3 Palembang sudah dilakukan sesuai konsep dan pedoman SKS dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dan regulasi lainnya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas yang dilaksanakan tanpa adanya tumpang tindih dengan tetap mencakup pembagian tugas secara menyeluruh dalam melaksanakan suatu kebijakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, baik kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta para siswanya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa mekanisme implementasi kebijakan program SKS sudah ditetapkan melalui *standar operating prosedur* (SOP) dengan kerangka kerja yang jelas, sistematis, dan

tidak rumit, sehingga mudah dipahami oleh siapapun. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun tidak terlalu berbelit, panjang dan kompleks. Bahkan pada tahun ajaran 2019/2020 telah dibuat buku *Pedoman dan Peraturan Akademik Sistem Kredit Semester (SKS) di MAN 3 Palembang*, 2019.

Karena secara teoritis, kekuasaan personil dalam pandangan Winarno¹²⁶ dapat diukur dari: *Pertama*, pejabat melakukan rekrutmen dan seleksi, penugasan dan korelasi, kenaikan pangkat, dan akhirnya pemecatan. *Kedua*, pejabat dapat melakukan kontrol anggaran belanja pada unit-unit yang ada, memiliki kewenangan untuk menanggapi pencapaian kebijakan yang memuaskan atau tidak memuaskan, dan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku bawahan.

Bentuk yang dipertanggungjawabkan pemerintah dalam implementasi kebijakan adalah program-program yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya melalui keputusan-keputusan kebijakan publik. Pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program. Berbagai program yang bersifat operasional tersebut harus dipahami oleh implementor/pelaksana program mengenai aspek isinya, tujuan/sasaran dari program tersebut, pengalokasian anggaran dan ketepatan peruntukannya, metode dan prosedur kerja secara tepat, serta kejelasan standar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

¹²⁶*Ibid.*, hlm. 159.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian di muka dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) di MAN 3 Palembang dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 telah berjalan dengan baik. MAN 3 Palembang telah memfasilitasi keragaman peserta didik dalam hal kecepatan belajar, sehingga memungkinkan mereka menyelesaikan studi dalam waktu yang beragam dengan model pelaksanaan SKS. Sebagai respon nyata atas kebijakan tersebut, MAN 3 Palembang telah menyusun strategi pengembangan yang tepat sebagai bagian dari pencapaian standar pengelolaan. Bagian penting dari pedoman pengelolaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SKS adalah pedoman dan peraturan akademik yang memberikan gambaran tentang alternatif penyelenggaraan SKS di MA Negeri 3 Palembang

Beban belajar pada SKS di MAN 3 Palembang dinyatakan dengan jam pelajaran (JP) dengan beban keseluruhan minimal 306 JP. Beban belajar satu jam pelajaran secara umum terdiri atas 45 menit kegiatan tatap muka dan minimal 60% (sekitar 27 menit) untuk kegiatan penguasaan terstruktur dan tugas mandiri tidak terstruktur. Disebabkan MAN 3 Palembang berasrama (*boarding*), maka layanan yang diberikan sampai malam hari sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Layanan kelompok dapat dilakukan dengan membuat kelompok/kelas tertentu dengan kecepatan dan prestasi/kemampuan yang hampir sama. Pengelompokan dalam kelas secara bervariasi dapat dilakukan berdasarkan data yang diperoleh pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pada layanan

kelompok pola kontinyu, MAN 3 Palembang telah menyusun variasi pembelajaran sesuai dengan kecepatan belajarnya. Struktur kurikulum untuk tahun pembelajaran 2019-2020 ini disusun terdiri atas dua varian, masing-masing: 4 semester dan/atau 6 semester. Penyusunan serial mata pelajaran sesuai dengan urutan materi dan kompetensi (KI dan KD) yang tertuang pada standar isi dan K13.

Secara umum desain struktur kurikulum dan beban belajar SKS mengacu pada Permendikbud Nomor 59 tahun 2014, terdiri dari mata pelajaran kelompok A dan B (Umum) dan kelompok C peminatan. Beban belajar untuk tingkat MA berjumlah 306 jam pelajaran (JP) yang dapat ditempuh secara bervariasi. Dengan demikian MA penyelenggara SKS dapat menyusun struktur kurikulum dan beban belajar tiap semester secara bervariasi. Ada dua pola pembelajaran yang dapat dilakukan, yaitu pola kontinyu dan pola diskontinyu (*on/off*).

Dalam implementasi SKS di MAN 3 Palembang dalam menghadapi tantangan RI4.0 telah mampu menghadapi tantangan tersebut, di mana fasilitas belajar yang berbasis digital dan website serta telah didukung oleh komunikasi yang efektif antara kepala madrasah, guru, dan siswa. Selain itu, terdapat juga sumber daya manusia, baik kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikannya yang telah memenuhi syarat dalam penerapan SKS. Lebih dari itu, di MAN 3 Palembang telah disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum buku, *Pedoman dan Peraturan Akademik Sistem Kredit Semester (SKS) di MAN 3 Palembang*, (2019). Buku ini selain merupakan pedoman bagi peserta didik, pendidik, staf dan jajaran tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan pendidikan, juga untuk memberikan wawasan kepada siswa dalam rangka pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan mencapai visi MAN 3 Palembang.

Kedua, faktor kendala dalam implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) di MAN 3 Palembang dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini adalah *overstress* maupun *understress* terakumulasi pada diri peserta didik MAN 3 Palembang, sehingga berdampak buruk bagi prestasi belajarnya. Bila ini dibiarkan berlarut-larut, maka prestasi belajar yang tidak maksimal menyebabkan daya saing mereka dalam era RI4.0 akan lemah dan kalah bersaing dengan lembaga pendidikan sederajat lainnya. Karena kejenuhan belajar adalah suatu kondisi mental di mana seorang siswa mengalami kebosanan yang amat sangat untuk melakukan aktifitas belajar, dan kebosanan tersebut membuat motivasi belajar mereka menurun.

B. Saran-saran

1. Kepada pihak MAN 3 Palembang, khususnya bagi tenaga pendidik di MAN 3 Palembang hendaknya menggunakan metode belajar yang bervariasi dan tidak monoton yang akan menyebabkan kejenuhan dalam belajar, sehingga menciptakan suasana baru didalam kelas atau belajar di asrama.
2. Kepada peserta didik MAN 3 Palembang belajar lebih giat agar mampu bersaing di era RI4.0 dengan berbekal ilmu pengetahuan-teknologi dan nilai-nilai keimanan.
3. Kepada pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumsel harusnya ada evaluasi secara rutin penerapan SKS di MAN 3 Palembang. Dengan adanya evaluasi akan diketahui keunggulan dan kelemahan .

DAFTAR PUSTAKA

Data Buku

- Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Agustino, Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Alwasilah, A, Chaedar, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Dunia Pustaka, 2002)
- Arifin, Anwar, *Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Arifin, Imron, ed., *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan keagamaan* (Malang: Kalimasahada Press, 1996)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Aksara, 1989)
- Arwildayanto, Arifin Sukung, dan Warni Tune Sumar, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*, (Bandung: Cendekia Press, 2018)
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*, Cet ke-1, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Badan Standar Nasional Pendidikan, *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester*, (Jakarta: BSNP, 2010)
- Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro* (Surabaya: Insan Cendekia, 2002)
- Buku *Profil MAN 3 Palembang*, (Palembang: Kementrian Agama Agama RI, 2019)
- Creswell, John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Third Edition), (California: Sage, 2009)
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, *Implementasi Sistem Kredit Semester pada Sekolah Menengah Kejuruan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Menengah, 2008)
- Dwiyanto, Agus, *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Fisipol UGM, 1995)
- Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, (London: Jai Press Inc, LondonEngland. Goggin, Malcolm L et al. 1990)

- Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)
- George C. Edward III, (edited), *Public Policy Implementing*, (London: Jai Press Inc, London England, 1990)
- Grindle, Merilee S., *Politics and Policy Implementation in The Third World*, (New Jersey: Princnton University Press, 1980)
- Hakim, Thursan, *Belajar Secara Efektif*, (Jakarta: Puspa Swara, 2005)
- Hamalik, Oemar, *Manajemen Belajar di Perguruan Tinggi Pendekatan Sistem Kredit Semester*, (Bandung: Sinar Baru, 1991)
- Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Edisi ke-2 Revisi, (Yogyakarta: Gava Media, 2017)
- Jones, Patricia, dan Larry Kahaner, *Misi dan Visi 50 Perusahaan Terkenal di Dunia*. Terj. Anton Asiwiyoto, (Jakarta, Interaksara, 1999)
- Jumadi, "Budaya Madrasah dan Masalah Perubahan". Dalam Arif Rahman, *Pendidikan Islam Di Era Revolusi Industri 4.0*, (Depok: Komojoyo Press, 2019)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2017)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2017)
- Krisnariansyah, Mochamad, "MAN 3 Palembang Terapkan Sistem SKS di Tahun Ajaran Baru", TRIBUNnews.com, Rabu, 8 Juli 2015.
- Lampiran IV Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Impelementasi Kurikulum
- Levine, Charles, H.B. Guy. Peters. Frank, dan J. Thomson. *Public Administration: Challenges, Choices, Consequences*, (London: SCOTT, 1990).
- Ma'arif, Syamsul, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu 2007)
- Mansur, Abdul Majid Sayyid Ahmad, *Ilm al Lughah al Nafsi* (Riyadh: Jami'ah al Muluk Su'ud, 1982)

- Maslach & Leiter, "The Truth About Burnout, and Pro-Organizational Behaviour". In *Journal of Criminal Justice and Behaviour*, Vol. 30 No. 5 (1997).
- Moleong. Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, (Bandung: Rosda Karya, 1996)
- Mustopadidjaja, AR, *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja.* (Jakarta: LAN, 2002)
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988)
- Nata, Abuddin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Nursyamsudin, *Panduan Pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA Implementasi Kurikulum 2013,* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014)
- Prasetyo, B., & Trisyanti, U., "Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial. Dalam *Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0"*, 2018).
- Rohmah, Noer, *Psikologi Pendidikan.* (Yogyakarta: Kalimedia cet 1, 2015)
- Rusyan, Tabrani, *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar.* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, tth)
- Sabatier, Paul, "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research" *Journal of Public Policy* 6, January, (1986)
- Sabatier, Paul, "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research". Dalam *Journal of Public Policy* 6, January, (1986)
- Samani, M, dan Hariyanto, *Konsep dan Model Pendidikan Karakter,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017)
- Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya,* (Jakarta: Renika Cipta, 2003)
- Slameto, *Proses Belajar Mengajar Dalam Sistem Kredit Semester (SKS),* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)
- Sud, M. A., *Latihan Kepemimpinan Islam Tingkat Dasar (LKID),* (Yogyakarta: UII Press. 2005)

- Surani, Dewi, “Studi Literatur: Peran Teknologi Pendidikan Dalam Pendidikan 4.0”. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, Vol. 2, No.1, (2019)
- Tim Pengembang Kurikulum, *Pedoman dan Peraturan Akademik Sistem Kredit Semester (SKS) di MAN 3 Palembang*, (Palembang, 2019)
- Trilling. B., & C. Fadel, *21st-Century Skills: Learning for Life in Our Times*, (US: Jossey-Bass A Wiley Imprint, 2009).
- Usman, Husaini, *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Vredenburg, Jacob, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1980).
- Wibawa, Samodra, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Intermedia, 1994)
- Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo Publishing, 2004)
- Yahya, Muhammad, “Era Industri 4.0: Tantangan dan Peluang Pengembangan Pendidikan Kejuruan Indonesia”. Orasi Ilmiah Professor bidang Ilmu Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Makassar, 14 Maret, (2018)

Data Jurnal

- Achmad Muhlis, “Pengembangan Pembelajaran Dengan Sistem Kredit Semester Di Mts Negeri Sumber Bungur Pamekasan”. Dalam *Jurnal Nuansa*, Vol. 14 No. 1 Januari-Juni (2017).
- Agustina Tyas Asri Hardini dan Bambang Suteng Sulasmono, “Evaluasi Program Sistem Kredit Semester Di Sma Negeri 1 Salatiga”. Dalam *Jurnal Kelola, Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember, (Salatiga: Magister Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Kristen Satya Wacana (2016)
- D.T, Mussolikhah & I.N, Saputra, Implementasi Kurikulum 2013 Pada Program Keahlian Administrasi Perkantoran (APK) SMK Negeri 1 Turen Kabupaten Malang”. Dalam *Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen*, Volumen1, Nomor 3, (2015)
- Desi Rostika dan Wildan Zulkarnain, “Analisis Implementasi Kurikulum 2013 dengan Sistem Kredit Semester”. Dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Volume 25, Nomor 2, September, (2016)

- Edi Irawan, “Digitalisasi Madrasah di Era Revolusi Industri 4.0: Refleksi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Ponorogo”. Dalam *Jurnal E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Volume 10, Nomor 2, (2019)
- Effendi Gazali, “Pesantren di Antara Generasi Alfa dan Tantangan Dunia Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0”. Dalam *Oasis: Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, 22, (2018)
- Eko Supriyanto, “Model Penguatan Sekolah Madrasah Untuk Melayani Siswa Berkecerdasan Tinggi Melalui Implementasi Pembelajaran Sistem Kredit Semester (SKS)”. Dalam *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Volume. 17, Nomor. 2, Desember, (2016)
- Faridah Alawiyah, “Islamic School Education in Indonesia”. Dalam *Jurnal Aspirasi*, Vol. 5 No. 1, Juni (2014)
- H. Anwar, “Implementation Of Education Management Standard In The Guidance Of Private Islamic High School”. *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 4, Nomor 1, (2018)
- Heny Kusmawati dan Anista Ika Surachman, “Glokalisasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Madrasah Aliyah Keagamaan di Era Revolusi Industri 4.0”. Dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 6_ No. 2 Juli, (2019)
- S. Priatmoko, “Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam Di Era 4.0”. Dalam *Jurnal Ta’lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 12, (2018).
- Sigit Priatmoko, “Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam Di Era 4.0”. Dalam *Jurnal Pendidikan Islam, Ta’lim*, Vol.1 No.2 Juli (2018)
- Sutrimo Purnomo, “Pengembangan Sasaran, Visi dan Misi Hubungan Masyarakat di Lembaga Pendidikan Berbasis Kepuasan Pelanggan”. Dalam *Jurnal Kependidikan*, Vol. III No. 2 November, (2015)
- Yusuf Hamdan, “Pernyataan Visi Dan Misi Perguruan Tinggi”. Dalam *Jurnal Mimbar*, Volume .XVII No. 1 Januari – Maret, (2001)

Data Tesis

- Fitriyanto, “Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 3 Purwokerto”. *Tesis*. (Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Islam, Konsentrasi Manajemen Kebijakan dan Pendidikan Islam. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

Nurani, Dwi, “Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Jakarta Selatan”, *Tesis*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Pascasarjana Ilmu Administrasi, Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Pendidikan, 2009)

Data Skripsi

Anjarsa, Trisna Dwi, “Sistem SKS Untuk Meningkatkan Prestasi Peserta Didik pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas XI MIA 1 di MAN 1 Tulungagung”. *Skripsi*. (Tulungagung: Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, IAIN Tulungagung, 2017).

Chuluq, Maulana Ahsanul, “Evaluasi Sistem Kredit Semester (Studi Kasus di MTs. Unggulan Amanatul Ummah Surabaya)”. *Skripsi*. (Surabaya: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Santosa. Arfie Bayu, “Pendidikan Berbasis SKS Dalam Meningkatkan Prestasi Akademik Siswa Kelas SCI (Siswa Cerdas Istimewa) Studi Kasus di SMA Takasus Al-Qur’an Kalibeper Wonosobo”. *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2015)

Laporan Penelitian

Suwarjo & Diana Septi Purnama, “Model Bimbingan Pengembangan Kompetensi Pribadi Sosial Bagi Siswa SMA yang Mengalami Kejenuhan Belajar (Burnout)”. Laporan Penelitian, FIP UNY, (2014)

Perundang-Undangan

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3364 Tahun 20015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Madrasah*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah Kemenag RI, 2015)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*, (Jakarta: Kemdikbud, 2014).

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: SISDIKNAS, 2003)

Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2013)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi

Salinan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)

Data Internet

Ahmad, Pendidikan Tinggi “4.0” Yang Mampu Meningkatkan Daya Saing Bangsa. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Makassar, 16 Februari 2018. Bahan Presentasi. Diakses 2 April 2020.

Basri, Hasan, “Dua Siswa MAN 3 Palembang Juara Nasional Ajang ARIA 2019”. Dalam <https://intens.news/dua-siswa-man-3-palembang-juara-nasional-ajang-aria-2019/>. Diakses 2 April 2020. Pukul. 19.30 WIB

Eduaksi, *Pendidikan 4.0, Apa Itu?*, <https://eduaksi.com/pendidikan-4-0-apa/>. Diakses 04 Februari 2020.

<https://kemenag.go.id/berita/read/>. Diakses 6 April 2020.

<https://kemenag.go.id/berita/read/508674/nur-syam-ingatkan-pendidikan-islam-tantang-an-eraindustri-4-0>. Diakses 6 April 2020.

<https://kemenag.go.id/berita/read/508674/nur-syam-ingatkan-pendidikan-islam-tantangan-era-industri-4-0>. Diakses 6 April 2020

<https://man3plg.sch.id/website/>. Diakses 1 April 2020. Pukul 19.00 WIB

<https://man3plg.sch.id/website/>. Diakses 1 April 2020. Pukul 19.00 WIB.

Humas, “Klub Robotik MAN 3 Syuting Program Metro Ekskul”. dalam <https://man3plg.sch.id/website/index.php?halm=beritadetail&di=87>. Diakses 6 April 2020. Pukul. 10.00 WIB.

- Risdianto, Eko, "Analisis Pendidikan Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0". Dalam <https://www.researchgate.net/publication/332423142>, 15 April 2019.
- Saputro, Febrianto Adi, "Mendikbud Ungkap Cara Hadapi Revolusi 4.0 di Pendidikan". Dalam <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/18/05/02/p8388c430-mendikbud-ungkap-cara-hadapi-revolusi-40-di-pendidikan>. Diakses 5 April 2020..
- V. E, Satya, "Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0." Jakarta. Retrieved from <https://bikinpabrik.id/wp-content/uploads/2019/01/Info-Singkat-X-9-IP3DI-Mei-2018-249.pdf>
- World Economic Forum, "The Global Competitiveness Report 2017-2018". <https://www.weforum.org/reports/the-global-competitivenessreport-2017-2018>. Diakses 17 Januari 2020

Data Wawancara

- Wawancara dengan Hj. Ratna Dewi, MM (Guru MAN 3 Palembang) pada 12 Februari 2020.
- Wawancara dengan Abu Somah (WKH MAN 3 Palembang) pada 12 Februari 2020.
- Wawancara dengan Heniati, S.Pd.I (guru SKI MAN 3 Palembang) pada 12 Februari 2020
- Wawancara dengan Hj. Komariah Hawa, M.Pd (Kepala MAN 3 Palembang) pada 12 Februari 2020
- Wawancara dengan Riza kurnia, S.Pd.I (Guru Fiqh MAN 3 Palembang) pada 12 Februari 2020
- Wawancara siswa MAN 3 Palembang Afina Ayu Widyadhari (Kelas X IPA 7), pada 12 Februari 2020
- Wawancara siswa MAN 3 Palembang Kauthar Abdillah (Kelas X IPA 7), pada 12 Februari 2020
- Wawancara siswa MAN 3 Palembang M. Afif Budiyan Y (Kelas X IPA 7) pada 12 Februari 2020
- Wawancara siswa MAN 3 Palembang M. Ichsan Hawari (Kelas X IPA 7) pada 12 Februari 2020

Wawancara siswa MAN 3 Palembang M. Rajab Fadhly Hartawibawa,
(Kelas X IPA 7), pada 12 Februari 2020

Wawancara siswa MAN 3 Palembang Muhammad Bimo (Kelas X IPA 7),
pada 12 Februari 2020

INDEKS

A

accountable 7
Achievement..... 54
 Akreditasi 38, 50, 51, 53
 Akuntabilitas 28
artificial 41, 46
Attitude 54

B

Benchmarking..... 9
Birokrasi 25, 126
boarding 54, 71, 129
Brain 54
burnout 113

C

Cambridge 55
capable 7
citizenship..... 3
Conselor 102

D

depletion 113
 diklat 110, 111
 diskontinu 74, 75, 130
 disposisi 10, 12, 20, 125
 Disrupsi 40
 distorsi 11, 122
 durasi..... 5, 68, 84

E

Eksistensi42, 100, 101, 136
 eksploratif 13
entrepreneurship3, 102
 evaluasi6, 8, 26, 27, 34, 82, 85,
 86, 87, 131
exhaustion 113

F

fasilitas23, 24, 46, 96, 97, 98,
 108, 110, 111, 130
fatigue 114
fiqh-oriented.....2
 fleksibel 12, 25, 31, 33, 34, 36, 37,
 38, 67, 68, 70, 71, 74, 83
 Fleksibel.....69
 fragmentasi..... 126, 127
 futurolog..... 116

G

Glokalisasi 117, 119, 136
guideline..... 125

H

habitat 29
 hadroh 55
 hafidz 54
 hafidzah 54

I

image 51, 52
 implementor 11, 12, 19, 21, 22,
 24, 25, 125, 128
 Induk..... 53, 54
 industri... 2, 3, 4, 6, 11, 17, 31, 39,
 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 100,
 101, 103, 106, 107, 108, 115,
 117, 118, 119, 120, 129, 131,
 138
 inovatif 3, 4, 6, 8, 68, 70, 103,
 104, 106, 108, 114, 120
 integral..... 2
integrated 2
 intelegensia..... 3
 intensitas 24, 112

J

jointlecture 102

K

khazanah 6
 kinerja.... 9, 23, 26, 27, 28, 29, 42,
 82, 86, 87
 kompetensi .. 2, 11, 22, 35, 36, 38,
 39, 46, 72, 81, 87, 88, 91, 94,
 98, 101, 103, 106, 111, 118,
 119, 130
 kompetisi 40, 64
 konservasi 23
 konsolidasi..... 114
 konten 75, 99, 104, 119
 kontinu 75, 130

kontribusi27
 kualifikasi.....38, 102, 123, 124
 kualitas 1, 3, 6, 10, 29, 45, 51,
 108, 119
 kurikulum.....1, 2, 3, 7, 14, 16, 34,
 36, 38, 43, 53, 54, 66, 67, 72,
 74, 75, 78, 79, 80, 82, 83, 86,
 103, 104, 105, 108, 117, 118,
 120, 130

L

Laboratorium57, 58, 96
 lembaga 2, 3, 7, 32, 44, 49, 51, 53,
 89, 108, 115, 118, 119, 131
 Literasi107
 literatur 14, 29

M

Making Indonesia3
 mayor82
 MOS99
 multidimensional27
multirealitas15
 Mutasi95

O

ordinal13
overstress 112, 120, 131

P

Paradigma105
 pengayaan94, 99
 personalia 11

prerequisites 14
Prestasi ... 2, 7, 10, 63, 84, 86, 137
primitif 117

Q

Quality 9, 54

R

regulasi 49, 101, 109, 121, 126,
127
relevansi 38, 86
remedial 93, 94, 99
renstra 7
Responsibilitas 28
Responsif 82
Responsivitas 28
revolusi .. 2, 3, 4, 6, 10, 11, 17, 40,
42, 43, 100, 101, 103, 106, 107,
108, 115, 117, 118, 119, 120,
129, 131, 139
roadmapp 74, 79, 80, 81

S

silabus 72, 82, 83, 111
sivitas 7
SKS.. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 33,

34, 35, 37, 38, 39, 40, 55, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 85, 86, 87, 88, 95, 96, 100,
108, 109, 110, 111, 112, 120,
121, 122, 123, 124, 126, 127,
129, 130, 131, 133, 134, 135,
136, 137
Slivar 113
solving 3, 106
spiritualitas 2, 105
STEAM 3, 144
struktur.. 10, 12, 14, 16, 20, 25, 26,
36, 38, 67, 72, 74, 78, 80, 82,
83, 86, 127, 128, 130
survey 87

T

triangulasi 14, 15

U

understress 112, 131

V

vokasi 4

Glosarium

BAQA : *Brain, Attitude, Quality, Achievement*

Birokrasi : salah satu unsur dalam implementasi kebijakan

Fragmentasi : penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan unit diluar organisasi

Glokalisasi : sesuatu yang global diinterpretasikan dengan nilai-nilai lokal

Informasi : sumber penting dalam implementasi kebijakan program SKS

Kejenuhan Belajar : suatu kondisi mental di mana seorang siswa mengalami kebosanan yang amat sangat untuk melakukan aktifitas belajar

Kurikulum : seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran

6

Layanan Informasi : layanan dalam bentuk pemberian informasi secara verbal dan atau non verbal, baik kepada peserta didik maupun orang tua,

Layanan Penguasaan Konten : layanan dalam bentuk kegiatan remedial, pengayaan, pemantapan, try out dan lain-lain,

Layanan Penempatan dan Penyaluran : layanan dalam bentuk pembagian kelompok atau kelas dan penyaluran potensi, minat dan bakat peserta didik agar mereka berprestasi secara optimal,

Layanan Bimbingan Kelompok : bimbingan secara klasikal dengan materi tentang tehnik membaca cepat, tehnik membuat ringkasan, tehnik menghafal dan lain-lain,

Layanan Konseling Kelompok : layanan dalam bentuk diskusi kelompok dimana setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif membahas permasalahan yang telah mereka pilih sehingga setiap anggota kelompok dapat belajar dari pengalaman anggota kelompok lainnya.

Lembaga Pendidikan : sebuah sistem yang terdiri atas beberapa komponen, di antaranya sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal

Misi : Suatu pesan kemanusiaan yang tinggi dan juga terkandung suatu aktivitas yang mengarah kepada suatu tujuan dari aktivitas tersebut

Prestasi : hasil yang telah dicapai, dilakukan, diperoleh atau dikerjakan.

SKS (Sistem Kredit Semester) : bentuk penyelenggaraan pendidikan dimana peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan atau kecepatan belajar

STEAM : (*Science, Technology, Engineering, the Arts, dan Mathematics*)

Responsivitas : kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat

Visi : suatu pandangan yang sifatnya sangat umum, tetapi mengandung arti yang cukup mendalam, sehingga di dalam membuat suatu uraian harus benar-benar dipikirkan secara filosofis

IMPLEMENTASI SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) DI MADRASAH ALIYAH MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	qdoc.tips Internet Source	2%
2	mudarwan.files.wordpress.com Internet Source	1%
3	mafiadoc.com Internet Source	1%
4	www.al-maududy.com Internet Source	1%
5	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	1%
6	www.sman2-sby.sch.id Internet Source	1%
7	journal.iain-samarinda.ac.id Internet Source	1%
8	www.ojs.uma.ac.id Internet Source	1%

eproceedings.umpwr.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
11	vdocuments.site Internet Source	1 %
12	www.coursehero.com Internet Source	1 %
13	Ahmad Khoirul Syani, Sohibul Mufid, Mufarrihul Hazin. "Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadiluwih", KHAZANAH PENDIDIKAN, 2018 Publication	1 %
14	limbong40.blogspot.com Internet Source	1 %
15	Jumad Jumad. "MPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM KREDIT SEMESTER DI SMA NEGERI 1 LAWANG", Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, 2021 Publication	1 %
16	jos.unsoed.ac.id Internet Source	1 %
17	seaagustin.blogspot.com Internet Source	1 %

18 Sutrimo Purnomo. "PENGEMBANGAN SASARAN, VISI DAN MISI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LEMBAGA PENDIDIKAN BERBASIS KEPUASAN PELANGGAN", Jurnal Kependidikan, 2017
Publication 1 %

19 eprints.uny.ac.id
Internet Source 1 %

20 Eko Supriyanto. "MODEL PENGUATAN SEKOLAH MADRASAH UNTUK MELAYANI SISWA BERKECERDASAN TINGGI MELALUI IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BERBASIS SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)", Profetika: Jurnal Studi Islam, 2017
Publication 1 %

21 rudisalam.files.wordpress.com
Internet Source 1 %

22 jonnygunawan.blogspot.com
Internet Source 1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On